



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dihitung dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan Pendekatan Kinerja atau *Performance Budget System*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Akan tetapi otonomi tersebut belum sepenuhnya diserahkan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut berasal dari transfer pusat dalam bentuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan pengesahan dalam peraturan bupati adalah Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Penyusunan APBD Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Anggaran 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan pelaksanaan APBD disusun berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan berbasis akruwal.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berbasis akruwal dimaksud adalah Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional. Sesuai dengan definisi basis akruwal, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Aset, Kewajiban, Pendapatan Operasional dan Beban Operasional pada saat telah timbulnya hak atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas disajikan dengan basis kas.

Selain itu, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bangka Barat mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diawali dengan Bab 1 Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab 2 Ekonomi Makro yang menjelaskan kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab 4 Kebijakan Akuntansi yang berisikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan yang menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, komponen-komponen laporan arus kas dan Bab 6 Penutup.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 2**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat saat ini terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Parittiga, serta 6 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Kelapa, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Keranggan dan 60 desa serta didukung 150 dusun/lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dengan luas wilayah sekitar 2.884,15 km<sup>2</sup> atau 288.415 Ha dengan jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 214.428 jiwa. Dari 214.428 jiwa tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mentok dengan 55.445 jiwa. Di Kecamatan Parittiga yaitu 37.420 jiwa, berikutnya di Kecamatan Kelapa berjumlah 35.851 jiwa, Kecamatan Simpang Tertip berjumlah 32.127 jiwa, Kecamatan Tempilang berjumlah 29.778 jiwa dan paling sedikit penduduknya Kecamatan Jebus 23.807 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada akhir tahun 2023 adalah 40 orang per km<sup>2</sup>.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 pada tahun 2023 adalah sebesar 10.803.530,00 juta rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 10.539.710,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.

**a. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.605,94	1.777,85	1.923,30	2.167,70	2.399,96
B. Pertambangan dan Penggalian	1.176,26	1.007,12	1.345,49	1.332,66	1.242,99
C. Industri Pengolahan	6.456,63	5.761,64	6.956,87	7.481,71	7.675,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,59	11,60	12,52	12,27	12,84



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,03	1,17	1,23	1,28	1,32
F. Konstruksi	1.062,66	1.050,24	1.106,14	1.186,65	1.315,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.990,96	1.892,64	2.049,36	2.410,50	2.663,87
H. Transportasi dan Pergudangan	139,70	124,39	139,01	160,56	189,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177,84	187,60	203,20	228,70	262,09
J. Informasi dan Komunikasi	51,69	61,02	65,16	71,48	80,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	63,67	63,12	69,56	82,42	93,79
L. Real Estat	295,08	313,19	330,37	368,92	404,13
M,N. Jasa Perusahaan	20,96	20,37	21,81	24,30	26,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	669,57	692,13	727,36	727,58	780,58
P. Jasa Pendidikan	269,78	282,51	296,81	310,77	332,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,86	122,49	135,84	142,03	151,35
R,S,T,U. Jasa Lainnya	46,00	45,90	47,56	51,90	58,62
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>14.157,22</b>	<b>13.414,98</b>	<b>15.431,59</b>	<b>16.761,43</b>	<b>17.691,85</b>

b. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.297,75	1.343,58	1.343,75	1.399,21	1.464,0
B. Pertambangan dan Penggalian	1.218,79	1.050,30	1.156,46	1.177,51	1.142,29
C. Industri Pengolahan	5.345,37	4.971,03	4.749,29	4.700,26	4.712,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	5,48	5,95	5,73	5,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,67	0,72	0,74	0,77	0,77
F. Konstruksi	612,82	603,87	614,18	625,66	671,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.249,77	1.172,70	1.240,84	1.355,18	1.431,62
H. Transportasi dan Pergudangan	91,23	79,38	85,97	95,72	104,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,49	109,76	116,67	128,27	144,55
J. Informasi dan Komunikasi	40,55	47,98	50,82	55,13	62,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	39,62	39,45	41,56	45,14	50,48
L. Real Estate	198,93	208,91	217,88	235,73	252,10
M,N. Jasa Perusahaan	13,50	12,27	12,78	13,84	14,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	403,25	400,73	419,31	415,41	445,06
P. Jasa Pendidikan	161,99	160,74	163,72	168,70	176,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,25	77,07	84,19	86,43	90,73
R,S,T,U. Jasa Lainnya	29,65	28,26	28,89	31,02	33,95
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>10.895,22</b>	<b>10.312,23</b>	<b>10.333,00</b>	<b>10.539,71</b>	<b>10.803,49</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2021	2022	2023
69,60	70,12	71,13

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 sebesar 65,98 persen artinya sebesar 65 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka Barat tahun yang sama sebesar 3,83 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 3 orang diantaranya pencari kerja.

Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2021	2022	2023
3,83	4,86	3,83

Untuk mengukur angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	599.887,00	5.850	2,75
2022	635.861,00	5.300	2,46
2023	681.517,00	5.910	2,71



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintahan yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi, dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Kebijakan di bidang belanja daerah secara umum masih sama dengan kebijakan pada tahun sebelumnya, yaitu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh OPD diarahkan untuk menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*output*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*),
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan OPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup,
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap OPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan,
4. Mengarahkan kepada seluruh OPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas,
5. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah,
6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sarana desa melalui tugas alokasi dana desa ataupun dana sharing PNPM,
8. Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa,



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial,
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya,
13. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan, dan jembatan,
  - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan, dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
  - c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat,
  - d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alokasi belanja Tahun Anggaran 2023 tetap lebih menekankan pada pelayanan publik, yang tercermin dari cukup besarnya anggaran yang disediakan untuk bidang pendidikan yang mencapai sekitar 27,47% dari total anggaran dan bidang kesehatan yang mencapai sekitar 19,45% dari total anggaran. Pembelanjaan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik dan bantuan-bantuan sosial yang dititik beratkan pada bidang pendidikan maupun kesehatan tersebut lebih diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan kesehatan. Program bantuan operasional sekolah, bantuan untuk siswa keluarga kurang mampu, siswa dan guru berprestasi, bantuan untuk keluarga miskin, dan hibah kepada organisasi-organisasi yang mendukung program pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Dalam memenuhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kabupaten Bangka Barat telah menganggarkan kluster Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan salah satu kluster dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirancang untuk menjaga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari resiko akibat kesenjangan yang lebih dalam.

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Secara umum pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Bangka Barat telah berjalan cukup baik, sebagian besar program kegiatan dari masing-masing OPD dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari segi tolak ukur kinerja seperti input, output, dan *outcome*-nya. Realisasi pendapatan tahun 2023 secara keseluruhan adalah 96,98% dari target yang direncanakan, sedangkan daya serap belanja dan transfer tahun 2023 adalah sebesar 92,13%. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dapat diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang.

Adapun faktor yang menghambat sehingga terjadinya beberapa program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja seperti yang diharapkan antara lain, SDM dari pihak ketiga maupun aparatur yang kurang kompetensinya, pengawasan kurang baik, terjadinya sesuatu tidak sesuai rencana atau karena faktor alam. Namun faktor-faktor penghambat tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas tidak tercapainya target yang diharapkan. Semua faktor hambatan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan tantangan yang harus dapat diatasi ditahun-tahun yang akan datang untuk tercapainya masyarakat Bangka Barat yang sejahtera.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 3**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Pendapatan**

Setiap Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Untuk membangun daerah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari propinsi dan pusat. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas Pemerintah dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Target Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp999.267.921.919,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp969.076.700.336,41 atau mencapai 96,98% sedangkan realisasi Pendapatan tahun 2022 adalah sebesar Rp965.910.493.753,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.166.206.582,62.

Rincian pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Tahun 2023 PAD ditargetkan sebesar Rp73.406.243.464,00 dan terealisasi sebesar Rp71.795.673.410,41 atau sebesar 97,81%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp88.534.302.222,79 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.738.628.812,38 Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan dari Pajak Daerah sebesar Rp29.156.787.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp26.506.009.473,00 atau sebesar 90,91%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp21.724.751.484,90 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.781.257.988,10. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan adanya peningkatan jumlah objek pajak.

b. Retribusi Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan dari Retribusi Daerah sebesar Rp8.127.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.781.270.518,00 atau sebesar 95,74%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.355.787.438,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp425.483.080,00. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.850.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp6.844.661.601,00 atau sebesar 69,49%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.306.960.199,78 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.537.701.401.31.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp26.271.955.964,00 dapat terealisasi sebesar Rp30.663.731.818,32 atau sebesar 116,72%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp54.146.803.100,11 atau mengalami penurunan sebesar Rp23.483.071.281,79. Penurunan ini dikarenakan menurunnya pendapatan pada BLUD RSUD Sejiran Setason.
2. Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp914.736.678.454,00 dan terealisasi sebesar Rp886.513.895.807,00 atau sebesar 96,91%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp868.259.629.159,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp43.276.890.819,00. Pendapatan Transfer terdiri dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp728.380.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp706.546.362.625,00 atau sebesar 97,00%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp750.004.671.444,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.254.266.648,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 terdiri dari:
    - 1) Dana Bagi Hasil Pajak  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp37.576.777.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp34.630.338.277,00 atau 92,16%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp34.564.587.906,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp65.750.371,00.
    - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp102.077.106.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.415.826.636,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

atau sebesar 91,51%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp176.103.280.339,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp82.687.453.703,00. Penurunan ini dikarenakan menurunnya Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty.

3) Dana Alokasi Umum

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp435.286.031.000,00 dan terealisasi sebesar Rp434.631.148.780,00 atau sebesar 99,85%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp419.082.296.005,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.548.852.775,00.

4) Dana Alokasi Khusus

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp153.440.701.000,00 dan terealisasi sebesar Rp143.869.048.932,00 atau sebesar 93,76%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp120.254.507.194,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.614.541.738,00.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp81.391.689.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.391.689.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp58.720.679.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.671.010.000,00. Transfer Pemerintah Pusat lainnya tahun 2023 merupakan pendapatan Dana Penyesuaian yang terdiri dari :

1) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp26.956.967.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.956.967.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.374.370.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.582.597.000,00.

2) Dana Desa

Dana Desa tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp54.434.722.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.434.722.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp52.346.309.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.088.413.000,00.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp104.964.374.454,00 dapat direalisasikan sebesar Rp98.575.844.182,00 atau sebesar 93,91%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp59.534.278.715,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp39.041.565.467,00. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak  
Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp69.052.810.804,00 dan terealisasi sebesar Rp63.044.686.182,00 atau 91,30%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp54.567.478.715,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.477.207.467,00.
- 2) Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya  
Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp35.911.563.650,00 dan terealisasi sebesar Rp35.531.158.000,00 atau 98,94%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.966.800.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.564.358.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp11.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.767.131.119,00 atau sebesar 96,78%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.116.562.372,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.650.568.747,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 terdiri dari :

Pendapatan Hibah

- 1) Pendapatan Hibah  
Pendapatan Hibah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp452.000.000,00 atau sebesar 90,40%, sedangkan tahun 2022 tidak ada realisasi.
- 2) Pendapatan Lainnya  
Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan Lainnya tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp10.625.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.315.131.119,00 atau sebesar 97,08%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.116.562.372,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.198.568.747,00.

### 3.2 Belanja

Jumlah Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp988.912.581.540,00 dan terealisasi sebesar Rp902.065.275.856,42 atau sebesar 91,27%, sedangkan tahun 2022 Belanja Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

terrealisasi sebesar Rp758.886.587.598,69 atau mengalami kenaikan sebesar Rp143.178.688.257,73. Rincian Belanja Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp803.547.706.878,00 dan terealisasi Rp739.131.258.388,49 atau sebesar 91,98%, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp679.707.773.238,36 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.423.485.150,13. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp369.302.167.723,00 dan terealisasi Rp349.617.465.878,00 atau sebesar 94,67%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp340.559.407.327,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.058.058.551,00.

b. Belanja Barang

Belanja Barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp384.712.061.158,00 dan terealisasi sebesar Rp340.820.573.704,49 atau sebesar 88,59%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp315.990.239.015,36 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.830.334.689,13.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp45.556.047.997,00 dan terealisasi sebesar Rp45.044.038.570,00 atau sebesar 98,88%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.154.171.375,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.889.867.195,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.977.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.649.180.236,00 atau 91,75%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.003.955.521,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.354.775.285,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp182.196.135.162,00 terealisasi sebesar Rp162.934.017.467,93 atau sebesar 89,43%, sedangkan untuk tahun 2022 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp79.178.814.360,33 atau mengalami kenaikan sebesar Rp83.755.203.107,60. Belanja Modal terdiri dari:

a) Belanja Tanah

Belanja Tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.700.000.000,00 namun tidak terealisasi, sedangkan untuk tahun 2022 tidak terealisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- b) Belanja Peralatan dan Mesin  
Belanja Peralatan dan Mesin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.357.947.316,00 dan terealisasi sebesar Rp31.054.707.102,86 atau sebesar 93,10%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp30.522.088.004,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp532.619.098,86.
  - c) Belanja Gedung dan Bangunan  
Belanja Gedung dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp68.590.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.751.185.849,07 atau sebesar 90,03%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp23.708.809.580,03 atau mengalami kenaikan sebesar Rp38.042.376.269,04.
  - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp73.018.630.372,00 dan terealisasi sebesar Rp65.901.977.241,00 atau 90,25%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp23.794.316.695,30 atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.107.660.545,70.
  - e) Belanja Aset Tetap Lainnya  
Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.528.786.474,00 dan terealisasi sebesar Rp4.226.147.275,00 atau 93,32%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.153.600.081,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.072.547.194,00.
  - f) Belanja Aset Lainnya  
Belanja Aset Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
3. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.168.739.500,00 namun tidak terealisasi, sedangkan untuk tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi.

### 3.3 Transfer

Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp117.647.142.150,00 dan terealisasi sebesar Rp117.647.054.237,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp114.215.469.015,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.431.585.222,00.

#### 3.3.1 Bagi Hasil Ke Desa

Bagi Hasil Ke Desa merupakan Bagi Hasil yang diberikan kepada Desa atas Pendapatan objek Pajak dan Retribusi yang terdapat pada Desa. Bagi Hasil Ke



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Desa tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.728.428.750,00 dan terealisasi sebesar Rp3.728.428.749,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.033.725.515,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp305.296.766,00. Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.915.678.750,00 dan terealisasi sebesar Rp2.915.678.750,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.016.359.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp100.680.250,00.

2. Bagi Hasil Retribusi

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp812.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp812.749.999,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.017.366.515,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp204.616.515,00.

### 3.3.2 Transfer Kepada Desa

Transfer Kepada Desa merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Tahun 2023 Transfer Kepada Desa dianggarkan sebesar Rp113.918.713.400,00 dan terealisasi sebesar Rp113.918.625.488,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2022 Transfer Kepada Desa terealisasi sebesar Rp109.981.743.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.936.881.988,00.

### 3.3.3 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2023 Transfer Antar Daerah tidak dianggarkan sedangkan tahun 2022 Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp200.000.000,00.

### 3.4 Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp107.291.801.770,00 dan terealisasi sebesar Rp107.198.601.770,71 atau sebesar 99,91%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp14.383.364.630,61 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.815.237.140,10. Kenaikan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan Silpa tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

a. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp107.191.801.770,00 dan terealisasi sebesar Rp107.191.801.770,71 atau 100,00%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp14.346.688.380,61 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.845.113.390,10.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- b. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah  
Pada anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.800.000,00 atau sebesar 6,80%, sedangkan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp36.676.250,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp29.876.250,00. Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan pengembalian pokok pinjaman perkuatan modal.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 tidak dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan antara surplus/defisit pendapatan dan belanja dengan pembiayaan netto maka didapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp56.562.972.013,70 sedangkan untuk tahun 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp107.191.801.770,71 atau mengalami penurunan sebesar Rp50.628.829.757,01.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 4**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 16 dinas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - e. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
  - i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - p. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
5. Badan Daerah sebanyak 6 badan, terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kecamatan sebanyak 6 kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Mentok dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Jebus dengan Tipe A; dan
  - f. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh pada tanggal 4 Desember 2015.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi. OPD bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada pada OPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Bentuk pertanggungjawaban OPD disusun dalam Laporan Keuangan OPD yang harus dilaporkan dan disampaikan secara rutin kepada fungsi Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ataupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 60 (enam puluh) Desa dan 6 (enam) Kelurahan. Desa merupakan bentuk Pemerintahan tersendiri yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat walaupun sumber Keuangan Desa sebagian besar bersumber dari dana transfer Pemerintah Kabupaten ke Desa. Sedangkan Kelurahan merupakan entitas yang pencatatan akuntansinya tergabung dalam entitas akuntansi Kecamatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi lainnya yang pencatatan akuntansinya tergabung ke OPD yang menaunginya, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora)  
Dikpora memiliki 6 (enam) Koordinator Pendidikan Wilayah di enam kecamatan. Selain itu, Dikpora juga memiliki 38 (tiga puluh delapan) SMP, 136 (seratus tiga puluh enam) SD, dan 41 (empat puluh satu) TK.
2. Dinas Kesehatan  
Dinas Kesehatan memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum, 8 (delapan) Puskesmas dan 19 (sembilan belas) Puskesmas Pembantu.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 3 (tiga) UPT di tiga kecamatan (Jebus, Kelapa, Muntok) UL (Unit Layanan) 3 yaitu Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan  
Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 (dua) UPT yaitu UPT Balai Benih Ikan di Kecamatan Kelapa dan UPT Pasar Pendaratan Ikan di Kecamatan Muntok.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 1 (satu) UPT yaitu UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

6. Dinas Pertanian dan Pangan  
Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 2 (dua) UPT Balai Penyuluh di dua kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

1. PDAM Tirta Sejiran Setason  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang PDAM Tirta Sejiran Setason. Susunan Direksi PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

Direktur	Najamuddin, SH
Kabag. Administrasi, Keuangan dan Umum	Irsan
Kabag. Teknik	Arsudin

Sedangkan susunan Badan Pengawas PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terdiri dari:

Badan Pengawas	Ir. Suharli
----------------	-------------

2. PD Bangka Barat Sejahtera  
PD Bangka Barat Sejahtera didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera. Susunan Kepengurusan PD Bangka Barat Sejahtera Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Abimanyu, SE.,M.Ec. Dev, Ak	Plt. Dewan Pengawas

Sebagai entitas pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

1. **Pendapatan-LRA.**  
Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. **Pendapatan-LO**  
Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pendapatan tersebut diterima di kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. **Belanja**  
Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
4. **Beban**  
Beban diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pengeluaran kas dari kas daerah. Akuntansi Beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
5. **Transfer**  
Transfer adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
6. **Pembiayaan**  
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. **Kas dan Setara Kas**  
Kas merupakan uang tunai dan saldo di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang sangat signifikan.
8. **Piutang**  
Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari Entitas lain termasuk Wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

9. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

10. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

11. Aset dan Penyusutan

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kendali berpindah.

12. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya belum selesai sampai pada tahun anggaran.

13. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

14. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

15. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

16. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

17. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

18. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan acuan konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan daerah merupakan penggabungan dua laporan keuangan entitas pelaporan yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan BLUD.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 salah satunya mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rincian APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pos Anggaran	APBD Perubahan 2023 (Rp)	APBD 2023 (Rp)
1	Pendapatan	999.267.921.919,00	890.150.345.500,00,00
2	Belanja dan Transfer	1.106.559.723.690,00	1.022.156.851.932,00
3	Penerimaan Pembiayaan	107.291.801.770,00	132.006.506.432,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengakomodir anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sejiran Setason dan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN, baik pendapatan maupun belanja.

Kebijakan basis pengukuran atau penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan pada buku inventaris bidang aset yang merupakan rekap dari daftar inventaris OPD. Harga perolehan memasukkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

biaya-biaya lain seperti honorarium panitia, ATK, biaya perjalanan dinas serta biaya-biaya lainnya untuk memperoleh aset tetap tersebut.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **4.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang dikonsolidasikan adalah laba/rugi operasional yang mempengaruhi penyertaan modal pemerintah daerah. Laba/rugi operasional dimaksud adalah untuk BUMD yang penilaian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk laporan keuangan BLUD, khusus untuk laporan arus kas tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun laporan keuangan tahun 2023 menggunakan aplikasi SIPD Kementrian Dalam Negeri dan SIMDA BMD Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 5**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**1.1 Pendapatan-LRA**

**1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA**

Pendapatan Asli Daerah-LRA merupakan pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 sebesar Rp73.406.243.464,00 dengan realisasi sebesar Rp71.795.673.410,41 atau sebesar 97,81%.

**1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

Pendapatan Pajak Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Pajak-LRA merupakan pendapatan pajak yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun pelaporan dan pendapatan pajak dari pelunasan piutang pajak.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat merealisasikan penerimaan daerah melalui pajak daerah sebesar Rp26.506.009.473,00 dan berkontribusi sebesar 36,92% dari total Pendapatan Asli Daerah. Dari 11 (sebelas) sumber pajak daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp14.463.924.454,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2022, realisasi penerimaan pajak di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.781.257.988,10 atau 22,01%. Kenaikan penerimaan pajak daerah di Tahun 2023 dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan meningkatnya jumlah objek pajak di Kabupaten Bangka Barat.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	% Kenaikan/ penurunan
1.1.1.1.1	Pajak Hotel	105.787.500,00	164.261.141,00	65.351.001,00	98.910.140,00	151,35
1.1.1.1.2	Pajak Restoran	2.961.000.000,00	2.642.093.271,00	2.055.812.417,00	586.280.854,00	28,52
1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	70.000.000,00	30.239.325,00	40.526.399,00	(10.287.074,00)	25,38



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/penurunan
1.1.1.1.4	Pajak Reklame	500.000.000,00	294.189.774,00	342.360.716,10	(48.170.942,10)	14,07
1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	14.463.924.454,00	12.465.654.940,00	1.998.269.514,00	16,03
1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	807.064.162,00	381.669.363,00	425.394.799,00	111,46
1.1.1.1.7	Pajak Parkir	20.000.000,00	5.388.400,00	4.100.000,00	1.288.400,00	31,42
1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	109.316.975,00	126.994.263,80	(17.677.289,80)	13,92
1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00	318.079.700,00	232.118.500,00	85.961.200,00	37,03
1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.300.000.000,00	5.062.837.371,00	4.775.580.941,00	287.256.430,00	6,02
1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.650.000.000,00	2.608.614.900,00	1.234.582.944,00	1.374.031.956,00	111,30
	<b>Total</b>	<b>29.156.787.500,00</b>	<b>26.506.009.473,00</b>	<b>21.724.751.484,90</b>	<b>4.781.257.988,10</b>	<b>22,01</b>

#### 1. Pajak Hotel

Pajak Hotel tahun 2023 terealisasi sebesar Rp164.261.141,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp65.351.001,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp98.910.140,00 atau sebesar 151,35%. Pendapatan Pajak Hotel di tahun 2023 mengalami peningkatan di dibandingkan tahun 2022, hal ini dikarenakan tahun 2023 pengguna jasa hotel di Kabupaten Bangka Barat meningkat dibandingkan dengan tahun 2022.

#### 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.642.093.271,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.055.812.417,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp586.280.854,00 atau sebesar 28,52%. Kenaikan ini dikarenakan kenaikan transaksi makan minum yang dikenakan pajak serta pemasangan *Tapping Box* pada beberapa tempat strategis restoran dan rumah makan.

#### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp30.239.325,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp40.526.399,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.287.074,00 atau sebesar 25,38%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya aktivitas hiburan seperti pasar malam, pameran dan balapan.

#### 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame tahun 2023 terealisasi sebesar Rp294.189.774,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp342.360.716,10 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp48.170.942,00 atau sebesar 14,07%. Hal ini dikarenakan penurunan pemasangan reklame oleh wajib pajak di Kabupaten Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**5. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.463.924.454,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.465.654.940,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.998.269.514,00 atau sebesar 16,03%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya pelanggan baru PLN yang menjadi sumber penghasilan baru yang dikenakan pajak.

**6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp807.064.162,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar 381.669.363,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp425.394.799,00 atau sebesar 111,46%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya pengerjaan konstruksi fisik di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Pajak Parkir**

Pajak Parkir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.388.400,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.100.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.288.400,00 atau sebesar 31,42%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penggunaan jasa parkir oleh masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak parkir.

**8. Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp109.316.975,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp126.994.263,80 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp17.677.289,00 atau sebesar 13,92%. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya jumlah wajib pajak akibat menutup usahanya.

**9. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 terealisasi sebesar Rp318.079.700,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp232.118.500,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp85.961.200,00 atau sebesar 37,03%. Kenaikan dari penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan meningkatnya hasil panen sarang burung walet.

**10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.062.837.371,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.775.580.941,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp287.256.430,00 atau sebesar 6,02%. Kenaikan dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan bertambahnya wajib pajak dan meningkatnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

**11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.608.614.900,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.234.582.944,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.374.031.956,00 atau sebesar 111,30%. Kenaikan ini dikarenakan adanya pemindahan hak pembangunan pabrik baru dari perusahaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah jenis retribusi dan organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi:

Jenis Retribusi	OPD
Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Pelayanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Paritiga, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Pengujian Kendaraan Bermotor	
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	
Retribusi Kios	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Pendapatan Retribusi-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Retribusi-LRA merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun pelaporan dan pendapatan retribusi dari pelunasan piutang retribusi.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.1	Pelayanan Kesehatan	2.942.360.000,00	3.280.462.700,00	3.165.820.800,00	114.641.900,00	3,62
1.1.1.2.2	Pelayanan Persampahan	1.206.000.000,00	733.847.000,00	483.970.000,00	249.877.000,00	51,63
1.1.1.2.3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	104.873.000,00	99.058.000,00	5.815.000,00	5,87
1.1.1.2.4	Pelayanan Pasar	70.000.000,00	307.208.200,00	50.880.300,00	256.327.900,00	503,79
1.1.1.2.5	Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	99.128.700,00	141.618.600,00	(42.489.900,00)	30,00
1.1.1.2.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00	26.536.000,00	45.276.600,00	(18.740.600,00)	41,39
1.1.1.2.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	230.000.000,00	297.240.000,00	138.936.500,00	158.303.500,00	113,94
1.1.1.2.8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	522.995.627,00	608.773.769,00	(85.778.142,00)	14,09
1.1.1.2.9	Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	100,00
1.1.1.2.10	Pasar Grosir/Pertokoan	325.000.000,00	229.084.396,00	158.808.850,00	70.275.546,00	44,25
1.1.1.2.11	Tempat Pelelangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.12	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal	167.140.000,00	92.512.000,00	172.942.928,00	(80.430.928,00)	46,51
1.1.1.2.13	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00	1.044.938.000,00	1.239.189.000,00	(194.251.000,00)	15,68



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.14	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	34.088.000,00	16.750.000,00	17.338.000,00	103,51
1.1.1.2.15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	580.000.000,00	647.633.000,00	603.103.000,00	44.530.000,00	7,38
1.1.1.2.16	Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	7.900.000,00	6.130.000,00	1.770.000,00	28,87
1.1.1.2.17	Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	352.823.895,00	423.529.091,00	(70.705.196,00)	-16,69
1.1.1.2.18	Izin Trayek	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.19	Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.20	IMTA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>8.127.500.000,00</b>	<b>7.781.270.518,00</b>	<b>7.355.787.438,00</b>	<b>425.483.080,00</b>	<b>5,78</b>

Tahun 2023 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.781.270.518,00 dan berkontribusi sebesar 10,84% dari total PAD. Dari sumber-sumber retribusi daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp3.280.462.700,00. Pada umumnya capaian retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

**1. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.280.462.700,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.165.820.800,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp114.641.900,00 atau sebesar 3,62%. Kenaikan ini dikarenakan adanya program *Universal Health Coverage* (UHC) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaminan kesehatan yang menjadi dasar perhitungan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP. Program UHC ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Bangka Barat.

**2. Retribusi Pelayanan Persampahan**

Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp733.847.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp483.970.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp249.877.000,00 atau sebesar 51,63%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya wajib retribusi persampahan yang menggunakan jasa retribusi persampahan.

**3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2023 terealisasi sebesar Rp104.873.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rp99.058.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.815.000,00 atau sebesar 5,87%.

**4. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2023 terealisasi sebesar Rp307.208.200,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.880.300,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp256.327.900,00 atau sebesar 503,79%. Kenaikan ini dikarenakan adanya penyetoran penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2022 yang disetorkan di tahun 2023.

**5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2023 terealisasi sebesar Rp99.128.700,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp141.618.600,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp42.489.900,00 atau sebesar 30,00%. Penurunan dari penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan berkurangnya jumlah kendaraan umum baik penumpang maupun barang yang melakukan uji kelayakan kendaraan.

**6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2023 terealisasi Rp26.536.000,00, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp45.276.600,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp18.740.600,00 atau sebesar 41,39%. Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah penggunaan penyedotan kakus di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2023 terealisasi sebesar Rp297.240.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp138.936.500,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp158.303.500,00 atau sebesar 113,94%. Kenaikan ini sangat signifikan dikarenakan oleh sebagian besar pedagang di Kabupaten Bangka Barat melakukan tera ulang.

**8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2023 terealisasi sebesar Rp522.995.627,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp608.773.769,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp85.778.142,00 atau sebesar 14,09%.

**9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 tidak terealisasi sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Penurunan ini dikarenakan tidak adanya penyewaan alat berat oleh masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**10. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp229.084.396,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp158.808.850,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp70.275.546,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

sebesar 44,25%. Hal ini dikarenakan menurunnya pembayaran retribusi pasar grosir oleh wajib retribusi.

**11. Retribusi Tempat Pelelangan**

Tahun 2023 Retribusi Tempat Pelelangan tidak terealisasi.

**12. Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal**

Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal Umum tahun 2023 terealisasi sebesar Rp92.512.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp172.942.928,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp80.430.928,00 atau sebesar 46,51%. Penurunan ini disebabkan fasilitas-fasilitas yang berada didalam terminal banyak yang tidak beroperasi.

**13. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.044.938.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.239.189.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp194.251.000,00 atau sebesar 15,68%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah pasar.

**14. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila merupakan sewa penginapan/bungalow milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berada di lokasi wisata Batu Rakit. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.088.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp16.750.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp17.338.000,00 atau sebesar 103,51%. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah sewa penginapan di lokasi wisata Batu Rakit.

**15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2023 terealisasi sebesar Rp647.633.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp603.103.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp44.530.000,00 atau sebesar 7,38%. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi di Kabupaten Bangka Barat.

**16. Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2023 merupakan retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan terealisasi sebesar Rp7.900.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.130.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.770.000,00 atau sebesar 28,87%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penjualan benih ikan pada BBI di Kecamatan Kelapa.

**17. Retribusi IMB**

Retribusi IMB tahun 2023 terealisasi sebesar Rp352.823.895,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp423.529.091,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp70.705.196,00 atau sebesar 16,69%. Realisasi Retribusi IMB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

dikarenakan menurunnya jumlah masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

**18. Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek tahun 2023 tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengurus izin trayek.

**19. Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 2023 tidak ada terealisasi dikarenakan tidak adanya masyarakat mengurus izin usaha perikanan.

**20. IMTA**

Retribusi IMTA 2023 tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya Perusahaan atau individu yang mengurus izin IMTA.

**1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan merupakan pendapatan berupa dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Lembaga Keuangan. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.3	Dividen atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan	9.850.000.000,00	6.844.661.601,09	5.306.960.199,78	1.537.701.401,31	28,98
	<b>Total</b>	<b>9.850.000.000,00</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>5.306.960.199,78</b>	<b>1.537.701.401,31</b>	<b>28,98</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.844.661.601,09 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.306.960.199,78 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.537.701.401,31 atau sebesar 28,98%. Realisasi tersebut merupakan dividen atas penyertaan modal pada PT. BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung untuk tahun buku 2022.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Dividen dari PT. BPR Syariah Bangka Belitung, hal ini dikarenakan PT. BPR Syariah Bangka Belitung mengalami permasalahan keuangan, sehingga masih dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki kinerja keuangan dari bank tersebut.

**1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	606.364.500,00	5.362.039.000,00	(4.755.674.500,00)	88,69
1.1.1.4.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	99.000.000,00	92.755.000,00	311.369.750,00	(218.614.750,00)	70,21
1.1.1.4.3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	848.161.950,04	593.167.711,31	254.994.238,73	42,99
1.1.1.4.4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.792.589.004,00	705.616.407,00	2.086.972.597,00	295,77
1.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	109.401.533,00	107.102.591,00	2.298.942,00	2,15
1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	1.408.236,00	0,00	1.408.236,00	100,00
1.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Restoran	200.000.000,00	7.246.840,00	4.053.967,00	3.192.873,00	78,76
1.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.000.000,00	10.167.065,00	870.715,00	9.296.350,00	1.067,67
1.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000.000,00	1.152.225,00	1.097.280,00	54.945,00	5,01
1.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	1.440.900,00	419.700,00	1.021.200,00	243,32
1.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	1.115.200,00	0,00	1.115.200,00	100,00
1.1.1.4.12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	10.621.250,00	18.368.067,00	(7.746.817,00)	42,18



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.13	Pendapatan BLUD	16.057.034.381,00	23.582.074.721,49	46.049.796.057,65	(22.467.721.336,16)	48,79
1.1.1.4.14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.525.921.583,00	2.599.233.393,79	992.901.854,15	1.606.331.539,64	161,78
<b>Total</b>		<b>26.271.955.964,00</b>	<b>30.663.731.818,32</b>	<b>54.146.803.100,11</b>	<b>(23.483.071.282,11)</b>	<b>43,37</b>

Berikut penjelasan terkait kenaikan maupun penurunan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA :

**1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA**

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA merupakan penerimaan atas pelepasan dari Barang Milik Daerah. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2023 terealisasi sebesar Rp606.364.500,00 sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.362.039.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.755.674.500,00 atau sebesar 88,69%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah pelepasan kendaraan di Kabupaten Kabupaten Bangka Barat.

**2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA**

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD tahun terealisasi sebesar Rp92.755.000,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp311.369.750,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp218.614.750,00 atau sebesar 70,21%. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya jumlah Pemanfaatan BMD di Kabupaten Bangka Barat.

**3. Jasa Giro pada Kas Daerah-LRA**

Jasa Giro pada Kas Daerah -LRA merupakan penerimaan jasa giro rekening kas daerah dan penerimaan jasa giro rekening bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Jasa Giro-LRA tahun 2023 terealisasi sebesar Rp848.161.950,04 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp593.167.711,31 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp254.994.238,73 atau sebesar 42,99%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya dana yang terdapat pada Giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA**

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA merupakan Penerimaan Bunga Deposito atas penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk deposito di BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Bunga Deposito tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.792.589.004,00 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp705.616.407,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.086.972.597,00 atau sebesar 295,77%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penempatan Deposito yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan fisik berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp109.401.533,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp107.102.591,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.298.942,00 atau sebesar 2,15%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya pekerjaan fisik di Kabupaten Bangka Barat yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

**6. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak hotel. Pendapatan Denda Pajak Hotel tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.408.236,00 sedangkan di tahun 2022 tidak terealisasi, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.408.236,00 atau sebesar 100,00%.

**7. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran. Pendapatan Denda Pajak Restoran tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.246.840,00 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.053.967,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.192.873,00 atau sebesar 78,76%. Kenaikan ini disebabkan banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak restoran.

**8. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame. Pendapatan Denda Pajak Reklame tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.167.065,00 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp870.715,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp9.296.350,00 atau sebesar 1.067,67%. Kenaikan ini dikarenakan banyak wajib pajak yang membayar pajak reklame tidak tepat waktu.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**9. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.152.225,00 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.097.280,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp54.945,00 atau sebesar 5,01%.

**10. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.440.900,00 sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp419.700,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.021.200,00 atau sebesar 243,32%. Kenaikan ini dikarenakan banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak sarang burung walet.

**11. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.115.200,00 sedangkan di tahun 2022 tidak terealisasi.

**12. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA**

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA merupakan pendapatan atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.621.250,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp18.368.067,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp7.746.817,00 atau sebesar 42,18%. Penurunan ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran lebih teliti dalam menghitung pembayaran gaji ASN di Kabupaten Bangka Barat dibandingkan tahun sebelumnya.

**13. Pendapatan BLUD-LRA**

Pendapatan BLUD-LRA merupakan Pendapatan yang bersumber dari Jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23.582.074.721,49 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp46.049.796.057,65 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp22.467.721.336,16 atau sebesar 48,79%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**14. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA merupakan pendapatan daerah yang dikarenakan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya, pendapatan atas pengembalian kekurangan volume dan pendapatan yang tidak diklasifikasikan pada jenis pendapatan sebagaimana telah disebutkan di atas. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.599.233.393,79 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp992.901.854,15 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.606.331.539,64 atau sebesar 161,78%. Kenaikan ini dikarenakan adanya pembayaran kekurangan volume pekerjaan tahun sebelumnya.

**1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA**

Pendapatan Transfer-LRA adalah Pendapatan Transfer yang berasal dari entitas lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain.

**1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
1.1.2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	28.827.792.000,00	26.903.306.418,00	28.792.822.906,00	(1.889.516.488,00)	6,56
1.1.2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPH 21 s.d. 29	8.748.985.000,00	7.727.031.859,00	5.771.765.000,00	1.955.266.859,00	33,88
	<b>Sub total</b>	<b>37.576.777.000,00</b>	<b>34.630.338.277,00</b>	<b>34.564.587.906,00</b>	<b>65.750.371,00</b>	<b>0,19</b>
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>					
1.1.2.1.2.1	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	10.309.103.000,00	10.311.024.803,00	17.773.000,00	10.293.251.803,00	57.915,11
1.1.2.1.2.2	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	2.773.073.000,00	2.984.826.211,00	1.958.311.000,00	1.026.515.211,00	52,42



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
1.1.2.1.2.3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	1.005.219.000,00	1.072.747.922,00	1.102.700.018,00	(29.952.096,00)	2,72
1.1.2.1.2.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	87.989.711.000,00	79.047.227.700,00	173.024.496.321,00	(93.977.268.621,00)	54,31
	<b>Sub Total</b>	<b>102.077.106.000,00</b>	<b>93.415.826.636,00</b>	<b>176.103.280.339,00</b>	<b>(82.687.453.703,00)</b>	<b>46,95</b>
1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	435.286.031.000,00	434.631.148.780,00	419.082.296.005,00	15.548.852.775,00	3,71
1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	153.440.701.000,00	143.869.048.932,00	120.254.507.194,00	23.614.541.738,00	19,64
	<b>Total</b>	<b>728.380.615.000,00</b>	<b>706.546.362.625,00</b>	<b>750.004.671.444,00</b>	<b>(43.458.308.819,00)</b>	<b>5,79</b>

Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp728.380.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp706.546.362.625,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp750.004.671.444,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp43.458.308.819,00 atau sebesar 5,79%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada Tahun 2023 Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp37.576.777.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.630.338.277,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp34.564.587.906,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp65.750.371,00 atau sebesar 0,19%.

### 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan Pertambangan umum. Pada Tahun 2023 pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp102.077.106.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.415.826.636,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp176.103.280.339,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp82.687.453.703,00 atau sebesar 46,95%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Pada Tahun 2023 Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp435.286.031.000,00 dan terealisasi sebesar Rp434.631.148.780,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp419.082.296.005,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp15.548.852.775,00 atau sebesar 3,71%.

**4. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2023 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp153.440.701.000,00 dan terealisasi sebesar Rp143.869.048.932,00 sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp120.254.507.194,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp23.614.541.738,00 atau sebesar 19,64%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per jenis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	461.761.000,00	460.174.000,00	99,66
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.182.856.000,00	4.953.449.599,00	95,57
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.126.979.000,00	5.505.622.400,00	89,86
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	492.447.248,00	98,49
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	9.953.902.000,00	8.248.707.500,00	82,87
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.305.971.000,00	2.287.860.000,00	99,21
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.408.507.000,00	10.331.930.690,00	99,26
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.864.933.000,00	1.864.465.600,00	99,97
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	244.925.000,00	243.500.000,00	99,42
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.535.225.000,00	12.943.722.358,00	78,28
<b>Sub Total</b>	<b>53.585.059.000,00</b>	<b>47.331.879.395,00</b>	<b>88,33</b>
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>			



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.171.940.000,00	33.904.322.478,00	105,38
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.775.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.245.211.000,00	35.245.209.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	871.500.000,00	871.500.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.057.620.000,00	5.031.790.200,00	124,01
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	977.700.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.972.037.000,00	13.851.401.320,00	198,67
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.086.276.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.730.187.000,00	2.014.394.440,00	73,78
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	380.954.077,00	90,62
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.289.508.000,00	1.141.796.392,00	88,55
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000,00	237.615.000,00	61,56
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	80.312.000,00	18,30
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	594.575.000,00	277.874.630,00	46,74
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
<b>Sub Total</b>	<b>99.855.642.000,00</b>	<b>96.537.169.537,00</b>	<b>96,68</b>

### 1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA merupakan penerimaan Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp81.391.689.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.391.689.000,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp58.720.679.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp22.671.010.000,00. Kenaikan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dikarenakan meningkatnya Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.1.2.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	26.956.967.000,00	26.956.967.000,00	6.374.370.000,00	20.582.597.000,00	322,90



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.1.2.2.1.2.2	Dana Desa	54.434.722.000,00	54.434.722.000,00	52.346.309.000,00	2.088.413.000,00	3,99
<b>Total</b>		<b>81.391.689.000,00</b>	<b>81.391.689.000,00</b>	<b>58.720.679.000,00</b>	<b>22.671.010.000,00</b>	<b>38,61</b>

**1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA**

Transfer Pemerintah Provinsi-LRA merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp104.964.374.454,00 dan terealisasi sebesar Rp98.575.844.182,00 atau sebesar 93,91%.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

No	Periode	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bea balik nama kend. Bermotor (Rp)	Pajak Air Permukaan (Rp)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp)	Pajak Rokok (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
1	Triwulan IV Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.769.619,00	188.44/07/BAKUDA/2023	10 Januari 2023
2	Triwulan IV Tahun 2022	1.892.402.929,00	1.664.381.553,00	115.974.406,00	5.743.199.284,00	0,00	188.44/19/BAKUDA/2023	14 Maret 2023
3	Triwulan I Tahun 2023	2.070.005.576,00	1.718.267.307,00	128.304.588,00	5.921.244.731,00	0,00	188.44/30/BAKUDA/2023	21 Juni 2023
4	Triwulan I Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.150.957,00	188.44/24/BAKUDA/2023	18 April 2023
5	Desember Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.374.287,00	188.44/24/BAKUDA/2023	18 April 2023
6	Triwulan II Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.519.229,00	188.44/35/BAKUDA/2023	17 Juli 2023
7	Triwulan II Tahun 2023	2.053.576.189,00	1.444.614.560,00	134.477.259,00	6.016.735.735,00	0,00	188.44/40/BAKUDA/2023	11 September 2023
8	Triwulan III Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.284.392,00	188.44/50/BAKUDA/2023	26 Oktober 2023
9	Triwulan III Tahun 2023	2.070.035.576,00	1.555.557.558,00	135.308.560,00	0,00	0,00	188.44/62/BAKUDA/2023	28 Nopember 2023
10	Triwulan III Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	6.597.660.394,00	0,00	188.44/63/BAKUDA/2023	28 Nopember 2023
11	Overtarget Tahun 2022	1.929.675.041,00	4.657.177.506,00	102.529.961,00	3.962.228.146,00	0,00	188.44/54/BAKUDA/2023	01 Nopember 2023
12	Triwulan IV Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.230.839,00	188.44/67/BAKUDA/2023	21 Desember 2023
<b>Total</b>		<b>10.015.695.311,00</b>	<b>11.039.998.484,00</b>	<b>616.594.774,00</b>	<b>28.241.068.290,00</b>	<b>13.131.329.323,00</b>		

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya berupa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
Bidang Paud/Tk, Non Formal	585.200.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Stunting Kelurahan	7.695.900	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Bantuan Satuan Pendidikan Non Formal	50.000.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Tutor, Pamong Belajar Dan Tenaga Kependidikan	72.000.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Pembangunan Stadion	14.999.970.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
Insentif Guru Madrasah Diniyah Taklimiyah	73.500.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Pemuka Adat Kecamatan/Kelurahan	330.000.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023
		188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Guru Honorer Sd/Smp	1.315.200.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Ustad/Ustadzah	1.421.625.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023,	2 Nopember 2023
Pemuka Agama Kecamatan/Kelurahan/Desa	875.997.100,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023
Dana Bantuan Spot Hall	15.799.970.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
<b>Total</b>	<b>35.531.158.000,00</b>		

### 1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp11.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.767.131.119,00 atau sebesar 96,78%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	500.000,00	452.000.000,00	90,40
1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	10.625.000.000,00	10.315.131.119,00	97,08
<b>Total</b>		<b>11.125.000.000,00</b>	<b>10.767.131.119,00</b>	<b>96,78</b>

### 1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Pada Tahun 2023 Belanja-LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp988.912.581.540,00 dan terealisasi sebesar Rp902.065.275.856,42 atau sebesar 91,22%. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja per Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	303.991.654.670,00	293.546.542.610,00	96,56
Dinas Kesehatan	215.252.628.356,00	196.656.211.416,42	91,36
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.690.166.930,00	114.353.099.778,00	90,98
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	21.838.499.570,00	19.758.150.882,00	90,47
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.611.297.500,00	10.193.088.364,00	96,06



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.789.744.000,00	4.465.923.205,00	93,24
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	10.259.890.500,00	9.366.791.326,00	91,30
Dinas Pertanian dan Pangan	16.888.059.530,00	15.521.917.860,00	91,91
Dinas Lingkungan Hidup	15.891.728.190,00	14.391.718.372,00	90,56
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.393.001.607,00	4.844.274.758,00	89,83
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.818.825.600,00	8.068.551.104,00	91,49
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.400.041.000,00	6.951.986.028,00	93,95
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	23.782.642.473,00	19.082.586.624,00	80,24
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.921.282.560,00	5.140.742.785,00	86,82
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.226.716.639,00	14.075.875.499,00	92,44
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.899.239.057,00	5.340.529.200,00	90,53
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.937.295.800,00	3.483.760.145,00	88,48
Sekretariat Daerah	42.197.813.280,00	38.696.971.516,00	91,70
Sekretariat DPRD	54.131.295.364,00	38.213.852.586,00	70,59
Kecamatan Muntok	13.104.955.150,00	11.241.495.624,00	85,78
Kecamatan Simpang Teritip	2.895.810.353,00	2.740.625.904,00	94,64
Kecamatan Jebus	3.781.955.700,00	3.667.385.349,00	96,97
Kecamatan Kelapa	5.608.452.120,00	5.271.086.262,00	93,98
Kecamatan Tempilang	2.892.646.000,00	2.779.149.432,00	96,08
Kecamatan Parittiga	3.319.676.700,00	3.177.369.687,00	95,71
Inspektorat Kabupaten	7.084.647.800,00	6.652.812.008,00	93,90
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.308.281.905,00	5.781.702.918,00	91,65
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.818.236.611,00	6.688.070.881,00	61,82
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.639.286.875,00	6.955.126.491,00	80,51
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.471.763.600,00	6.449.852.443,00	86,32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.065.046.100,00	18.508.024.799,00	97,08
<b>Total</b>	<b>988.912.581.540,00</b>	<b>902.065.275.856,42</b>	<b>91,22</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**1.2.1 Belanja Operasi**

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.2.1.1	Belanja Pegawai	369.302.167.723,00	349.617.465.878,00	340.559.407.327,00	9.058.058.551,00	2,66
1.2.1.2	Belanja Barang	384.712.061.158,00	340.820.573.704,49	315.990.239.015,36	24.830.334.689,13	7,86
1.2.1.3	Belanja Hibah	45.556.047.997,00	45.044.038.570,00	15.154.171.375,00	29.889.867.195,00	197,24
1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.977.430.000,00	3.649.180.236,00	8.003.955.521,00	(4.354.775.285,00)	54,41
<b>Total</b>		<b>803.547.706.878,00</b>	<b>739.131.258.388,49</b>	<b>679.707.773.238,36</b>	<b>59.423.485.150,13</b>	<b>8,74</b>

Tahun 2023 Belanja Operasi Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp803.547.706.878,00 dan terealisasi sebesar Rp739.131.258.388,49, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp679.707.773.238,36 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp59.423.485.150,13 atau sebesar 8,74%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi dari Belanja Hibah dan Belanja Barang.

**1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Belanja Pegawai BOS. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp369.302.167.723,00 dan terealisasi sebesar Rp349.617.465.878,00 atau sebesar 94,67% sedangkan di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp340.559.407.327,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp9.058.058.551,00 atau sebesar 2,66%.

Rincian Objek anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok ASN	139.768.683.271,00	135.532.130.844,00	96,97
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.737.088.476,00	13.246.474.557,00	96,43
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.027.252.775,00	4.754.790.000,00	94,58
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.579.703.620,00	10.299.662.647,00	97,35
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.818.365.525,00	1.333.510.000,00	73,34
Belanja Tunjangan Beras ASN	8.753.583.001,00	8.366.544.918,00	95,58



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	232.928.087,00	134.571.265,00	57,77
Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.223.218,00	2.109.265,00	6,16
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.258.919.424,00	14.484.496.225,00	94,92
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	346.856.681,00	279.587.063,00	80,61
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	915.666.209,00	838.758.134,00	91,6
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.634.890.765,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.223.563.052,00	31.065.932.018,00	93,51
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.782.261.625,00	20.192.365.875,00	92,7
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.052.126.400,00	6.560.656.140,00	93,03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.894.790.900,00	46.910.691.000,00	95,94
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	760.264.125,00	543.721.499,00	71,52
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	264.123.782,00	97.920.395,00	37,07
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.245.211.000,00	34.471.198.500,00	97,8
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	871.500.000,00	795.750.000,00	91,31
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.343.135.000,00	850.959.715,00	63,36
Belanja Honorarium	30.780.000,00	21.950.000,00	71,31
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	558.430.793,00	99,45
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	56.359.800,00	71,69
Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	64.598.640,00	74,33
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.817.000,00	99,35
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	809.665.500,00	99,44
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400,00	73.262.700,00	88,72



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	177.584.400,00	20.919.150,00	11,78
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.180.000.000,00	3.129.000.000,00	98,4
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	756.000.000,00	96
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000,00	145.544,00	5,2
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.330.435.600,00	2.314.193.448,00	69,49
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.608.000.000,00	4.340.190.000,00	94,19
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000,00	6.300.000,00	15,75
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.500.000,00	54.600.000,00	84,65
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000,00	2.940.000,00	30
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000,00	98.280.000,00	99,27
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000,00	3.041.640,00	28,97
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	1.121.824,00	22,44
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000,00	1.960,00	0,98
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	103.000.000,00	5.342.400,00	5,19
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000,00	112.320,00	5,62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000,00	336.960,00	16,85
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	211.607.694,00	151.204.069,00	71,45
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	101.603.093,00	28.476.705,00	28,03
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.960.000,00	99,99



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai BOS	5.717.040.000,00	5.709.785.365,00	99,87
<b>Total</b>	<b>369.302.167.723,00</b>	<b>349.617.465.878,00</b>	<b>94,67</b>

Rincian Belanja Pegawai tahun 2023 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	174.358.764.170,00	169.955.798.999,00	97,47
Dinas Kesehatan	78.002.960.600,00	73.791.989.598,00	94,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.386.621.812,00	4.071.557.465,00	92,82
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	3.472.119.750,00	3.088.995.225,00	88,97
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.428.746.500,00	3.308.496.049,00	96,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.105.459.000,00	1.943.176.773,00	92,29
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2.892.233.500,00	2.529.173.678,00	87,45
Dinas Pertanian dan Pangan	10.956.579.000,00	10.390.682.965,00	94,84
Dinas Lingkungan Hidup	2.836.962.400,00	2.697.462.405,00	95,08
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.746.700.000,00	2.437.285.526,00	88,74
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.554.721.100,00	2.322.913.682,00	90,93
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.243.272.000,00	2.212.103.488,00	98,61
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.119.271.250,00	2.660.714.726,00	85,30
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.276.893.500,00	2.857.612.127,00	87,20
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.244.189.000,00	2.861.785.605,00	88,21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.858.714.557,00	2.372.978.071,00	83,01
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.044.800.000,00	1.712.602.878,00	83,75
Sekretariat Daerah	11.176.621.700,00	10.066.345.320,00	90,07
Sekretariat DPRD	16.701.997.592,00	14.506.016.457,00	86,85
Kecamatan Muntok	4.504.033.900,00	3.914.556.744,00	86,91
Kecamatan Simpang Teritip	1.962.345.353,00	1.820.173.704,00	92,76
Kecamatan Jebus	2.610.994.900,00	2.504.824.349,00	95,93
Kecamatan Kelapa	2.878.811.220,00	2.736.143.533,00	95,04
Kecamatan Tempilang	1.936.841.000,00	1.840.643.370,00	95,03
Kecamatan Parittiga	1.891.446.700,00	1.797.685.837,00	95,04
Inspektorat Kabupaten	4.193.978.800,00	4.012.224.950,00	95,67



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.113.147.100,00	2.964.784.257,00	95,23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.515.131.000,00	3.319.186.111,00	94,43
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.850.104.319,00	3.948.398.187,00	81,41
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.492.806.000,00	3.086.440.303,00	88,37
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.944.900.000,00	1.884.713.496,00	96,91
<b>Total</b>	<b>369.302.167.723,00</b>	<b>349.617.465.878,00</b>	<b>94,67</b>

### 1.2.1.2 Belanja Barang

Akun Belanja Barang merupakan belanja operasional yang terdiri dari belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp384.712.061.158,00 dan terealisasi sebesar Rp340.820.573.704,49 atau sebesar 88,59%.

Rincian Belanja Barang per Objek Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Pakai Habis	61.564.252.649,00	52.148.743.078,00	84,71
Belanja Barang Tak Habis Pakai	98.961.000,00	66.625.000,00	67,32
Belanja Jasa Kantor	143.255.090.987,00	133.276.882.483,00	93,03
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.311.029.700,00	33.830.135.549,00	95,81
Belanja Sewa Tanah	95.550.000,00	89.250.000,00	93,41
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.197.520.260,00	5.080.039.215,00	81,97
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.520.620.600,00	1.907.829.856,00	75,69
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	233.604.000,00	222.546.000,00	95,27
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.882.548.803,00	2.914.611.839,00	75,07
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.561.609.000,00	1.611.345.325,00	62,90
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	56.000.000,00	24.000.000,00	42,86
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.266.049.400,00	1.501.077.332,00	66,24
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	485.967.556,00	316.435.658,00	65,11
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	39.499.688,00	29.445.700,00	74,55
Belanja Pemeliharaan Tanah	393.400.000,00	387.137.250,00	98,41



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.111.001.988,00	1.867.768.666,00	88,48
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.651.332.351,00	8.236.419.739,00	95,20
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.736.031.583,00	5.512.671.582,00	96,11
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.318.000,00	23.318.000,00	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.275.267.894,00	38.606.207.009,00	72,47
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.522.547.450,00	8.189.320.843,00	96,09
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.688.692.466,00	3.670.272.992,00	78,28
Belanja Barang dan Jasa BOS	19.126.364.133,00	18.965.028.440,00	99,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.614.801.650,00	22.343.462.148,49	94,62
<b>Total</b>	<b>384.712.061.158,00</b>	<b>340.820.573.704,49</b>	<b>88,59</b>

### 1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja berupa uang yang diberikan kepada penerima hibah, baik individu, kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah. Anggaran Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp45.556.047.997,00 dan terealisasi sebesar Rp45.044.038.570,00 atau 98,88%.

Rincian Belanja Hibah per Objek Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	642.964.000,00	642.964.000,00	100,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.358.074.000,00	6.973.151.660,00	94,77
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.913.831.200,00	13.808.320.200,00	99,24
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	709.921.178,00	614.909.650,00	86,62
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.028.734.650,00	8.859.966.850,00	98,13
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.150.000.000,00	9.150.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.307.737.969,00	3.549.941.210,00	107,32



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000,00	1.444.785.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>45.556.047.997,00</b>	<b>45.044.038.570,00</b>	<b>98,88</b>

#### 1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat maupun perorangan baik bantuan sosial yang tidak terencana maupun bantuan sosial terencana. Tahun 2023, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp3.977.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.649.180.236,00 atau 91,75%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Objek tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.232.850.000,00	3.223.850.000,00	99,72
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	544.380.000,00	316.130.236,00	58,07
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	200.200.000,00	109.200.000,00	54,55
<b>Total</b>	<b>3.977.430.000,00</b>	<b>3.649.180.236,00</b>	<b>91,75</b>

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 58,07% dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 54,55%, hal ini dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 terdaftar dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia periode Oktober-Desember tahun 2023.

#### 1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja investasi atau belanja yang menambah aset pemerintah daerah. Tahun 2023, anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp182.196.135.162,00 dan terealisasi sebesar Rp162.934.017.467,93 atau 89,43%.

Rincian Belanja Modal per Objek tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.357.947.316,00	31.054.707.102,86	93,10



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Rek	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	68.590.771.000,00	61.751.185.849,07	90,03
1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.018.630.372,00	65.901.977.241,00	90,25
1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.528.786.474,00	4.226.147.275,00	93,32
<b>Total</b>		182.196.135.162,00	162.934.017.467,93	89,43

Uraian Belanja Modal Tahun 2023 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	28.139.586.797,00	25.530.811.622,00	90,73
Dinas Kesehatan	25.827.046.800,00	20.706.669.616,93	80,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.694.810.800,00	90.627.589.296,00	90,91
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	4.759.898.070,00	4.684.306.150,00	98,41
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	58.400.000,00	8.400.000,00	14,38
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.300.000,00	149.491.500,00	91,54
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	168.500.000,00	167.025.000,00	99,12
Dinas Pertanian dan Pangan	842.980.000,00	834.815.000,00	99,03
Dinas Lingkungan Hidup	1.874.021.400,00	1.870.465.000,00	99,81
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.750.000,00	88.029.600,00	90,99
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	92.000.000,00	91.880.000,00	99,87
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	9.386.171.000,00	7.924.099.800,00	84,42
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102.383.560,00	101.700.000,00	99,33
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.859.326.400,00	2.822.303.977,00	98,71
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	677.738.300,00	664.948.106,00	98,11
Dinas Kelautan dan Perikanan	91.100.000,00	87.486.000,00	96,03
Sekretariat Daerah	2.228.125.000,00	1.951.750.000,00	87,60
Sekretariat DPRD	2.520.085.355,00	2.439.318.200,00	96,80
Kecamatan Muntok	1.572.827.600,00	1.226.428.600,00	77,98
Kecamatan Simpang Teritip	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Jebus	42.000.000,00	41.750.000,00	99,40
Kecamatan Kelapa	450.000.000,00	376.180.000,00	83,60
Kecamatan Tempilang	56.000.000,00	55.985.000,00	99,97
Kecamatan Parittiga	61.740.000,00	61.740.000,00	100,00
Inspektorat Kabupaten	94.500.000,00	93.900.000,00	99,37
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	158.000.000,00	153.995.000,00	97,47
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	61.000.000,00	57.400.000,00	94,10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.344.080,00	83.050.000,00	97,31
<b>Total</b>	<b>182.196.135.162,00</b>	<b>162.934.017.467,93</b>	<b>89,43</b>

Uraian realisasi jenis belanja modal tahun 2023 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	9.090.029.440,00	13.351.370.115,00	0,00	3.089.412.067,00
Dinas Kesehatan	0,00	13.937.916.564,86	4.979.969.188,07	1.788.783.864,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	779.131.000,00	34.194.493.069,00	55.653.965.227,00	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	191.419.000,00	0,00	4.492.887.150,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	149.491.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	167.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	76.925.000,00	0,00	757.890.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.870.465.000,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	88.029.600,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	91.880.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	1.097.336.500,00	5.724.161.300,00	1.102.602.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	113.700.000,00	1.417.180.977,00	1.291.423.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	415.308.898,00	0,00	0,00	249.639.208,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	87.486.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	1.587.680.000,00	0,00	0,00	364.070.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	192.316.000,00	1.716.650.200,00	7.326.000,00	523.026.000,00
Kecamatan Muntok	0,00	378.147.600,00	252.561.000,00	595.720.000,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	41.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	50.000.000,00	114.800.000,00	211.380.000,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	55.985.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Kecamatan Parittiga	0,00	61.740.000,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	93.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	153.995.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	57.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	83.050.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.054.707.102,86</b>	<b>61.751.185.849,07</b>	<b>65.901.977.241,00</b>	<b>4.226.147.275,00</b>

### 1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tak Terduga dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Belanja Tak Terduga Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.168.739.500,00 namun tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan tidak ada kejadian tidak terduga akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tak Terduga	3.168.739.500,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.168.739.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**1.3 Transfer**

**1.3.1 Bagi Hasil ke Desa**

Bagi Hasil ke Desa merupakan belanja bagi hasil pajak dan belanja bagi hasil retribusi yang dihitung berdasarkan penerimaan pajak/retribusi di desa. Bagi Hasil ke Desa direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat tahun Anggaran 2023. Tahun 2023 Bagi Hasil ke Desa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp3.728.428.750,00 dan terealisasi sebesar Rp3.728.428.749,00 atau 100,00%.

Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil ke Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.915.678.750,00	2.915.678.750,00	100,00
1.3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	812.750.000,00	812.749.999,00	100,00
<b>Total</b>		<b>3.728.428.750,00</b>	<b>3.728.428.749,00</b>	<b>100,00</b>

Rincian Realisasi Bagi Hasil ke Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
1	Air Putih	Muntok	189.985.920,00
2	Air Belo	Muntok	69.616.232,00
3	Belo Laut	Muntok	174.912.049,00
4	Air Limau	Muntok	63.103.892,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	79.105.441,00
6	Kundi	Simpang Teritip	49.749.366,00
7	Mayang	Simpang Teritip	66.574.689,00
8	Peradong	Simpang Teritip	48.377.825,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	47.296.816,00
10	Berang	Simpang Teritip	64.440.669,00
11	Rambat	Simpang Teritip	46.032.358,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	47.373.286,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	51.832.893,00
14	Ibul	Simpang Teritip	52.920.519,00
15	Pangek	Simpang Teritip	53.012.429,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	44.035.008,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	52.636.156,00
18	Jebus	Jebus	86.618.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
19	Sungai Buluh	Jebus	56.957.158,00
20	Tumbak Petar	Jebus	52.947.222,00
21	Limbung	Jebus	40.636.326,00
22	Rukam	Jebus	52.803.356,00
23	Ranggi Asam	Jebus	55.771.390,00
24	Ketap	Jebus	56.977.454,00
25	Mislak	Jebus	47.429.493,00
26	Pebuar	Jebus	46.449.259,00
27	Sinar Manik	Jebus	60.189.914,00
28	Air Kuang	Jebus	54.387.295,00
29	Mancung	Kelapa	45.456.771,00
30	Kayu Arang	Kelapa	45.269.358,00
31	Pusuk	Kelapa	45.616.556,00
32	Dendang	Kelapa	59.845.602,00
33	Kacung	Kelapa	56.069.270,00
34	Sinar Sari	Kelapa	45.757.152,00
35	Beruas	Kelapa	50.679.864,00
36	Tebing	Kelapa	47.882.943,00
37	Terentang	Kelapa	48.546.259,00
38	Tuik	Kelapa	40.954.427,00
39	Tugang	Kelapa	42.899.623,00
40	Air Bulin	Kelapa	51.816.380,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	46.304.086,00
42	Tempilang	Tempilang	74.540.048,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	50.264.570,00
44	Sangku	Tempilang	82.957.303,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	51.988.514,00
46	Penyampak	Tempilang	51.378.553,00
47	Benteng Kota	Tempilang	76.485.027,00
48	Air Lintang	Tempilang	72.762.929,00
49	Sinar Surya	Tempilang	50.960.132,00
50	Simpang Yul	Tempilang	47.260.741,00
51	Sekar Biru	Parittiga	87.722.458,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
52	Telak	Parittiga	48.198.223,00
53	Cupat	Parittiga	58.132.379,00
54	Bakit	Parittiga	55.973.046,00
55	Puput	Parittiga	215.447.083,00
56	Air Gantang	Parittiga	54.771.966,00
57	Kelabat	Parittiga	59.700.402,00
58	Kapit	Parittiga	45.948.168,00
59	Semulut	Parittiga	52.550.890,00
60	Teluk Limau	Parittiga	52.114.737,00
<b>Total</b>			<b>3.728.428.749,00</b>

### 1.3.2 Transfer ke Desa

Transfer Ke Desa merupakan Transfer Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Insentif Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Transfer Ke Desa tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp113.918.713.400,00 dan terealisasi sebesar Rp113.918.625.488,00 atau sebesar 99,99% yang diberikan kepada 60 (enam puluh) desa di Kabupaten Bangka Barat.

Transfer Ke Desa bertujuan untuk menunjang pembiayaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Rincian Transfer Ke Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	111.928.713.400,00	111.928.713.488,00	100,00
Insentif Badan Permusyawaratan Desa	1.990.000.000,00	1.989.912.000,00	99,99
<b>Total</b>	<b>113.918.713.400,00</b>	<b>113.918.625.488,00</b>	<b>99,99</b>

#### 1.3.2.1 Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp111.928.713.400,00 dan terealisasi sebesar Rp111.928.713.488,00 yang diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa pada 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	949.932.067,00
2	Air Belo	Muntok	1.089.960.188,00
3	Belo Laut	Muntok	2.163.552.404,00
4	Air Limau	Muntok	891.999.393,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	918.152.942,00
6	Kundi	Simpang Teritip	935.803.281,00
7	Mayang	Simpang Teritip	1.099.907.345,00
8	Peradong	Simpang Teritip	972.157.125,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	1.133.892.009,00
10	Berang	Simpang Teritip	1.309.926.017,00
11	Rambat	Simpang Teritip	785.869.471,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	809.458.411,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	1.047.012.224,00
14	Ibul	Simpang Teritip	1.067.376.412,00
15	Pangek	Simpang Teritip	893.359.256,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	810.664.907,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	973.531.244,00
18	Jebus	Jebus	914.663.247,00
19	Sungai Buluh	Jebus	822.044.934,00
20	Tumbak Petar	Jebus	939.078.310,00
21	Limbung	Jebus	792.252.875,00
22	Rukam	Jebus	868.818.823,00
23	Ranggi Asam	Jebus	962.411.391,00
24	Ketap	Jebus	898.521.226,00
25	Mislak	Jebus	866.890.109,00
26	Pebuar	Jebus	754.581.093,00
27	Sinar Manik	Jebus	846.036.757,00
28	Air Kuang	Jebus	815.475.333,00
29	Mancung	Kelapa	825.768.204,00
30	Kayu Arang	Kelapa	881.253.067,00
31	Pusuk	Kelapa	857.104.609,00
32	Dendang	Kelapa	1.222.714.276,00
33	Kacung	Kelapa	958.426.169,00
34	Sinar Sari	Kelapa	804.258.967,00
35	Beruas	Kelapa	845.768.955,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
36	Tebing	Kelapa	805.235.290,00
37	Terentang	Kelapa	935.912.940,00
38	Tuik	Kelapa	743.110.767,00
39	Tugang	Kelapa	1.141.772.452,00
40	Air Bulin	Kelapa	880.954.570,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	925.689.179,00
42	Tempilang	Tempilang	997.615.319,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.111.402.334,00
44	Sangku	Tempilang	936.278.574,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	891.394.868,00
46	Penyampak	Tempilang	942.492.946,00
47	Benteng Kota	Tempilang	955.790.677,00
48	Air Lintang	Tempilang	985.215.705,00
49	Sinar Surya	Tempilang	896.344.830,00
50	Simpang Yul	Tempilang	980.591.976,00
51	Sekar Biru	Parittiga	1.041.192.969,00
52	Telak	Parittiga	819.842.970,00
53	Cupat	Parittiga	1.093.959.442,00
54	Bakit	Parittiga	841.164.420,00
55	Puput	Parittiga	1.031.511.925,00
56	Air Gantang	Parittiga	1.089.923.480,00
57	Kelabat	Parittiga	974.153.824,00
58	Kapit	Parittiga	834.876.741,00
59	Semulut	Parittiga	888.389.338,00
60	Teluk Limau	Parittiga	1.020.550.911,00
<b>Total</b>			<b>57.493.991.488,00</b>

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Rincian Dana Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	902.824.000,00
2	Air Belo	Muntok	1.033.076.000,00
3	Belo Laut	Muntok	1.603.429.000,00
4	Air Limau	Muntok	805.715.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
5	Pelangas	Simpang Teritip	894.700.000,00
6	Kundi	Simpang Teritip	798.110.000,00
7	Mayang	Simpang Teritip	946.711.000,00
8	Peradong	Simpang Teritip	1.194.031.000,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	840.315.000,00
10	Berang	Simpang Teritip	867.267.000,00
11	Rambat	Simpang Teritip	887.987.000,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	839.607.000,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	855.930.000,00
14	Ibul	Simpang Teritip	1.014.922.000,00
15	Pangek	Simpang Teritip	768.406.000,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	1.201.111.000,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	902.988.000,00
18	Jebus	Jebus	1.114.017.000,00
19	Sungai Buluh	Jebus	779.288.000,00
20	Tumbak Petar	Jebus	777.529.000,00
21	Limbung	Jebus	770.057.000,00
22	Rukam	Jebus	763.241.000,00
23	Ranggi Asam	Jebus	857.624.000,00
24	Ketap	Jebus	871.068.000,00
25	Mislak	Jebus	777.685.000,00
26	Pebuar	Jebus	707.490.000,00
27	Sinar Manik	Jebus	737.506.000,00
28	Air Kuang	Jebus	903.634.000,00
29	Mancung	Kelapa	981.961.000,00
30	Kayu Arang	Kelapa	773.014.000,00
31	Pusuk	Kelapa	773.403.000,00
32	Dendang	Kelapa	1.102.589.000,00
33	Kacung	Kelapa	1.197.267.000,00
34	Sinar Sari	Kelapa	995.628.000,00
35	Beruas	Kelapa	797.156.000,00
36	Tebing	Kelapa	1.102.081.000,00
37	Terentang	Kelapa	832.188.000,00
38	Tuik	Kelapa	738.182.000,00
39	Tugang	Kelapa	1.006.821.000,00
40	Air Bulin	Kelapa	788.103.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
41	Pangkal Beras	Kelapa	1.061.774.000,00
42	Tempilang	Tempilang	876.276.000,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.009.317.000,00
44	Sangku	Tempilang	802.876.000,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	829.096.000,00
46	Penyampak	Tempilang	936.380.000,00
47	Benteng Kota	Tempilang	1.261.585.000,00
48	Air Lintang	Tempilang	827.508.000,00
49	Sinar Surya	Tempilang	829.239.000,00
50	Simpang Yul	Tempilang	869.488.000,00
51	Sekar Biru	Parittiga	786.461.000,00
52	Telak	Parittiga	762.352.000,00
53	Cupat	Parittiga	877.737.000,00
54	Bakit	Parittiga	778.213.000,00
55	Puput	Parittiga	1.006.567.000,00
56	Air Gantang	Parittiga	968.869.000,00
57	Kelabat	Parittiga	985.505.000,00
58	Kapit	Parittiga	758.058.000,00
59	Semulut	Parittiga	796.044.000,00
60	Teluk Limau	Parittiga	906.716.000,00
<b>Total</b>			<b>54.434.722.000,00</b>

### 1.3.2.2 Insentif Badan Permusyawaratan Desa

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.990.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.989.912.000,00 atau sebesar 99,99%. Penyaluran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/26/DINSOSPMD/2023 Tanggal 23 Januari 2023 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Untuk Dana Tambahan Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023.

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	27.042.000,00
2	Air Belo	35.586.000,00
3	Belo Laut	44.130.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Realisasi (Rp)
4	Air Limau	27.042.000,00
5	Pelangas	35.586.000,00
6	Kundi	35.586.000,00
7	Mayang	27.042.000,00
8	Peradong	27.042.000,00
9	Air Nyatoh	35.586.000,00
10	Berang	44.130.000,00
11	Rambat	27.042.000,00
12	Simpang Gong	27.042.000,00
13	Simpang Tiga	35.586.000,00
14	Ibul	35.586.000,00
15	Pangek	35.586.000,00
16	Bukit Terak	27.042.000,00
17	Air Menduyung	27.042.000,00
18	Jebus	27.042.000,00
19	Sungai Buluh	27.042.000,00
20	Tumbak Petar	35.586.000,00
21	Limbung	27.042.000,00
22	Rukam	27.042.000,00
23	Ranggi Asam	35.586.000,00
24	Ketap	27.042.000,00
25	Mislak	27.042.000,00
26	Pebuar	27.042.000,00
27	Sinar Manik	27.042.000,00
28	Air Kuang	27.042.000,00
29	Mancung	27.042.000,00
30	Kayu Arang	27.042.000,00
31	Pusuk	35.586.000,00
32	Dendang	44.130.000,00
33	Kacung	35.586.000,00
34	Sinar Sari	27.042.000,00
35	Beruas	27.042.000,00
36	Tebing	27.042.000,00
37	Terentang	35.586.000,00
38	Tuik	27.042.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Desa	Realisasi (Rp)
39	Tugang	35.586.000,00
40	Air Bulin	27.042.000,00
41	Pangkal Beras	27.042.000,00
42	Tempilang	44.130.000,00
43	Tanjung Niur	44.130.000,00
44	Sangku	35.586.000,00
45	Buyan Kelumbi	27.042.000,00
46	Penyampak	35.586.000,00
47	Benteng Kota	44.130.000,00
48	Air Lintang	44.130.000,00
49	Sinar Surya	35.586.000,00
50	Simpang Yul	35.586.000,00
51	Sekar Biru	44.130.000,00
52	Telak	27.042.000,00
53	Cupat	44.130.000,00
54	Bakit	27.042.000,00
55	Puput	44.130.000,00
56	Air Gantang	44.130.000,00
57	Kelabat	35.586.000,00
58	Kapit	27.042.000,00
59	Semulut	35.586.000,00
60	Teluk Limau	44.130.000,00
<b>Total</b>		<b>1.989.912.000,00</b>

### 1.3.3 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak menganggarkan Transfer Antar Daerah.

### 1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

#### 1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan kembali pinjaman daerah.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Penggunaan Silpa	107.191.801.770,00	107.191.801.770,71	14.346.688.380,61	92.845.113.390,10	647,15
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	100.000.000,00	6.800.000,00	36.676.250,00	(29.876.250,00)	81,46
<b>Total</b>	<b>107.291.801.770,00</b>	<b>107.198.601.770,71</b>	<b>14.383.364.630,61</b>	<b>92.815.237.140,10</b>	<b>645,30</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Realisasi Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp107.191.801.770,71 terdiri dari Penggunaan Silpa Kas di Kas Daerah sebesar Rp 93.149.349.623,97, Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp52.662.284,00, silpa Dana JKN sebesar Rp9.290.072,00, silpa Dana BLUD sebesar Rp13.942.695.718,74 dan silpa Kas Lainnya di Sekolah sebesar Rp37.804.072,00. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah merupakan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman perkuatan modal UMKM, pinjaman kelompok nelayan dan Koperasi serta penerimaan atas pinjaman kepada Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR).

#### 1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 tidak dianggarkan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

#### 1.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Merupakan penjumlahan surplus/defisit dengan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Pembiayaan Neto). Anggaran dan Realisasi SiLPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Netto	107.291.801.770,00	107.198.601.770,71	99,91
Surplus/(Defisit)	(107.291.801.770,00)	(50.635.629.757,01)	47,19
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.562.972.013,70</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 dan tahun 2022 adalah dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	107.191.801.770,71	14.346.688.380,61
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan(2)	107.191.801.770,71	14.346.688.380,61
<b>Sub Total (3) = (1) – (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4)	56.562.972.013,70	107.191.801.770,71
<b>Sub Total (5) = (3) +(4)</b>	<b>56.562.972.013,70</b>	<b>107.191.801.770,71</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	0,00	0,00
Lain-Lain (7)	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5) + (6) + (7)</b>	<b>56.562.972.013,70</b>	<b>107.191.801.770,71</b>

1. SAL Awal adalah akumulasi saldo yang berasal dari SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SILPA tahun berjalan ditambah/dikurangi dengan penyesuaian lainnya yang diperkenankan. SAL Awal tahun 2023 adalah sebesar Rp107.191.801.770,71 merupakan SAL Akhir per 31 Desember 2022. Saldo Anggaran Lebih awal meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2023, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp107.191.801.770,71.
3. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2023 sebesar Rp56.562.972.013,70.
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan koreksi pada tahun berjalan yang terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.
5. Lain-Lain adalah penyesuaian penggunaan Silpa tahun lalu. Tidak terdapat penyesuaian Silpa tahun lalu.
6. SAL Akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp56.562.972.013,70 mengalami penurunan sebesar Rp 56.562.972.013,70 dibandingkan SAL Akhir Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

2022 sebesar Rp107.191.801.770,71 atau sebesar 47,23%. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.

Saldo anggaran lebih awal dan saldo anggaran lebih akhir yang disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah saldo anggaran lebih APBD, saldo anggaran lebih JKN, saldo anggaran lebih Kas Lainnya di Sekolah dan saldo anggaran lebih BLUD. Pada tahun 2023, Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp56.562.971.553,70, sedangkan pada tahun 2022 Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp107.191.801.770,71.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

**3.1 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**3.1.1 Aset Lancar**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

**3.1.1.1 Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

**3.1.1.1.2 Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah merupakan aset lancar pemerintah daerah baik berupa giro maupun deposito. Total rekening giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.464.892.787,89.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dalam bentuk rekening giro adalah sebagai berikut :

Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
162.30.00001	BPD Sumsel Babel	6.572.857.007,71	8.487.352.514,83
162.30.00009	BPD Sumsel Babel	20.118.541.496,81	38.844.354.404,81
162.30.00015	BPD Sumsel Babel	14.273.373.793,48	43.665.139.956,48
162.30.00016	BPD Sumsel Babel	64.541.460,00	179.594.864,00
162.30.00017	BPD Sumsel Babel	4.432.474,00	55.027,00
162.30.00018	BPD Sumsel Babel	244.250.854,50	500.336.795,50
162.30.00019	BPD Sumsel Babel	437.682.529,50	138.376.018,50
162.30.00020	BPD Sumsel Babel	65.635.971,50	266.060.600,50



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
162.30.00021	BPD Sumsel Babel	861.204.186,00	244.877.286,00
162.30.00022	BPD Sumsel Babel	170.171.604,00	728.441.180,00
162.30.00023	BPD Sumsel Babel	85.772.037,00	0,00
162.30.00024	BPD Sumsel Babel	260.871.550,00	0,00
333.533.3799	PT. Bank Nasional Indonesia	207.886.714,00	82.557.196,00
2090.01.000.313.303	PT. Bank Rakyat Indonesia	3.767.719,00	821.165,00
1690.000.280.9330	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	93.903.390,39	11.437.642,35
<b>Total</b>		<b>43.464.892.787,89</b>	<b>93.149.404.650,97</b>

**Keterangan:**

- ❖ Rek No.162.30.00001 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyeteroran sisa kas dan pendapatan transfer dari provinsi.
- ❖ Rek No.162.30.00009 dipergunakan sebagai rekening penerimaan transfer pusat.
- ❖ Rek No.162.30.00015 dipergunakan sebagai rekening pengeluaran/belanja.
- ❖ Rek No.162.30.00016 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.162.30.00017 dipergunakan sebagai rekening penerimaan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- ❖ Rek No.162.30.00018 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Restoran.
- ❖ Rek No.162.30.00019 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Reklame.
- ❖ Rek No.162.30.00020 dipergunakan sebagai rekening Pajak Mineral bukan logam dan Batuan.
- ❖ Rek No.162.30.00021 dipergunakan sebagai rekening Pajak BPHTB.
- ❖ Rek No.162.30.00022 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Retribusi.
- ❖ Rek No.162.30.00023 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Air Tanah.
- ❖ Rek No.162.30.00024 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.
- ❖ Rek No. 333.533.3799 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.2090.01.000.313.303 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No. 169.000.280.9330 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai kas daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/107/BPKAD/2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/12/4.4.1.1/2020 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/9.A/BPKAD/2022 tentang Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/301/BPKAD/2021 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/239.C/BPKAD/2021 tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

### 3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk belanja. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	Nomor Rekening	Bank
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	162-30-10066	BPD Sumsel Babel
Dinas Kesehatan	162-30-10011	BPD Sumsel Babel
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162-30-10069	BPD Sumsel Babel
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	162-30-10063	BPD Sumsel Babel
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162-31-000020	BPD Sumsel Babel
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	162-31-000019	BPD Sumsel Babel
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	162-30-10068	BPD Sumsel Babel
Dinas Pertanian dan Pangan	162-30-10071	BPD Sumsel Babel
Dinas Lingkungan Hidup	162-30-10073	BPD Sumsel Babel
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162-30-10022	BPD Sumsel Babel
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	162-30-10075	BPD Sumsel Babel
Dinas Komunikasi dan Informatika	162-30-10061	BPD Sumsel Babel
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	162-30-10074	BPD Sumsel Babel
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162-30-10076	BPD Sumsel Babel
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	162-30-10072	BPD Sumsel Babel
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	162-30-10065	BPD Sumsel Babel
Dinas Kelautan dan Perikanan	162-30-10017	BPD Sumsel Babel
DPRD	162-30-10021	BPD Sumsel Babel
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	162-30-00003	BPD Sumsel Babel
Sekretariat Daerah	162-30-10004	BPD Sumsel Babel



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nomor Rekening	Bank
Sekretariat DPRD	162-30-10021	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Muntok	162-30-10005	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Simpang Teritip	162-30-10006	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Jebus	162-30-10008	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Kelapa	162-30-10003	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Tempilang	162-30-10020	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Parittiga	162-30-10052	BPD Sumsel Babel
Inspektorat Kabupaten	162-30-10015	BPD Sumsel Babel
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	162-30-10062	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	162-30-10064	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	162-30-10060	BPD Sumsel Babel
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	162-31-000018	BPD Sumsel Babel
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	162-30-10067	BPD Sumsel Babel

Rekening Bendahara Pengeluaran OPD tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/138.A/BPKAD/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/14/4.4.1.1/2020 Tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Mei 2023.

Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo di Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### 3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan OPD atas penerimaan pajak dan retribusi. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo di Kas Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### 3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan saldo kas pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2023 dan Saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK). Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.462.257.108,00 terdiri dari saldo pajak yang belum disetor sebesar Rp565.000,00 dan saldo BOK Puskesmas sebesar Rp2.461.692.108,00 pada Dinas Kesehatan.

Berikut uraian saldo BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2023 (Rp)
Puskesmas Mentok	1590070293	BNI	438.317.152,00
Puskesmas Kundi	1590070260	BNI	86.607.858,00
Puskesmas Sp.Teritip	1590070282	BNI	424.602.092,00
Puskesmas Kelapa	1590070317	BNI	329.083.837,00
Puskesmas Tempilang	1590070306	BNI	432.507.012,00
Puskesmas Jebus	1590070271	BNI	258.128.253,00
Puskesmas Puput	1590070259	BNI	310.440.664,00
Puskesmas Sekar Biru	1590070248	BNI	182.005.240,00
<b>Total</b>			<b>2.461.692.108,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 8 (delapan) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan merupakan selisih antara pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun berjalan ditambah dengan saldo awal tahun. Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp206.776.381,00 dengan rincian sebagai berikut :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Puskesmas Muntok	2090-01-000077-30-5	BRI	142.370.497,00	1.219,00
Puskesmas Kundi	2090-01-000080-30-8	BRI	5.131,00	11.066,00
Puskesmas Sp.Teritip	2090-01-000083-30-6	BRI	5.002.196,00	55.533,00
Puskesmas Kelapa	2090-01-000079-30-3	BRI	707,00	0,00
Puskesmas Tempilang	2090-01-000078-30-1	BRI	21.902.728,00	34.053,00
Puskesmas Jebus	2090-01-000124-30-6	BRI	0,00	6.645,00
Puskesmas Puput	2090-01-000081-30-4	BRI	22.670.602,00	187,00
Puskesmas Sekar Biru	2090-01-000125-30-2	BRI	14.824.520,00	9.181.369,00
<b>Total</b>			<b>206.776.381,00</b>	<b>9.290.072,00</b>

Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/311.B/1.20.13/2014 tentang Rekening Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**3.1.1.1.6 Kas Lainnya di Sekolah**

Kas Lainnya di Sekolah merupakan saldo Kas BOS APBN di sekolah negeri tingkat dasar (SD dan SMP) di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kas Lainnya di Sekolah tahun 2023 sebesar Rp140.827.342,00. Rekening Kas Lainnya di Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/346/BPKAD/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/289/BPKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian Saldo Kas Lainnya di Sekolah dapat dilihat pada Lampiran 1.

**3.1.1.1.7 Kas di BLUD**

Kas di BLUD merupakan kas yang berada BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Rekening Kas di BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/346/RSUD.01/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Muntok, Keputusan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/419/1.02.02/2016 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/318/RSUD.01/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muntok.

Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.292.430.076,81 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo tunai di Bendahara Penerimaan BLUD	129.069.100,00	2.345.950,00
Saldo tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD	47.324.815,71	6.136.445,53
<b>Sub Total</b>	<b>176.393.915,71</b>	<b>8.482.395,53</b>
Saldo Rekening Bank pada Bank Sumsel Babel di Bendahara Penerimaan BLUD	1.012.971.640,24	2.640.986.372,24
Saldo Rekening Bank pada Bank Mandiri di Bendahara Penerimaan BLUD	7.913.152.291,29	10.498.882.181,66
Saldo Rekening Bank pada Bank Sumsel Babel di Bendahara Pengeluaran BLUD	340.608.068,46	741.242.620,46
Saldo Rekening Bank pada Bank Mandiri di Bendahara Pengeluaran BLUD	849.304.161,11	53.102.148,85
<b>Sub Total</b>	<b>10.116.036.161,10</b>	<b>13.934.213.323,21</b>
<b>Total</b>	<b>10.292.430.076,81</b>	<b>13.942.695.718,74</b>

#### 3.1.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

#### 3.1.1.2 Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau yang dipersamakan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik di Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah atau yang sudah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Selain itu tidak terdapat jaminan atau sita jaminan terkait piutang.

##### Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya. Piutang diakui ketika telah diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

sah misalnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau pun surat perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban yang jelas.

#### Pengukuran Piutang

Piutang disajikan senilai yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang. Penyisihan piutang adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

#### 3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak. Piutang pajak diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) atau pun surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB), baik untuk jenis pajak yang ditetapkan dengan *Official Assesment* maupun untuk jenis pajak dengan *Self Assesment*. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00
Pajak Restoran	7.098.475,00	0,00
Pajak Reklame	88.425.048,25	67.004.785,75
Pajak Hiburan	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	50.527.250,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	0,00
Pajak Air Tanah	14.536.242,00	6.869.116,00
Pajak Bumi dan Bangunan	11.664.385.592,00	9.867.127.538,00
BPHTB	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>11.828.972.607,25</b>	<b>9.944.001.439,75</b>

Uraian mutasi Piutang Pajak sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Piutang			Koreksi pencatatan Piutang tahun lalu (Rp)	Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 (Rp)
		Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2022 yang terealisasi di 2023 (Rp)	Piutang 2023 atas penerbitan SKP-D 2023 (Rp)	Penghapusan Piutang di tahun 2023 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=2- 3+4 +5+ 6
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	7.098.475,00	0,00	0,00	7.098.475,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Jenis Pajak	Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2022	Mutasi Piutang			Koreksi pencatatan Piutang tahun lalu	Piutang sampai dengan 31 Desember 2023
		Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2022 yang terealisasi di 2023	Piutang 2023 atas penerbitan SKP-D 2023	Penghapusan Piutang di tahun 2023		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pajak Reklame	67.004.785,75	27.931.312,50	50.261.575,00		(910.000,00)	88.425.048,25
Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	0,00	0,00	50.527.250,00	0,00	0,00	50.527.250,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Pajak Air Tanah	6.869.116,00	1.650.906,00	9.318.032,00	0,00	0,00	14.536.242,00
Pajak Bumi dan Bangunan	9.867.127.538,00	437.019.591,00	2.234.277.645,00	0,00	0,00	11.664.385.592,00
BPHTB	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>9.944.001.439,75</b>	<b>466.601.809,50</b>	<b>2.352.482.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(910.000,00)</b>	<b>11.828.972.607,25</b>

### 3.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih (untuk jenis pajak selain PBB) ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang Pajak	Umur Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Pajak
1.	Lancar	< 1 Tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	3 – 5 Tahun	50%
4.	Macet	> 5 Tahun	100%

Sedangkan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk PBB ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang PBB	Umur Piutang PBB	Persentase Penyisihan Piutang PBB
1.	Lancar	Sampai dengan 1 Tahun	5%
2.	Kurang Lancar	> 1 Tahun – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	> 3 Tahun – 5 Tahun	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 Tahun	100%

Penyisihan piutang pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.167.738.434,94 dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Jenis Pajak	Nilai Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00
Pajak Restoran	7.098.475,00	35.492,38
Pajak Reklame	88.425.048,25	16.201.569,65
Pajak Hiburan	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	50.527.250,00	252.636,25
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	5.000,00
Pajak Air Tanah	14.536.242,00	881.295,16
Pajak Bumi dan Bangunan	11.664.385.592,00	6.147.362.441,50
BPHTB	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>11.828.972.607,25</b>	<b>6.167.738.434,94</b>

Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang s.d Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Penyisihan Piutang			Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang di Tahun 2023 (Rp)	Penghapusan Penyisihan Piutang atas Penghapusan Piutang (Rp)	Koreksi catat Penyisihan Piutang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=(2)- (3+4) + (5) + (6)
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	35.492,38	35.492,38
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	10.043.250,87	150.462,81	0,00	(91.000,00)	6.399.781,59	16.201.569,65
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	252.636,25	252.636,25
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Pajak Air Tanah	253.655,53	8.254,53	0,00	0,00	635.894,16	881.295,16
Pajak Bumi dan Bangunan	5.595.422.852,20	92.248.888,80	0,00	0,00	644.188.478,10	6.147.362.441,50
BPHTB	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>5.605.719.758,60</b>	<b>92.407.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>651.517.282,48</b>	<b>6.167.738.434,94</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3.1.1.2.3 Piutang Pajak Netto**

Piutang Pajak Netto merupakan nilai piutang pajak dikurangi dengan penyisihan piutang pajak. Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.661.234.172,31 sebagai berikut :

Jenis Pajak	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak(Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=1-2</i>
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	7.098.475,00	35.492,38	7.062.982,62
Pajak Hiburan	88.425.048,25	16.201.569,65	72.223.478,60
Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
Pajak Galian C	50.527.250,00	252.636,25	50.274.613,75
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00
Pajak Air Tanah	14.536.242,00	881.295,16	13.654.946,84
Pajak Bumi dan Bangunan	11.664.385.592,00	6.147.362.441,50	5.517.023.150,50
BPHTB	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.828.972.607,25</b>	<b>6.167.738.434,94</b>	<b>5.661.234.172,31</b>

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada lampiran 2.

**3.1.1.2.4 Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

SKPD/OPD	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>66.088.450,00</b>	<b>30.540.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	66.088.450,00	30.540.000,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>257.406.631,00</b>	<b>261.318.422,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.341.131,00	55.252.922,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>323.765.081,00</b>	<b>292.128.422,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian mutasi Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

OPD Jenis Retribusi	Piutang Retribusi s.d Tahun 2022	Koreksi Catat (Rp)	SKRD Tahun 2023 Terutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	SKRD Terutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6=1-2+3-4</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.088.450,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	30.540.000,00	0,00	35.548.450,00	0,00	66.088.450,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>261.318.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.376,00</b>	<b>11.079.167,00</b>	<b>257.406.631,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	55.252.922,00	0,00	7.167.376,00	11.079.167,00	51.341.131,00
Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>292.128.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.715.826,00</b>	<b>11.079.167,00</b>	<b>323.765.081,00</b>

Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada lampiran 3.

### 3.1.1.2.5 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang retribusi tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.538.346,88 dengan rincian sebagai berikut :

SKPD/OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>66.088.450,00</b>	<b>31.993.255,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	66.088.450,00	31.993.255,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>257.406.631,00</b>	<b>250.275.091,88</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.341.131,00	44.209.591,88
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

SKPD/OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>323.765.081,00</b>	<b>282.538.346,88</b>

Berikut mutasi penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023:

Uraian	Penyisihan Piutang Retribusi s.d Tahun 2022	Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang Retribusi (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi (Rp)	Koreksi Catatan Penyisihan Piutang Retribusi (Rp) Tahun Sebelumnya	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=1-2+3+4</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993.255,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	27.300.000,00	0,00	4.693.255,00	0,00	31.993.255,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>232.165.745,86</b>	<b>55.395,84</b>	<b>18.164.741,86</b>	<b>0,00</b>	<b>250.275.091,88</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	26.100.245,86	55.395,84	18.164.741,86	0,00	44.209.591,88
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>259.735.745,86</b>	<b>55.395,84</b>	<b>22.857.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>282.538.346,88</b>

Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 4.

### 3.1.1.2.6 Piutang Retribusi Netto

Piutang Retribusi Netto merupakan nilai piutang retribusi dikurangi penyisihan piutang retribusi. Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.226.734,12 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 Rp	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 Rp	Piutang Retribusi Netto 2023 Rp
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00	0,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>66.088.450,00</b>	<b>31.993.255,00</b>	<b>34.095.195,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 Rp	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 Rp	Piutang Retribusi Netto 2023 Rp
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>
Retribusi Pasar Grosir	66.088.450,00	31.993.255,00	<b>34.095.195,00</b>
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>257.406.631,00</b>	<b>250.275.091,88</b>	<b>7.131.539,12</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.341.131,00	44.209.591,88	7.131.539,12
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00	<b>0,00</b>
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>323.765.081,00</b>	<b>282.538.346,88</b>	<b>41.226.734,12</b>

**3.1.1.2.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang Dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tahun 2023, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp5.966.951.097,57 yaitu Dividen atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung tahun buku 2023 berdasarkan surat dari Bank Sumsel Babel Nomor 383/DIR/III/B/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2023.

**3.1.1.2.8 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan seluruh Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan terealisasi tahun berikutnya.

**3.1.1.2.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto**

Dengan tidak dilakukannya penyisihan terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, maka Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp5.966.951.097,57.

**3.1.1.2.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan piutang yang terdapat pada BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 memiliki Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp4.425.593.556,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
BPJS	4.388.416.505,00	124.054.054,00
Ambulance BPJS	22.813.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
BPJS Ketenagakerjaan	10.913.051,00	0,00
Parsial RSBT	3.451.000,00	12.560.000,00
<b>Total</b>	<b>4.425.593.556,00</b>	<b>136.614.054,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp 4.425.593.556,00 disajikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi klaim yaitu :

- Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 4745/BA/III-02/1223 tanggal 19 Desember 2023
- Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 232/BA/III-02/0124 tanggal 26 Januari 2024
- Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor : 227/BA/III-02/0124 tanggal 26 Januari 2024

**3.1.1.2.11 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Tahun 2023 tidak dilakukan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

**3.1.1.2.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto merupakan selisih antara Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dengan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto tahun 2023 sebesar Rp4.425.593.556,00.

**3.1.1.2.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang masih akan diterima dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.

**3.1.1.2.14 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang belum diterima pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

**3.1.1.2.15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto merupakan selisih antara Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Netto.

**3.1.1.2.16 Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan hak yang masih akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 memiliki aset Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah diterbitkan keputusan Gubernur namun belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.917.558.580,00 lokasi Sementara Penerimaan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Periode	Nilai Rp	Nomor SK
1.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	5.968.543.899,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/21/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024
2.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	2.357.227.050,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/23/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024
3.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	1.448.310.955,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/23/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024
4.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	Triwulan IV	143.476.676,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/23/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024
<b>Total</b>			<b>9.917.558.580,00</b>	

Uraian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang per 31 Desember 2022 Rp	Pelunasan Piutang per 31 Desember 2022 pada tahun 2023 Rp	Piutang yang timbul pada tahun 2023 Rp	Piutang Per 31 Desember 2023 Rp
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.743.229.284,00	5.743.229.284,00	5.968.543.899,00	5.968.543.899,00
2.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.892.432.929,00	1.892.432.929,00	2.357.227.050,00	2.357.227.050,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.664.411.553,00	1.664.411.553,00	1.448.310.955,00	1.448.310.955,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang per 31 Desember 2022 Rp	Pelunasan Piutang per 31 Desember 2022 pada tahun 2023 Rp	Piutang yang timbul pada tahun 2023 Rp	Piutang Per 31 Desember 2023 Rp
4.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	115.977.306,00	115.977.306,00	143.476.676,00	143.476.676,00
5.	Bagi Hasil Pajak Penerimaan Rokok	2.073.769.619,00	2.073.769.619,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>11.489.820.691,00</b>	<b>11.489.820.691,00</b>	<b>9.917.558.580,00</b>	<b>9.917.558.580,00</b>

**3.1.1.2.17 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dikarenakan seluruh Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi akan terealisasi tahun berikutnya.

**3.1.1.2.18 Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto**

Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto merupakan selisih antara Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Dengan tidak dilakukannya penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi, maka Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu Rp9.917.558.580,00.

**3.1.1.2.19 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

**3.1.1.2.20 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat**

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa reklasifikasi dari Investasi non permanen yang sudah melewati batas jatuh tempo pengembaliannya.

Reklasifikasi investasi non permanen menjadi bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat dilakukan karena adanya tagihan angsuran dana bergulir yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Dana bergulir yang jatuh tempo dalam kurun waktu lima tahun diakui sebagai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Jenis Pinjaman	OPD Pengelola	Peraturan Bupati	Uraian
1	Fasilitasi pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan	DKP	Nomor 18 Tahun 2012 Tanggal 1 Mei 2012	Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 43 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 2 September 2015	Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan
2	Perkuatan Modal Koperasi KSP	DKUP	Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008	Pengelolaan Dana Bergulir
			Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 1 Juni 2009	Program Perkuatan Modal
			Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010	Program Perkuatan Modal
3	Fasilitasi Pengembangan UMKM	DKUP	Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten di Bangka Barat
			Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011	Fasilitasi Pengembangan UMKM Kabupaten Bangka Barat

**Pinjaman Dana Kelompok Nelayan Tahun Per 31 Desember 2023**

Tahun penyaluran	Uraian	Nilai penyaluran	Nilai pengembalian	Sisa yang belum dikembalikan
1	2	3	4	5
2012	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	805.959.000,00	700.102.083,00	105.856.917,00
2013	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	835.420.000,00	688.979.999,00	146.440.001,00
2014	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	825.000.000,00	478.731.000,00	346.269.000,00
2015	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	891.990.000,00	631.570.980,00	260.419.020,00
<b>Total</b>		<b>3.358.369.000,00</b>	<b>2.499.384.062,00</b>	<b>858.984.938,00</b>

**Pinjaman Dana Perkuatan Modal UKM per 31 Desember 2023**

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2009	UKM Tahun 2009	1.290.500.000,00	1.087.180.000,00	203.320.000,00
2011	UKM Tahun 2011	5.600.000.000,00	5.384.335.250,00	215.664.750,00
<b>Total</b>		<b>6.890.500.000,00</b>	<b>6.471.515.250,00</b>	<b>418.984.750,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi per 31 Desember 2023

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2007	Koperasi Tahun 2007	467.340.000,00	467.340.000,00	0,00
2008	Koperasi Tahun 2008	509.000.000,00	448.000.000,00	61.000.000,00
2009	Koperasi Tahun 2009	700.000.000,00	675.627.000,00	24.373.000,00
2010	Koperasi Tahun 2010	700.000.000,00	499.500.000,00	200.500.000,00
<b>Total</b>		<b>2.376.340.000,00</b>	<b>2.090.467.000,00</b>	<b>285.873.000,00</b>

Bagian lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.563.842.688,00 terdiri dari Pinjaman Dana Kelompok Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp858.984.938,00 dan Dana Perkuatan Modal UKM sebesar Rp418.984.750,00 dan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi sebesar Rp285.873.000,00.

Uraian mutasi Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah sebagai berikut :

OPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 Rp	Pelunasan Pinjaman di Tahun 2023 Rp	Reklas dari Investasi Non Permanen Rp	Saldo per 31 Desember 2023 Rp
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pinjaman Kelompok Nelayan	858.984.938,00	0,00	0,00	858.984.938,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dana Perkuatan Modal Koperasi dan Fasilitas UKM	711.657.750,00	6.800.000,00	0,00	704.857.750,00
<b>Total</b>		<b>1.570.642.688,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.842.688,00</b>

**3.1.1.2.21 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat**

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.563.842.688,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp
	1	2
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	105.856.917,00	105.856.917,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	260.419.020,00	260.419.020,00
<b>Sub Total 1</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>858.984.938,00</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>		
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	61.000.000,00	61.000.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	200.500.000,00	205.500.000,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2009	203.320.000,00	203.320.000,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2011	215.664.750,000	217.464.750,00
<b>Sub Total 2</b>	<b>704.857.750,00</b>	<b>711.657.750,00</b>
<b>Total 1 + 2</b>	<b>1.563.842.688,00</b>	<b>1.570.642.688,00</b>

Penyisihan terhadap bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat adalah sebesar 100% dari nilai bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu pelunasan selama 5 lima tahun.

### 3.1.1.2.22 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto adalah Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat dikurangi dengan Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat. Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto Rp
	1	2	3=1-2
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>			
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	105.856.917,00	105.856.917,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	260.419.020,00	260.419.020,00	0,00
<b>Sub Total 1</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto Rp
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>			
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	200.500.000,00	205.500.000,00	0,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2009	203.320.000,00	203.320.000,00	0,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2011	215.664.750,000	217.464.750,00	0,00
<b>Sub Total 2</b>	<b>704.857.750,000</b>	<b>711.657.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 1 + 2</b>	<b>1.563.842.688,00</b>	<b>1.570.642.688,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1.1.2.23 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah

Piutang lain-lain pendapatan yang sah merupakan hak yang masih akan diterima oleh entitas pelaporan dari entitas lainnya.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### 3.1.1.2.24 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah akan terealisasi tahun berikutnya. Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan terealisasi tahun berikutnya.

#### 3.1.1.2.25 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto

Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto merupakan selisih antara Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto.

#### 3.1.1.2.26 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu paling lama atau maksimal 1 (satu) tahun. Dengan demikian, persediaan berupa:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- b. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih dan penolong dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan, bibit tanaman, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- e. barang-barang untuk berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

#### Penilaian Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan persediaan (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dan dinilai berdasarkan biaya perolehan persediaan yang terakhir.

#### Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### Penatausahaan Persediaan

##### Rincian Persediaan

Persediaan untuk 31 Desember 2023 terdiri dari barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan, obat-obatan, alat kesehatan, bibit ikan dan barang persediaan lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Salah satu perolehan persediaan adalah pembelian yang bersumber dari dana APBD. Pembelian tersebut tidak serta merta diakui sebagai persediaan. Terdapat pembelian yang diakui sebagai belanja jasa dan/atau menjadi aset.

Belanja persediaan berdasarkan LRA merupakan belanja yang dicatat oleh PPK OPD berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi SIMDA Keuangan, sedangkan belanja persediaan yang dicatat dalam laporan persediaan merupakan belanja persediaan berdasarkan laporan Pengurus Barang.

Perbandingan Belanja Persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	8.401.921.315,00	1.973.122.292,00	6.428.799.023,00
2	Dinas Kesehatan	12.913.689.931,00	10.230.511.559,04	2.683.178.371,96
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	682.976.482,00	6.191.167.129,00	(5.508.190.647,00)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.581.604.206,00	1.046.648.750,00	534.955.456,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	380.184.050,00	228.257.250,00	151.926.800,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	462.080.251,00	252.781.784,00	209.298.467,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	655.700.300,00	206.144.000,00	449.556.300,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.103.734.621,00	905.814.471,00	197.920.150,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.422.925.840,00	1.895.594.680,00	527.331.160,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	395.327.450,00	304.714.450,00	90.613.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.223.144.411,00	513.678.650,00	709.465.761,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	519.079.300,00	167.309.650,00	351.769.650,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.078.970.050,00	174.712.250,00	904.257.800,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	484.328.000,00	210.884.000,00	273.444.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.145.444.418,00	435.494.592,00	709.949.826,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	319.672.586,00	183.025.431,00	136.647.155,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	357.311.500,00	202.052.900,00	155.258.600,00
18	Sekretariat Daerah	9.046.871.100,00	1.906.384.050,00	7.140.487.050,00
19	Sekretariat DPRD	2.969.891.000,00	562.444.725,00	2.407.446.275,00
20	Kecamatan Muntok	1.433.775.435,00	283.422.920,00	1.150.352.515,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	252.810.200,00	101.720.200,00	151.090.000,00
22	Kecamatan Jebus	272.433.000,00	121.241.000,00	151.192.000,00
23	Kecamatan Kelapa	535.172.150,00	319.868.850,00	215.303.300,00
24	Kecamatan Tempilang	250.822.900,00	98.238.150,00	152.584.750,00
25	Kecamatan Parittiga	260.170.000,00	131.520.000,00	128.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
26	Inspektorat Daerah	158.864.750,00	93.834.100,00	65.030.650,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	300.540.200,00	108.159.000,00	192.381.200,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	633.735.400,00	304.322.400,00	329.413.000,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	411.538.556,00	269.090.500,00	142.448.056,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	388.250.000,00	159.383.000,00	228.867.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.172.398.676,00	147.089.050,00	1.025.309.626,00
32	BLUD	7.877.290.626,72	7.851.301.791,80	25.988.834,92
<b>Jumlah</b>		<b>60.092.658.704,72</b>	<b>37.579.933.574,84</b>	<b>22.512.725.129,88</b>

Mutasi Belanja LRA ke Penerimaan Persediaan

<b>Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>60.092.658.704,72</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Hutang	295.810.915,08	
- Reklas dari beban pemeliharaan	255.094.600,00	
- Reklas dari Beban Hibah	5.113.212.660,00	
- Reklas dari Beban jasa	0,00	
- Pembulatan	210.694,04	
- Reklas dari Belanja Modal	461.038.000,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>6.125.366.869,12</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Reklas ke Beban jasa	25.410.013.572,00	
- Koreksi harga	0,00	
- Reklas ke aset	2.865.980.000,00	
- Reklas ke pemeliharaan	39.429.600,00	
- Reklas ke beban hibah	0,00	
- Pembulatan	869.077,00	
- Hutang tahun sebelumnya	321.799.750,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>28.638.091.999,00</b>
<b>Jumlah Penerimaan dari LRA (Rp)</b>		<b>37.579.933.574,84</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Dalam penyajian nilai persediaan di neraca, pembelian yang diakui sebagai belanja persediaan adalah belanja persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang.

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.881.952.049,64 dan Rp17.130.984.042,55 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Audited (Rp)</b>		<b>17.130.984.042,55</b>
Mutasi Bertambah		
Pembelian	37.579.933.574,84	
Hibah	4.369.709.026,19	
Dropping	14.952.515.044,81	
Perolehan Lainnya	3.000.000,00	
Retur	14.657.500,36	
Pengembalian	796.470,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>56.920.611.616,20</b>
Mutasi Berkurang		
Pemakaian	40.795.465.029,50	
Penghapusan	13.697.120,00	
Penyerahan/Dijual ke Masyarakat	3.500.000,00	
Hibah	1.163.978.511,00	
Expired/Rusak	493.457.002,10	
Pemusnahan	1.072.412.874,10	
Peminjaman	231.000,00	
Reklas ke BMD	0,00	
Dropping	8.075.951.453,82	
Retur	487.399,41	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>51.619.180.389,93</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>22.881.952.049,64</b>

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.881.952.049,64. Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan jenis persediaan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**Daftar Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Jenis Persediaan	31 Desember 2023 <i>Unaudited</i> (Rp)	31 Desember 2022 <i>Audited</i> (Rp)
Bahan Habis Pakai dan Cetakan	927.632.623,00	983.036.214,00
Obat dan Alat Kesehatan	14.534.310.445,64	14.206.228.280,55
Bahan Percontohan	25.715.000,00	22.715.000,00
Cadangan Pangan/makanan/sembako	170.290.158,00	77.827.355,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.000.000,00	40.540.030,00
Hewan Ternak	0,00	500.000,00
Tanah	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	223.492.950,00	223.492.950,00
Barang Inventaris	6.997.510.873,00	1.576.644.213,00
<b>Total</b>	<b>22.881.952.049,64</b>	<b>17.130.984.042,55</b>

Rincian Persediaan dapat dilihat pada lampiran 5.

Persediaan dikelompokkan menjadi :

- a. Persediaan berupa *supplies* terdiri atas barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan berupa blanko KTP/KK, obat-obatan, alat kesehatan, bahan percontohan, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual. Saldo persediaan berupa *supplies* tersebut berasal dari OPD termasuk BLUD. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.660.948.226,64 terdiri dari Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp13.876.200.026,57 dan Persediaan pada BLUD sebesar Rp1.784.748.200,07. Rincian *supplies* per 31 Desember 2023 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	6.200.000,00
2.	Dinas Kesehatan	12.140.383.115,57
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	416.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	80.273.200,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.494.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.873.728,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	1.100.000,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	642.884.590,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	4.507.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	629.680.693,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	193.709.205,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.988.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	25.715.000,00
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	21.016.210,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	742.200,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	434.760,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000,00
18.	Sekretariat Daerah	4.996.000,00
19.	Sekretariat DPRD	5.429.000,00
20.	Kecamatan Muntok	11.191.800,00
21.	Kecamatan Simpang Teritip	748.000,00
22.	Kecamatan Jebus	250.000,00
23.	Kecamatan Kelapa	3.000.000,00
24.	Kecamatan Tempilang	2.255.500,00
25.	Kecamatan Parittiga	240.000,00
26.	Inspektorat Daerah	775.000,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	213.500,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.485.000,00
29.	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.092.300,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.120.000,00
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.480.000,00
32.	BLUD	1.784.748.200,07
33.	Sekolah	18.205.525,00
<b>Total</b>		<b>15.660.948.226,64</b>

Terdapat Persediaan pada RSUD Sejiran Setason yang diretur dan di-*recall* oleh pihak penyedia senilai Rp64.769.739,81 namun hingga tahun berkenaan belum diganti oleh penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Obat	Jumlah	Penyedia	Jenis Pengembalian	Nilai Obat (Rp)
1	Norepinephrine 1 mg / ml	1900 Ampul	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	Retur	49.094.100,00
2	Antasida Doen Sirup	4150 Botol	PT. Rajawali Nusindo	Recall	7.158.750,00
3	Domperidone 5 mg / 5 ml	200 Botol	PT. Rajawali Nusindo	Recall	471.800,00
4	Paracetamol Drop	189 Botol	PT. Rajawali Nusindo	Recall	966.357,00
5	Ceterizine Sirup 60 ml	194 Botol	PT. Parit Padang Global	Recall	1.533.370,75



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Nama Obat	Jumlah	Penyedia	Jenis Pengembalian	Nilai Obat (Rp)
6	Cartylo 80 mg	7092 Tablet	PT. Kimia Farma	Recall	4.408.387,20
7	Isoniazide 300 mg	386 Tablet	PT. Kimia Farma	Recall	59.254,86
8	Miniaspi 80 mg	12000 Tablet	PT. Merapi Utama Pharma	Recall	1.077.720,00
<b>Total</b>					<b>64.769.739,81</b>

- Retur adalah proses pengembalian obat yang biasanya dilakukan untuk produk yang mendekati waktu kadaluarsa untuk diganti dengan obat yang waktu kadaluarsanya lebih panjang. Pada tanggal 4 November 2020, pihak farmasi RSUD Sejiran Setason telah melayangkan surat kepada pihak penyedia atas retur obat Norepinephrine sebanyak 1900 ampul yang akan kadaluarsa pada bulan Januari 2021. Namun sampai dengan tahun 2024 pihak penyedia belum bisa mengembalikan obat tersebut. Hingga pada tanggal 4 Maret 2024, Dinas Kesehatan melalui RSUD Sejiran Setason menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 400.14.3/380/RSUD.01/2024 kepada PT. Anugrah Phramindo Lestari selaku pihak penyedia Norepinephrine. Sebagai tindak lanjut atas surat pemberitahuan tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 2024, RSUD Sejiran Setason telah mendapatkan obat Norepinephrine sebanyak 1060 ampul. Sedangkan sebanyak 840 ampul obat sisanya sedang berproses.
- *Recall* (penarikan) adalah penarikan obat dan/atau bahan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label atas instruksi dari Prinsipal dalam hal ini adalah BPOM, sehingga apabila tidak ditarik akan membahayakan keamanan dan kesehatan pasien yang mengkonsumsi obat. Atas obat recall tersebut, maka pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini bagian farmasi RSUD Sejiran Setason telah menindaklanjuti dengan:
  1. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. Merapi Utama Pharma Nomor 442/002/RSUD.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Barang *Recall* dan telah mendapatkan tanggapan secara tertulis dengan informasi jika terjadi antrian proses registrasi produk di BPOM sehingga estimasi *supply* produk Miniaspi 80 TSE maksimal pada Q4 Tahun 2024,
  2. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. Rajawali Nusindo Nomor 442/004/RSUD.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Barang *Recall* dan telah mendapatkan tanggapan secara tertulis,
  3. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. Kimia Farma TD Nomor 442/003/RSUD.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Barang *Recall* dan telah mendapatkan tanggapan secara tertulis dengan informasi:



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nama Produk	Estimasi NIE terbit	Estimasi Ketersediaan Pabrik	Estimasi Penggantian Barang
Cartylo 80 Mg Tablet	Januari 2024	Juni 2024	Agustus 2024
Isoniazid 300 Mg Tablet	Sudah Terbit	Januari 2024	Juli 2024

4. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. Parit Padang Global Nomor: 442/001/RSUD.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Barang *Recall*.
- b. Persediaan berupa barang inventaris lainnya yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak ketiga ataupun masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp7.221.003.823,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
<b>1.</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</b>	<b>1.258.422.213,00</b>
	1. Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan (Tahun 2020)	1.258.422.213,00
<b>2.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>5.962.581.610,00</b>
	1. Sambungan Rumah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpiaan Sungai Daeng (Tahun 2022)	223.492.950,00
	2. Pagar Polda Provinsi Babel	1.162.640.000,00
	3. Rumah dan Barak Komi Yonif A 147/Kesatria Garuda Jaya	905.876.257,00
	4. Parkir Pengadilan Negeri Babar	305.848.487,00
	5. Ruang Serba Guna Venue Lap. Bola Basket TAC	110.857.000,00
	6. Ruang Serba Guna Venue Lap. Bola Basket Jampan	111.286.000,00
	7. Kamar Ganti dan WC Venue Lap. Bola Basket TAC dan Jampan	1.240.758.000,00
	8. Lapangan, Ruang Ganti, dan WC Venue Olahraga Bola Voli	453.403.916,00
	9. Ruang Serba Guna Venue Olahraga Bola Voli	111.079.000,00
	10. Rutan Polres	1.141.220.000,00
	11. Pemeliharaan Set Interior Satreskrim Polres Bangka Barat	196.120.000,00
	<b>Total</b>	<b>7.221.003.823,00</b>

### 3.1.2 Investasi Jangka Panjang

#### 3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

##### 3.1.2.1.5 Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat

Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan pinjaman dana perkuatan modal kepada kelompok petani kelapa sawit berupa dana bergulir. Investasi Dana



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Perkuatan Modal Masyarakat Kabupaten Bangka Barat disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 23 November 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 16 Oktober 2012. Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak mengatur jangka waktu pelunasan, sehingga sisa pinjaman dana perkuatan modal tetap disajikan pada Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat.

Pinjaman Dana Perkuatan Modal KKSRR per 31 Desember 2023 :

Tahun	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2014	KKSRR Tahun 2011	1.499.986.500,00	1.498.000.233,45	1.986.266,55
2015	KKSRR Tahun 2012	2.800.000.000,00	1.728.884.620,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>		<b>4.299.986.500,00</b>	<b>3.226.884.853,45</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Rincian Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp1.073.101.646,55 adalah sebagai berikut :

Organisasi Perangkat Daerah dan Nama Program	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>		
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSRR Tahun 2011	1.986.266,55	1.986.266,55
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSRR Tahun 2012	1.071.115.380,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Mutasi Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI INVESTASI DANA PERKUATAN MODAL MASYARAKAT  
PER 31 DESEMBER 2023 KABUPATEN BANGKA BARAT**

Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2022 Rp	Pemberian Pinjaman di tahun 2023 Rp	Pengembalian Pinjaman di tahun 2023 Rp	Reklasifikasi ke Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Per 31 Des 2023 Rp
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=2+3-4-5</i>
<b>Dinas Pertanian dan Peternakan</b>					
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSRR Tahun 2011	1.986.266,55	0,00	0,00	0,00	1.986.266,55



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2022 Rp	Pemberian Pinjaman di tahun 2023 Rp	Pengembalian Pinjaman di tahun 2023 Rp	Reklasifikasi ke Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Per 31 Des 2023 Rp
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=2+3-4-5</i>
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSR Tahun 2012	1.071.115.380,00	0,00	0,00	0,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

### 3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

#### 3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Nama Investee	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	4.517.500.000,00
BUMD Bangka Barat Sejahtera	131.445.745,00	167.142.010,00
PDAM. Tirta Sejiran Setason	8.932.801.917,00	8.732.780.339,00
<b>Total</b>	<b>48.281.747.662,00</b>	<b>48.117.422.349,00</b>

Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Investee	Kepemilikan	Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2022 Rp	Penyertaan Modal Tahun 2023 Rp	Laba/Rugi dan Penyesuaian rugi Investee Tahun 2023* dan Koreksi Catat Rp	Sampai dengan 31 Desember 2023 Rp
<b>Metode Harga Perolehan</b>					
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2,28%	34.700.000.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	10,33%	4.517.500.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	4.517.500.000,00
<b>Metode Ekuitas</b>					
BUMD Bangka Barat Sejahtera	100,00%	167.142.010,00	0,00	(35.696.265,00)	131.445.745,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	100,00%	8.732.780.339,00	0,00	200.021.578,00	8.932.801.917,00
<b>Total</b>		<b>48.117.422.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.325.313,00</b>	<b>48.281.747.662,00</b>

\*Laba/Rugi *Investee* hanya mempengaruhi penyertaan modal dengan metode ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Penjelasan penyertaan modal Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp34.700.000.000,00. Pengakuan penyertaan modal pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.517.500.000,00. Pengakuan penyertaan modal adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PT. Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
3. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera. Pengakuan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp131.445.745,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp167.142.010,00 dikurangi dengan rugi tahun 2023 sebesar Rp13.545.653,00 dan koreksi ekuitas 2022 sebesar Rp22.150.612,00. Koreksi ekuitas 2023 sebesar Rp13.484.000,00 merupakan kurang saji utang pajak tahun 2022. Laporan Keuangan Bangka Barat Sejahtera Tahun 2023 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan Modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PD. Bangka Barat Sejahtera.

4. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason. Pengakuan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100,00% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp8.932.801.917,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp8.732.780.339.00 dan ditambah dengan laba Tahun 2023 sebesar Rp200.021.578,00. Laporan Keuangan PDAM Tirta Sejiran Setason tahun 2023 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PDAM Tirta Sejiran Setason.

Kepemilikan saham Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.290.282.017,00 atas penyertaan modal adalah sebagai berikut :

Nama Investee	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 Rp	Saham			Agio saham	Total Saham	Sisa Yang Belum Dijadikan Saham
		Jumlah lembar	Nominal Per Lembar Saham Rp	Nilai Rp			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3x4</i>	<i>6</i>	<i>7=5+6</i>	<i>8=2-7</i>
<b>Metode Harga Perolehan</b>							
PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	23.865	1.000.000,00	23.865.000.000,00	10.834.710.000,00	34.699.710.000,00	290.000,00
PT. BPR Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	450.000	10.000	4.500.000.000,00	17.500.000,00	4.517.500.000,00	0,00
<b>Metode Ekuitas</b>							
BUMD Bangka Barat Sejahtera	131.445.745,00			131.445.745,00		131.445.745,00	0,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	8.932.801.917,00			8.932.801.917,00		8.932.801.917,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.281.747.662,00</b>			<b>37.429.247.662,00</b>	<b>10.852.210.000,00</b>	<b>48.281.747.662,00</b>	<b>290.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

### 3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap *idle* dan aset tetap kemitraan yang direklasifikasi ke aset lainnya dan berdasarkan peraturan Bupati Bangka Barat tentang Kebijakan Akutansi, aset tersebut mempunyai nilai yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

#### Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka aset tersebut harus berwujud dan memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Penilaian Aset Tetap

Nilai aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan 31 Desember 2023. Aset tetap dicatat senilai harga perolehannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi dan biaya kepanitiaan.

#### Nilai Tercatat Aset Tetap

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai tercatat tanah, aset tetap lainnya dan KDP adalah seluruh biaya perolehan aset tersebut hingga dapat dipergunakan.

Perolehan Aset bersumber dari dana APBD, droping dan Hibah. Untuk realisasi APBD tahun 2023 Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp162.934.017.467,93 namun yang tercatat sebagai aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sebesar Rp177.393.603.272,00. Selisih nilai tersebut berasal dari rekonsiliasi yang dilakukan antara PPK OPD dengan Pengurus Barang OPD, untuk memperoleh data yang akurat terkait pengakuan aset atas pengeluaran APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mutasi (bertambah/berkurang) pengeluaran APBD menjadi aset, diantaranya :

- a. Bertambah:
  - belanja pemeliharaan;
  - pembulatan bertambah pembagian harga perolehan secara proporsional;
  - hutang;
  - reklas antar golongan; dan
  - reklas dari barang dan jasa (jika terdapat belanja barang dan jasa seperti belanja persediaan, honor, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain yang menurut kriterianya memenuhi kriteria sebagai aset).
- b. Berkurang:
  - belanja pemeliharaan;
  - reklas ke barang dan jasa;
  - pembulatan berkurang pembagian harga perolehan secara proporsional;
  - hutang;
  - reklas antar golongan; dan
  - hibah.
- c. Aset di Bawah Kapitalisasi adalah aset yang tidak masuk ke dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria nilai perolehan minimum aset tetap.
- d. Aset Tidak Berwujud  
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Secara keseluruhan dapat diungkapkan bertambah dan berkurang aset tetap sebagai berikut :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>162.934.017.467,93</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	5.824.962.748,00	
- Pembulatan	339,93	
- Hutang	16.300.862.920,00	
- Reklas Antar Golongan	8.281.495.182,00	
- Belanja Barang dan Jasa	4.490.687.725,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>34.898.008.914,93</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	865.368.768,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.903.324.352,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- Pembulatan	1.237,86	
- Hutang	4.543.668.258,00	
- Reklas Antar Golongan	8.281.495.182,00	
- Hibah	183.999.000,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>16.777.856.797,86</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>3.327.203.905,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>290.378.408,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>177.436.587.272,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja APBD

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>151.632.821.860,00</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	5.824.962.748,00	
- Pembulatan	338,00	
- Hutang	15.933.571.200,00	
- Reklas Antar Golongan	4.665.492.723,00	
- Belanja Barang dan Jasa	4.412.362.125,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>30.836.389.134,00</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	865.368.768,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.889.152.755,00	
- Pembulatan	1.237,00	
- Hutang	4.543.668.258,00	
- Reklas Antar Golongan	4.665.492.723,00	
- Hibah	183.999.000,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>13.147.682.741,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>316.708.756,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>290.378.408,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>168.714.441.089,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja BLUD

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>4.888.878.214,93</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,93	
- Hutang	367.291.720,00	
- Reklas Antar Golongan	3.499.058.144,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>3.866.349.864,93</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Berkurang :			
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.478.519,00	
	- Pembulatan	0,86	
	- Hutang	0,00	
	- Reklas Antar Golongan	3.499.058.144,00	
	- Hibah	0,00	
	<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>3.500.536.663,86</b>
	<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>14.298.350,00</b>
	<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>5.240.393.066,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja JKN

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2023 (Rp)</b>			<b>199.533.200,00</b>
Bertambah :			
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	
	- Pembulatan	0,00	
	- Hutang	0,00	
	- Reklas Antar Golongan	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
	<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>0,00</b>
Berkurang :			
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
	- Pembulatan	0,00	
	- Hutang	0,00	
	- Reklas Antar Golongan	0,00	
	- Hibah	0,00	
	<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>4.550.000,00</b>
	<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>2.125.000,00</b>
	<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>192.858.200,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja BOS

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2023 (Rp)</b>			<b>6.212.784.193,00</b>
Bertambah :			
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	
	- Pembulatan	1,00	
	- Hutang	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

	- Reklas Antar Golongan	116.944.315,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	78.325.600,00	
	<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>195.269.916,00</b>
Berkurang :			
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	8.143.078,00	
	- Pembulatan	0,00	
	- Hutang	0,00	
	- Reklas Antar Golongan	116.944.315,00	
	- Hibah	0,00	
	<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>125.087.393,00</b>
	<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>2.994.071.799,00</b>
	<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>3.288.894.917,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap per golongan adalah sebagai berikut:

Golongan Aset Tetap	LRA (Rp)	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Aset di Bawah Kapitalisasi	Aset Tak Berwujud	Aset Tetap (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	31.054.707.102,86	5.096.966.013,00	1.380.699.927,86	589.456.589,00	280.380.000,00	33.901.136.599,00
Gedung dan Bangunan	61.751.185.849,07	24.487.953.364,93	12.842.045.359,00	23.144.006,00	0,00	73.373.949.849,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.901.977.241,00	1.401.758.911,00	1.382.996.016,00	0,00	0,00	65.920.740.136,00
Aset Tetap Lainnya	4.226.147.275,00	3.520.914.801,00	1.172.115.495,00	2.714.603.310,00	9.998.408,00	3.850.344.863,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	390.415.825,00	0,00	0,00	0,00	390.415.825,00
<b>Total</b>	<b>162.934.017.467,93</b>	<b>34.898.008.914,93</b>	<b>16.777.856.797,86</b>	<b>3.327.203.905,00</b>	<b>290.378.408,00</b>	<b>177.436.587.272,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 per OPD yang diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut :

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	25.530.811.622,00	5.516.790.175,00	4.657.608.201,00	3.117.708.825,00	161.000.000,00	23.111.284.771,00
2	Dinas Kesehatan	15.817.791.402,00	427.372.853,00	752.956.630,00	13.250.250,00	0,00	15.478.957.375,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.627.589.296,00	16.481.502.200,00	5.150.840.258,00	888.000,00	0,00	101.957.363.238,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4.684.306.150,00	3.641.863.214,00	267.168.016,00	0,00	119.380.000,00	7.939.621.348,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaram	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.491.500,00	1.950.000,00	1,00	9.050.000,00	0,00	142.391.499,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	167.025.000,00	116.452.440,00	0,00	0,00	0,00	283.477.440,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	834.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.815.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.870.465.000,00	150.911.686,00	0,00	0,00	0,00	2.021.376.686,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.029.600,00	0,00	15.384.600,00	0,00	0,00	72.645.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.500.000,00	2.600.000,00	0,00	450.000,00	0,00	29.650.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	91.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.880.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.924.099.800,00	3.452.216.212,00	1.102.602.000,00	0,00	0,00	10.273.714.012,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.822.303.977,00	605.696.173,00	189.417.928,00	0,00	0,00	3.238.582.222,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	664.948.106,00	61,00	0,00	121.933.563,00	9.998.408,00	533.016.196,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.486.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	87.486.000,00
18	Sekretariat DPRD	2.439.318.200,00	252.385.502,00	761.672.500,00	10.789.917,00	0,00	1.919.241.285,00
19	Sekretariat Daerah	1.951.750.000,00	176.499.999,00	364.070.000,00	0,00	0,00	1.764.179.999,00
20	Kecamatan Muntok	1.226.428.600,00	1.000.136,00	0,00	30.590.000,00	0,00	1.196.838.736,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	5.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
22	Kecamatan Jebus	41.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750.000,00
23	Kecamatan Kelapa	376.180.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	376.180.000,00
24	Kecamatan Tempilang	55.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.985.000,00
25	Kecamatan Paritiga	61.740.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	55.740.000,00
26	Inspektorat	93.900.000,00	5.280.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	97.830.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	153.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.995.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	99.944.400,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	57.400.000,00	3.395.000,00	0,00	895.000,00	0,00	59.900.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Politik	83.050.000,00	78.998.999,00	0,00	0,00	0,00	162.048.999,00
32	BLUD	4.888.878.214,93	3.866.349.864,93	3.500.536.663,86	14.298.350,00	0,00	5.240.393.066,00
	<b>Total</b>	<b>162.934.017.467,93</b>	<b>34.898.008.914,93</b>	<b>16.777.856.797,86</b>	<b>3.327.203.905,00</b>	<b>290.378.408,00</b>	<b>177.436.587.272,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian dan Mutasi Aset Tetap

Nilai aset tetap yang disajikan sebagai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.991.977.208.544,00 dan Rp2.900.502.244.491,00 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

**Mutasi Bertambah dan Mutasi Berkurang Aset Tetap**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023**

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	154.480.501.406,00	343.028.000,00	186.188.174,00	154.637.341.232,00
Peralatan dan Mesin	373.122.662.972,00	39.047.977.182,00	8.817.931.178,00	403.352.708.976,00
Gedung dan Bangunan	573.419.800.338,00	147.129.404.132,00	15.634.139.964,00	704.915.064.506,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.723.686.534.725,00	67.042.222.650,00	80.421.235.139,00	1.710.307.522.236,00
Aset Tetap Lainnya	13.874.803.006,00	3.853.844.863,00	213.100,00	17.728.434.769,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	61.917.942.044,00	390.415.825,00	61.272.221.044,00	1.036.136.825,00
<b>Total Aset Tetap Bruto</b>	<b>2.900.502.244.491,00</b>	<b>257.806.892.652,00</b>	<b>166.331.928.599</b>	<b>2.991.977.208.544,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.585.718.939.574,00)	(147.420.843.478,00)	(33.005.052.891,00)	(1.700.134.730.161,00)
<b>Total Aset Tetap Netto</b>	<b>1.314.783.304.917,00</b>	<b>110.386.049.174,00</b>	<b>133.326.875.708,00</b>	<b>1.291.842.478.383,00</b>

Penjelasan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)		2.900.502.244.491,00
Mutasi Bertambah		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	177.436.587.272,00
2.	Hibah	5.195.177.466,00
3.	Mutasi Antar OPD	13.464.366.870,00
4.	Koreksi Nilai	60.000.000,00
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	61.364.521.044,00
7.	Belum Tercatat	286.240.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>257.806.892.652,00</b>
Mutasi Berkurang		
1.	Penghapusan	3.639.565.185,00
2.	Mutasi Antar OPD	13.464.366.870,00
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	60.000.000,00
4.	Hibah	100.402.174,00
5.	Reklas	149.067.594.370,00
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>166.331.928.599,00</b>
Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)		<b>2.991.977.208.544,00</b>

❖ Mutasi bertambah adalah penambahan atas aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- Pengadaan/Belanja Modal adalah hasil pengadaan atau realisasi anggaran tahun 2023 yang diakui sebagai aset tetap.
  - Hibah adalah penerimaan atas barang yang bersumber dari hibah kementerian dan masyarakat.
  - Mutasi antar OPD adalah penambahan aset tetap dari :
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Pengelola ke Unit OPD.
  - Koreksi Nilai adalah koreksi tambah atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut nilainya berubah.
  - Reklas dari persediaan adalah perpindahan belanja persediaan yang diakui sebagai aset tetap.
  - Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain atau dari aset *extra komptable* ke aset *intra komptable*.
  - Kapitalisasi aset adalah penambahan nilai suatu aset akibat adanya kegiatan pemeliharaan atau renovasi atas satu aset yang sudah ada sebelumnya.
- ❖ Mutasi berkurang adalah pengurangan atas aset tetap
- Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
  - Mutasi antar OPD adalah pengurangan aset tetap dari satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat.
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Unit OPD ke Pengelola.
  - Koreksi Nilai/Persediaan adalah koreksi kurang atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut bukan aset.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- Hibah adalah pengeluaran atas aset yang diserahkan kepada instansi vertical, pemerintah desa atau masyarakat.
- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain, atau dari aset *extra komptable* ke aset *intra komptable*.

**Mutasi Aset Tetap OPD per 31 Desember 2023**

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022</b> <i>(Audited)</i> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Bertambah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Berkurang</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	378.486.929.107,00	36.972.092.075,00	14.402.104.864,00	401.056.916.318,00
Dinas Kesehatan	221.767.554.182,00	17.479.620.307,00	1.711.196.225,00	237.535.978.264,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.847.539.777.304,00	163.035.760.932,00	139.167.916.782,00	1.871.407.621.454,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	45.889.902.481,00	7.939.621.348,00	239.849.800,00	53.589.674.029,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.451.232.995,00	8.400.000,00	0,00	5.459.632.995,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	345.171.850,00	142.391.499,00	0,00	487.563.349,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.738.705.860,00	283.477.440,00	35.569.700,00	2.986.613.600,00
Dinas Pertanian dan Pangan	32.512.867.435,00	834.815.000,00	102.500.350,00	33.245.182.085,00
Dinas Lingkungan Hidup	34.208.745.133,00	2.021.376.686,00	468.254.408,00	35.761.867.411,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.083.617.277,00	72.645.000,00	0,00	4.156.262.277,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022</b> <i>(Audited)</i> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Bertambah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Berkurang</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.390.250.649,00	53.778.000,00	0,00	9.444.028.649,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.365.849.629,00	91.880.000,00	877.048.473,00	7.580.681.156,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	34.366.230.742,00	13.013.967.112,00	139.410.066,00	47.240.787.788,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.845.090.273,00	101.700.000,00	0,00	5.946.790.273,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.097.425.525,00	3.556.756.572,00	4.832.237.244,00	33.821.944.853,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.109.467.960,00	534.416.196,00	0,00	18.643.884.156,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.349.743.463,00	89.566.000,00	127.959.540,00	9.311.349.923,00
Sekretariat Daerah	94.025.928.182,00	1.867.179.999,00	3.773.679.609,00	92.119.428.572,00
Sekretariat DPRD	23.714.703.522,00	1.919.241.285,00	37.365.480,00	25.596.579.327,00
Kecamatan Muntok	10.507.710.359,00	1.208.538.736,00	0,00	11.716.249.095,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.154.967.834,00	6.200.000,00	0,00	5.161.167.834,00
Kecamatan Jebus	4.781.710.669,00	101.750.000,00	60.000.000,00	4.823.460.669,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Kecamatan Kelapa	5.982.243.486,00	382.516.000,00	58.249.000,00	6.306.510.486,00
Kecamatan Tempilang	4.629.115.305,00	55.985.000,00	198.910.808,00	4.486.189.497,00
Kecamatan Parittiga	6.407.739.646,00	188.156.000,00	0,00	6.595.895.646,00
Inspektorat Daerah	1.932.626.192,00	97.830.000,00	0,00	2.030.456.192,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	5.887.154.079,00	153.995.000,00	74.650.000,00	5.966.499.079,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.459.600.243,00	99.944.400,00	9.926.250,00	6.549.618.393,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.705.387.343,00	90.850.000,00	15.100.000,00	5.781.137.343,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.494.574.883,00	0,00	0,00	12.494.574.883,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.224.055.161,00	162.048.999,00	0,00	1.386.104.160,00
BLUD	18.046.165.722,00	5.240.393.066	0,00	23.286.558.788,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.900.502.244.491,00</b>	<b>257.806.892.652,00</b>	<b>166.331.928.599,00</b>	<b>2.991.977.208.544,00</b>

#### **Masa Manfaat Aset Tetap**

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Akuntansi Kabupaten Bangka Barat menetapkan masa manfaat untuk aset tetap per jenis dan per sub aset tetap. Penetapan masa manfaat tersebut menjadi salah satu dasar dalam penghitungan penyusutan aset tetap.

#### **Perbedaan Pencatatan Perolehan Aset Tetap**

Terkadang terdapat perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat aset, umumnya karena adanya pembulatan nilai pada biaya yang membentuk nilai perolehan aset tersebut. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi nilai aset tetap antara Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dengan Pejabat Pengurus Barang minimal per semester dalam rangka pencocokan nilai perolehan aset.

#### **Kapitalisasi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

#### **Nilai Perolehan Minimum Aset tetap**

Nilai perolehan minimum aset tetap yang menjadi penentu apakah suatu aset tetap masuk ke dalam neraca atau tidak berlaku untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya berupa buku, hewan/ternak dan tumbuhan. Sedangkan untuk aset tetap tanah, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai perolehan minimum, sehingga seluruh aset tetap tersebut dalam kondisi baik akan disajikan dalam neraca.

Nilai perolehan minimum aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

#### **Daftar Nilai Perolehan Minimum Aset Tetap**

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat Keamanan	500.000,00
2.10	Komputer	500.000,00
2.11	Alat Ekplorasi	500.000,00
2.12	Alat Pengeboran	500.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
2.16	Alat Peraga	500.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
2.18	Rambu-Rambu	500.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Monumen	10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	10.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0,00
4.3	Instalasi	0,00
4.4	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00
5.3	Hewan	100.000,00
5.4	Biodata Perairan	0,00
5.5	Tanaman	100.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran belanja modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengatur bahwa perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, maka pengeluaran belanja modal tersebut harus dikapitalisasi.

Perbaikan meliputi:

1. Renovasi  
Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
2. Overhaul  
Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
2. Gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25 % dari harga perolehan;
3. Jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
4. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

1. Pengadaan/pembelian tanah;
2. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

### **Pencatatan Ekstra Komptabel**

Pencatatan Ekstra Komptabel adalah penatausahaan aset tetap untuk nilai aset tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset tetap yang karena sifat, kondisi dan keberadaannya, tidak perlu dilaporkan dalam neraca.

Pencatatan Ekstra Komptabel dilakukan terhadap:

1. Aset tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi;
2. Aset tak berwujud;
3. Aset yang secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
4. Aset yang dipinjamkaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu;
5. Aset yang digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan; dan
6. Aset hilang/tidak diketahui keberadaannya.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel, namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

#### **3.1.3.1 Tanah**

Aset tetap tanah merupakan tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tanah yang dikuasai namun dipergunakan oleh pihak lain diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

##### **Penilaian Tanah**

Aset tetap tanah dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya pembebasan lahan, biaya *land clearing*, biaya terkait pengurusan atau perolehan hak atau sertifikat tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan.

##### **Nilai Tercatat Tanah**

Aset tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai tercatat (*carrying amount*) aset tanah adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tanah.

##### **Nilai Batasan Kapitalisasi Tanah**

Aset tetap tanah tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, sehingga seluruh nilai aset tetap tanah disajikan dalam neraca.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan tanah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023 (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tanah Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>0,00</b>

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp154.637.341.232,00 dan Rp154.480.501.406,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp343.028.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp186.188.174,00.

Penjelasan mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Audited (Rp)</b>		<b>154.480.501.406,00</b>
Mutasi Bertambah		
1. Pengadaan/Belanja Modal	0,00	
2. Hibah	52.752.000,00	
3. Mutasi Antar OPD	1.836.000,00	
4. Koreksi Nilai	60.000.000,00	
5. Reklas Dari Persediaan	0,00	
6. Reklas	0,00	
7. Belum Tercatat	228.440.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>343.028.000,00</b>
Mutasi Berkurang		
1. Dihapus	119.000.000,00	
2. Mutasi Antar OPD	1.836.000,00	
3. Koreksi Nilai/Persediaan	60.000.000,00	
4. Hibah	5.352.174,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

5.	Reklas	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>186.188.174,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>154.637.341.232,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap tanah per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	11.086.540.863,00	1.836.000,00	1.836.000,00	11.086.540.863,00
Dinas Kesehatan	3.480.989.676,00	116.232.000,00	0,00	3.597.221.676,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.108.656.252,00	0,00	0,00	121.108.656.252,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.753.174.561,00	0,00	0,00	2.753.174.561,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	274.696.905,00	0,00	0,00	274.696.905,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.921.754.280,00	0,00	0,00	2.921.754.280,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	24.128.000,00	0,00	24.128.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.182.618.354,00	0,00	0,00	2.182.618.354,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.519.020.100,00	0,00	0,00	1.519.020.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.056.291.180,00	0,00	0,00	2.056.291.180,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	108.270.000,00	2.080.000,00	0,00	110.350.000,00
Sekretariat Daerah	4.687.244.361,00	0,00	124.352.174,00	4.562.892.187,00
Sekretariat DPRD	275.753.000,00	0,00	0,00	275.753.000,00
Kecamatan Muntok	579.015.560,00	0,00	0,00	579.015.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kecamatan Simpang Teritip	9.239.550,00	0,00	0,00	9.239.550,00
Kecamatan Jebus	440.061.560,00	60.000.000,00	60.000.000,00	440.061.560,00
Kecamatan Kelapa	603.550.644,00	6.336.000,00	0,00	609.886.644,00
Kecamatan Tempilang	303.854.560,00	0,00	0,00	303.854.560,00
Kecamatan Paritiga	89.770.000,00	132.416.000,00	0,00	222.186.000,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>154.480.501.406,00</b>	<b>343.028.000,00</b>	<b>186.188.174,00</b>	<b>154.637.341.232,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian tanah.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai. Peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pengakuan Tanah

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Terdapat tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah karena berbagai kondisi yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dapat mengurus bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.

Daftar Tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah adalah sebagai berikut :

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						
	Sekolah di Kec. Jebus	Dusun Kampak, Kec. Jebus	1981	7.000 M <sup>2</sup>	35.000.000,00	SDN 16 JEBUS	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
	Sekolah di Kec. Kelapa	Dusun Lagok, Desa Kacung				SDN 25 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
		Dusun Suban, Desa Terentang				SDN 26 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
Sekolah di Kec. Parittiga	Desa Bakit	2021		1,00	SMPN 4 Parittiga		
2	Dinas Kesehatan						
	Puskesmas di Kec. Teritip	Desa Simpang Gong	2008	625 M <sup>2</sup>	3.125.000	Polindes Sp. Gong	Merupakan Tanah Desa Simpang Gong
		Desa Air Nyatoh		195 M	248.000	Polindes Air Nyatoh	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas Kec. Jebus	Dusun Rukam	1985	187 M	219.000	Pustu Rukam	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
		Desa Ketap	2008	385,80 M	1.929.000	Poskesdes Ketap	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Manik	1982	450 M	2.250.000	Rumah Para Medis	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas di Kec. Parittiga	Dusun Penganak	2006	694,60 M	4.966.390	Pustu Air Gantang	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
		Desa Cupat	1998	600 M	4.290.000	Polindes Cupat	Kawasan Pertambangan PT. Timah dan Hutan Produksi
		Desa Kapit	1988	375 M	1.875.000	Poskesdes Kapit	Merupakan tanah Desa
	Puskesmas di Kec. Tempilang	Desa Air Lintang	1978	162,40 M	812.000	Pustu Air Lintang	Merupakan tanah Desa
		Desa Buyan Kelumbi	1994	280,50 M	1.402.500	Poskesdes Buyan Kelumbi	Merupakan tanah Desa
		Desa Sangku	1996	300 M	1.500.000	Poskesdes Sangku	Merupakan tanah Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
		Desa Simpang Yul	2000	197 M	689.500	Polindes Simpang Yul	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Surya	2006	546 M	262.080	Polindes Sinar Surya	Merupakan tanah Desa
		Desa Tanjung Nyiur	2008	578 M	2.023.000	Poskesdes Tanjung Nyiur	Merupakan tanah Desa
		Dusun Buyan. Desa Buyan Kelumbi	2008	600 M	3.000.000	Poskesdes Buyan	Merupakan tanah Desa

2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Daftar tanah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang di atasnya dibangun oleh masyarakat tanpa persetujuan ataupun perjanjian hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	Tanah Eks SDN 262	Sebagian Tanah untuk Bengkel dan Warung Kopi Kebun Nanas	P3D Bangka Induk Ke Bangka Barat Tahun 2003	Sdr.Muzakir	50	Pengelola	688.000,00	Jl. Hos Cokroaminot RT/RW. 01/02 Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan investigasi Kepemilikan - Telah dilakukan Pengamanan Berupa Papan Nama Kepemilikan
2.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Kantin GOR	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84,5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan Pendekatan/Pe mberitahuan secara lisan tentang penjelasan kepada subjek hukum yang memanfaatkan
3.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Billiard Center	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84,5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	BMD tanggal 15 November 2016 - Telah dilakukan Penilaian Sewa - Telah dilayangkan surat pemberitahuan 1, 2 dan terakhir Sewa BMD



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
									berisi himbawan mengajukan Pemanfaatan BMD Berupa Sewa
<b>Total</b>							<b>7.322.000,00</b>		

3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sampai dengan Semester II Tahun 2020 tidak terdapat tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang sertifikat bukti kepemilikannya ganda.
4. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran asset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO, Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
5. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Daftar Tanah yang sudah bersertifikat :

No	Nama Pada Sertifikat	Luas (m <sup>2</sup> )	No Sertifikat	Tahun	OPD Pengguna
1	Gedung DPRD	15.282	153	2011	
2	DISHUBPARINFORM	2.659	154	2011	DINKOMINFO
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.547	155	2011	
4	DISPERINDAGKOP dan UKM	3.076	156	2011	DKUP
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.174	157	2011	DPUPR
6	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.742	158	2011	BPKAD
7	DIKPORA	5.677	159	2011	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.814	160	2011	DISPARBUD



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Nama Pada Sertifikat	Luas (m <sup>2</sup> )	No Sertifikat	Tahun	OPD Pengguna
9	Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.285	161	2011	
10	Ruang Terbuka Hijau dan Lapangan Upacara	29.261	169	2013	
11	Ruang Terbuka Hijau	8.559	172	2013	
12	Kantor Pengelolaan Hutan Produksi	2.820	177	2014	
13	Gedung Metrologi	3.111	186	2018	
14	Gedung Uji Kelayakan Kendaraan	4.032	187	2018	
<b>Total</b>		<b>101.039</b>			

Sedangkan tanah yang ditempati OPD lain belum bersertifikat.

Catatan:

1. OPD belum mencatat tanah pada masing-masing buku inventaris karena belum ada penyerahan dari Sekretariat Daerah;
2. Tanah yang belum bersertifikat karena tanah masih berstatus Hutan Lindung (HL), dan sekarang masih dalam proses permohonan pengalihan status tanah dari HL menjadi APL ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah melakukan pengukuran kembali tanah kompleks pemda tersebut yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Tahap I pengukuran ulang dengan cara menggunakan drone dan tahap ini telah selesai dilakukan, sedangkan
2. Tahap II pengukuran ulang dengan cara memasang patok beton dan membuat titik GPS, masih dalam proses penyelesaian hingga terbitnya laporan keuangan ini.

Sehingga ukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengukuran ulang belum dapat disajikan.

### 3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap peralatan dan mesin adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk aset peralatan dan mesin yaitu sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

Rincian dan Mutasi Peralatan dan Mesin

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023 (Rp)</b>		<b>31.054.707.102,86</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	34.614.020,00	
- Pembulatan	282,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.665.052.031,00	
- Belanja Barang dan Jasa	3.397.299.680,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>5.096.966.013,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	154.772.768,00	
- Belanja Barang dan Jasa	707.908.297,00	
- Pembulatan	1,86	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	518.018.861,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>1.380.699.927,86</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>589.456.589,00</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>280.380.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>33.901.136.599,00</b>

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp403.352.708.976,00 dan Rp373.122.662.972,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp39.047.977.182,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp8.817.931.178,00.

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>373.122.662.972,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Pengadaan/Belanja Modal	33.901.136.599,00	
2. Hibah	2.131.921.366,00	
3. Mutasi Antar OPD	2.854.119.217,00	
4. Koreksi nilai/persediaan	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	103.000.000,00	
7.	Belum Tercatat	57.800.000,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>39.047.977.182,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Penghapusan	2.122.506.125,00	
2.	Mutasi Antar OPD	2.854.119.217,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	3.841.305.836,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>8.817.931.178,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>			<b>403.352.708.976,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	103.025.381.918,00	15.221.586.574,00	3.313.021.455,00	114.933.947.037,00
Dinas Kesehatan	112.708.440.498,00	14.558.481.206,00	921.376.093,00	126.345.545.611,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.909.985.472,00	784.927.000,00	0,00	10.694.912.472,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	15.490.710.764,00	72.039.000,00	196.000.000,00	15.366.749.764,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.640.969.195,00	8.400.000,00	0,00	4.649.369.195,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	345.171.850,00	142.391.499,00	0,00	487.563.349,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.336.674.985,00	167.025.000,00	0,00	1.503.699.985,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.093.639.948,00	76.925.000,00	0,00	10.170.564.948,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.410.826.339,00	1.870.465.000,00	427.411.021,00	14.853.880.318,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.442.813.077,00	72.645.000,00	0,00	2.515.458.077,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.361.112.866,00	29.650.000,00	0,00	5.390.762.866,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.219.814.172,00	91.880.000,00	53.635.366,00	4.258.058.806,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.982.126.419,00	1.121.181.524,00	0,00	4.103.307.943,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.703.795.162,00	101.700.000,00	0,00	2.805.495.162,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.494.094.658,00	302.100.000,00	0,00	6.796.194.658,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.150.256.590,00	416.708.902,00	0,00	2.566.965.492,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.878.391.216,00	77.786.000,00	0,00	1.956.177.216,00
Sekretariat Daerah	26.913.704.817,00	1.787.680.000,00	3.649.327.435,00	25.052.057.382,00
Sekretariat DPRD	8.430.427.134,00	334.081.585,00	0,00	8.764.508.719,00
Kecamatan Muntok	1.185.625.652,00	360.257.736,00	0,00	1.545.883.388,00
Kecamatan Simpang Teritip	749.736.840,00	6.200.000,00	0,00	755.936.840,00
Kecamatan Jebus	1.435.633.113,00	41.750.000,00	0,00	1.477.383.113,00
Kecamatan Kelapa	1.479.814.137,00	50.000.000,00	58.249.000,00	1.471.565.137,00
Kecamatan Tempilang	746.419.747,00	55.985.000,00	198.910.808,00	603.493.939,00
Kecamatan Parittiga	1.311.315.299,00	55.740.000,00	0,00	1.367.055.299,00
Inspektorat Daerah	989.711.442,00	94.550.000,00	0,00	1.084.261.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.823.964.259,00	153.995.000,00	0,00	2.977.959.259,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.312.602.519,00	0,00	0,00	3.312.602.519,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.237.971.570,00	90.850.000,00	0,00	4.328.821.570,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.234.711.791,00	0,00	0,00	4.234.711.791,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	524.112.501,00	162.048.999,00	0,00	686.161.500,00
BLUD	15.552.707.022,00	738.947.157,00	0,00	16.291.654.179,00
<b>Total</b>	<b>373.122.662.972,00</b>	<b>39.047.977.182,00</b>	<b>8.817.931.178,00</b>	<b>403.352.708.976,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk peralatan dan mesin dan peralatan olahraga adalah yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap peralatan dan mesin per OPD :

**Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin OPD  
Per 31 Desember 2023**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	114.933.947.037,00	83.252.837.676,00	31.681.109.361,00
Dinas Kesehatan	126.345.545.611,00	92.185.144.140,00	34.160.401.471,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.694.912.472,00	8.959.536.035,00	1.735.376.437,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	15.366.749.764,00	9.256.903.291,00	6.109.846.473,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.649.369.195,00	4.502.942.312,00	146.426.883,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	487.563.349,00	203.481.629,00	284.081.720,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.503.699.985,00	1.278.814.246,00	224.885.739,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.170.564.948,00	9.208.164.872,00	962.400.076,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.853.880.318,00	10.738.429.641,00	4.115.450.677,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.515.458.077,00	1.820.322.875,00	695.135.202,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.390.762.866,00	4.607.837.763,00	782.925.103,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.258.058.806,00	3.676.538.182,00	581.520.624,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.103.307.943,00	2.945.219.529,00	1.158.088.414,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.805.495.162,00	2.615.094.272,00	190.400.890,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.796.194.658,00	6.199.144.401,00	597.050.257,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.566.965.492,00	1.514.095.355,00	1.052.870.137,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.956.177.216,00	1.856.197.461,00	99.979.755,00
Sekretariat Daerah	25.052.057.382,00	21.109.288.759,00	3.942.768.623,00
Sekretariat DPRD	8.764.508.719,00	6.786.908.224,00	1.977.600.495,00
Kecamatan Muntok	1.545.883.388,00	1.125.787.502,00	420.095.886,00
Kecamatan Simpang Teritip	755.936.840,00	747.786.840,00	8.150.000,00
Kecamatan Jebus	1.477.383.113,00	1.190.646.688,00	286.736.425,00
Kecamatan Kelapa	1.471.565.137,00	1.057.198.134,00	414.367.003,00
Kecamatan Tempilang	603.493.939,00	548.424.106,00	55.069.833,00
Kecamatan Parittiga	1.367.055.299,00	1.311.315.134,00	55.740.165,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Inspektorat Daerah	1.084.261.442,00	992.895.608,00	91.365.834,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.977.959.259,00	2.785.411.763,00	192.547.496,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.312.602.519,00	3.082.880.912,00	229.721.607,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.328.821.570,00	4.155.253.895,00	173.567.675,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.234.711.791,00	3.967.959.759,00	266.752.032,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	686.161.500,00	527.309.151,00	158.852.349,00
BLUD	16.291.654.179,00	7.652.352.684,00	8.639.301.495,00
<b>Total</b>	<b>403.352.708.976,00</b>	<b>301.862.122.839,00</b>	<b>101.490.586.137,00</b>

### 3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

#### Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

#### Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap gedung dan bangunan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

#### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih Rp10.000.000,00.

Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, maka OPD mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak disajikan di dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023</b>		<b>61.751.185.849,07</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	5.790.348.728,00	
- Pembulatan	0,93	
- Hutang	16.300.862.920,00	
- Reklas Antar Golongan	1.581.618.489,00	
- Belanja Barang dan Jasa	815.123.227,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>24.487.953.364,93</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.138.601.539,00	
- Pembulatan	1.219,00	
- Hutang	4.543.668.258,00	
- Reklas Antar Golongan	5.975.775.343,00	
- Hibah	183.999.000,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>12.842.045.359,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>23.144.006,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>73.373.949.849,00</b>

Rincian dan Mutasi Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp704.915.064.506,00 dan Rp573.419.800.338,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp147.129.404.132,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp15.634.139.964,00.

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>573.419.800.338,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	73.373.949.849,00
2.	Hibah	2.760.253.100,00
3.	Mutasi Antar OPD	9.873.851.432,00
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	61.121.349.751,00
7.	Belum Tercatat	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>147.129.404.132,00</b>
	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Penghapusan	1.398.059.060,00	
2.	Mutasi Antar OPD	9.873.851.432,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	4.362.229.472,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>15.634.139.964,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>704.915.064.506,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan per OPD adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022</b> <i>(Audited)</i> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Bertambah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Berkurang</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	250.222.487.817,00	19.762.702.864,00	10.352.474.088,00	259.632.716.593,00
Dinas Kesehatan	96.124.680.591,00	760.831.638,00	700.649.763,00	96.184.862.466,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.484.613.413,00	106.596.868.705,00	0,00	119.081.482.118,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.567.196.600,00	3.641.863.214,00	43.849.800,00	9.165.210.014,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	0,00	0,00	806.007.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.285.078.050,00	116.452.440,00	35.569.700,00	1.365.960.790,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.679.414.132,00	0,00	102.500.350,00	10.576.913.782,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.747.261.239,00	150.911.686,00	40.843.387,00	6.857.329.538,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	0,00	0,00	1.545.224.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022</b> <i>(Audited)</i> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Bertambah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Berkurang</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.131.389.741,00	0,00	0,00	3.131.389.741,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	0,00	0,00	1.534.594.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	27.924.570.268,00	11.892.785.588,00	139.410.066,00	39.677.945.790,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.355.162.086,00	0,00	0,00	2.355.162.086,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.096.367.357,00	1.333.285.133,00	4.149.016.540,00	16.280.635.950,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	0,00	0,00	13.026.446.857,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.408.068.355,00	0,00	22.534.540,00	4.385.533.815,00
Sekretariat Daerah	60.070.607.246,00	79.499.999,00	0,00	60.150.107.245,00
Sekretariat DPRD	13.962.024.797,00	1.485.329.700,00	37.365.480,00	15.409.989.017,00
Kecamatan Muntok	6.492.637.147,00	252.561.000,00	0,00	6.745.198.147,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	0,00	0,00	4.363.907.444,00
Kecamatan Jebus	2.735.315.996,00	0,00	0,00	2.735.315.996,00
Kecamatan Kelapa	3.115.524.074,00	120.700.000,00	0,00	3.236.224.074,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	0,00	0,00	3.520.707.548,00
Kecamatan Paritiga	4.779.747.847,00	0,00	0,00	4.779.747.847,00
Inspektorat Daerah	878.585.000,00	3.280.000,00	0,00	881.865.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan	2.484.806.742,00	0,00	0,00	2.484.806.742,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022</b> <i>(Audited)</i> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Bertambah</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b> <b>Berkurang</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
Dan Penelitian Pengembangan Daerah				
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.944.408.519,00	99.944.400,00	9.926.250,00	3.034.426.669,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	0,00	0,00	1.402.303.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	0,00	0,00	7.743.348.295,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	0,00	0,00	664.873.460,00
BLUD	1.322.440.617,00	832.387.765,00	0,00	2.154.828.382,00
<b>Total</b>	<b>573.419.800.338,00</b>	<b>147.129.404.132,00</b>	<b>15.634.139.964,00</b>	<b>704.915.064.506,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Berikut nilai aset tetap gedung dan bangunan per OPD:

**Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD  
Per 31 Desember 2023**

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	259.632.716.593,00	74.311.752.834,00	185.320.963.759,00
Dinas Kesehatan	96.184.862.466,00	24.404.407.384,00	71.780.455.082,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.081.482.118,00	3.748.502.726,00	115.332.979.392,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	9.165.210.014,00	1.005.876.385,00	8.159.333.629,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	233.264.854,00	572.742.446,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.365.960.790,00	372.901.092,00	993.059.698,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.576.913.782,00	2.576.234.175,00	8.000.679.607,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.857.329.538,00	1.691.723.981,00	5.165.605.557,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	431.656.592,00	1.113.567.608,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.131.389.741,00	706.427.943,00	2.424.961.798,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	368.859.583,00	1.165.735.017,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	39.677.945.790,00	7.527.273.266,00	32.150.672.524,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.355.162.086,00	609.635.781,00	1.745.526.305,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.280.635.950,00	3.291.911.971,00	12.988.723.979,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	1.206.350.534,00	11.820.096.323,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.385.533.815,00	1.357.094.341,00	3.028.439.474,00
Sekretariat Daerah	60.150.107.245,00	13.290.387.059,00	46.859.720.186,00
Sekretariat DPRD	15.409.989.017,00	2.972.944.862,00	12.437.044.155,00
Kecamatan Muntok	6.745.198.147,00	1.376.821.965,00	5.368.376.182,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	834.811.547,00	3.529.095.897,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Kecamatan Jebus	2.735.315.996,00	1.012.115.770,00	1.723.200.226,00
Kecamatan Kelapa	3.236.224.074,00	1.239.482.119,00	1.996.741.955,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	1.111.193.038,00	2.409.514.510,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	829.226.650,00	3.950.521.197,00
Inspektorat Daerah	881.865.000,00	269.921.063,00	611.943.937,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.484.806.742,00	667.280.931,00	1.817.525.811,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.034.426.669,00	751.245.047,00	2.283.181.622,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	395.950.143,00	1.006.352.857,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	2.362.559.535,00	5.380.788.760,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	195.399.529,00	469.473.931,00
BLUD	2.154.828.382,00	134.881.244,00	2.019.947.138,00
<b>Total</b>	<b>704.915.064.506,00</b>	<b>151.288.093.944,00</b>	<b>553.626.970.562,00</b>

#### 3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

##### Biaya Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

##### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi, sehingga seluruh jalan irigasi dan jaringan yang dalam kondisi baik dan digunakan dalam operasional disajikan di neraca.

##### Nilai Tercatat Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023</b>		<b>65.901.977.241,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.333.054.518,00	
- Belanja Barang dan Jasa	68.704.393,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>1.401.758.911,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.602.000,00	
- Pembulatan	16,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.380.394.000,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>1.382.996.016,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>65.920.740.136,00</b>

Rincian dan Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.710.307.522.236,00 dan Rp1.723.686.534.725,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp67.042.222.650,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp80.421.235.139,00.

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>1.723.686.534.725,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	65.920.740.136,00
2.	Hibah	246.751.000,00
3.	Mutasi Antar OPD	734.560.221,00
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	140.171.293,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

7.	Belum Tercatat	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>67.042.222.650,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	734.560.221,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	79.686.674.918,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>80.421.235.139,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>			<b>1.710.307.522.236,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.778.414.939,00	1.748.887.212,00	734.560.221,00	4.792.741.930,00
Dinas Kesehatan	9.255.643.017,00	1.948.393.463,00	89.170.369,00	11.114.866.111,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.642.859.795.473,00	55.653.965.227,00	78.089.519.088,00	1.620.424.241.612,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	21.756.474.056,00	4.225.719.134,00	0,00	25.982.193.190,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	0,00	0,00	83.379.200,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.145.727.597,00	757.890.000,00	0,00	11.903.617.597,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	0,00	0,00	11.127.386.075,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	0,00	0,00	95.580.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.436.022,00	0,00	0,00	582.436.022,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.609.898.857,00	0,00	823.413.107,00	1.786.485.750,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.259.011.961,00	0,00	0,00	1.259.011.961,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	0,00	0,00	567.633.025,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.461.191.428,00	1.726.467.614,00	584.447.354,00	8.603.211.688,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	0,00	0,00	576.898.686,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.718.900,00	9.700.000,00	10.375.000,00	2.824.043.900,00
Sekretariat Daerah	2.258.211.990,00	0,00	0,00	2.258.211.990,00
Sekretariat DPRD	836.047.341,00	0,00	0,00	836.047.341,00
Kecamatan Muntok	1.995.613.000,00	595.720.000,00	0,00	2.591.333.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	0,00	0,00	170.700.000,00
Kecamatan Kelapa	782.614.631,00	205.480.000,00	0,00	988.094.631,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	0,00	0,00	42.335.000,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	0,00	0,00	221.008.000,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	0,00	0,00	54.540.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	174.391.000,00	0,00	74.650.000,00	99.741.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	0,00	0,00	190.283.800,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	58.995.673,00	0,00	15.100.000,00	43.895.673,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	0,00	0,00	503.658.947,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	0,00	0,00	35.069.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
BLUD	350.376.657,00	170.000.000,00	0,00	520.376.657,00
<b>Total</b>	<b>1.723.686.534.725,00</b>	<b>67.042.222.650,00</b>	<b>80.421.235.139,00</b>	<b>1.710.307.522.236,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD**  
**Per 31 Desember 2023**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	4.792.741.930,00	1.123.076.873,00	3.669.665.057,00
Dinas Kesehatan	11.114.866.111,00	3.141.529.119,00	7.973.336.992,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.620.424.241.612,00	1.206.905.378.313,00	413.518.863.299,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	25.982.193.190,00	12.887.068.155,00	13.095.125.035,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	29.518.109,00	53.861.091,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.903.617.597,00	7.870.064.469,00	4.033.553.128,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	8.097.791.051,00	3.029.595.024,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	29.138.385,00	66.441.615,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.436.022,00	149.458.830,00	432.977.192,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.786.485.750,00	984.367.701,00	802.118.049,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.259.011.961,00	424.154.657,00	834.857.304,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	189.761.466,00	377.871.559,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.603.211.688,00	1.564.687.512,00	7.038.524.176,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	90.725.021,00	486.173.665,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.043.900,00	677.855.590,00	2.146.188.310,00
Sekretariat Daerah	2.258.211.990,00	964.178.096,00	1.294.033.894,00
Sekretariat DPRD	836.047.341,00	215.397.845,00	620.649.496,00
Kecamatan Muntok	2.591.333.000,00	889.845.316,00	1.701.487.684,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	8.087.500,00	20.412.500,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	29.845.077,00	140.854.923,00
Kecamatan Kelapa	988.094.631,00	233.639.974,00	754.454.657,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	20.623.761,00	21.711.239,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	163.212.258,00	57.795.742,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	21.399.166,00	33.141.084,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	99.741.000,00	35.832.196,00	63.908.804,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>	<b>Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	65.859.511,00	124.424.289,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	43.895.673,00	22.433.819,00	21.461.854,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	102.359.688,00	401.299.259,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	11.225.438,00	23.843.762,00
BLUD	520.376.657,00	35.998.482,00	484.378.175,00
<b>Total</b>	<b>1.710.307.522.236,00</b>	<b>1.246.984.513.378,00</b>	<b>463.323.008.858,00</b>

### 3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya terdiri dari buku-buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, aset tetap dalam renovasi.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

#### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang memiliki nilai minimum kapitalisasi adalah buku dan hewan/ternak dan tumbuhan, yaitu:

- Nilai batasan minimum kapitalisasi buku perpustakaan adalah Rp100.000,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga adalah Rp0,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi hewan, ternak, tumbuhan pohon dan tumbuhan tanaman hias adalah Rp100.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Sehingga aset tetap lainnya berupa buku dan hewan/ternak dan tumbuhan yang melampaui nilai batasan minimum kapitalisasi dan dalam kondisi baik, akan disajikan dan dilaporkan di neraca. Sebaliknya, jika tidak melampaui nilai batasan minimal kapitalisasi ataupun dalam kondisi rusak berat, maka aset tetap tersebut tidak disajikan dalam neraca.

Sedangkan untuk aset tetap lainnya berupa alat kesenian/barang bercorak kesenian karena tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, maka seluruh aset tetap tersebut jika dalam kondisi baik akan disajikan seluruhnya di neraca.

Nilai Tercatat aset tetap lainnya

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap lainnya adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023</b>		<b>4.226.147.275,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	57,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	3.506.258.144,00	
- Belanja Barang dan Jasa	14.656.600,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>3.520.914.801,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	710.596.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	54.212.516,00	
- Pembulatan	1,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	407.306.978,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>1.172.115.495,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>2.714.603.310,00</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>9.998.408,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>3.850.344.863,00</b>

Rincian dan Mutasi aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.728.434.769,00 dan Rp13.874.803.006,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Mutasi bertambah nilai aset tetap lainnya sebesar Rp3.853.844.863,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp213.100,00.

Penjelasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021(Rp)</b>			<b>13.874.803.006,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	3.850.344.863,00	
2.	Hibah	3.500.000,00	
3.	Mutasi Antar OPD	0,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	0,00	
7.	Belum Tercatat	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>3.853.844.863,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Penghapusan	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	0,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	213.100,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>213.100,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>17.728.434.769,00</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per rincian objek adalah sebagai berikut:

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Bahan Perpustakaan	10.832.857.351,00
Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian	2.027.182.068,00
Hewan	246.000.000,00
Biota Perairan	32.799.992,00
Tanaman	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.589.595.358,00
<b>Total</b>	<b>17.728.434.769,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap lainnya per OPD dengan rincian sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	10.374.103.570,00	237.079.425,00	213.100,00	10.610.969.895,00
Dinas Kesehatan	3.842.400,00	0,00	0,00	3.842.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	322.346.500,00	0,00	0,00	322.346.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.256.500,00	0,00	0,00	4.256.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	33.573.625,00	0,00	0,00	33.573.625,00
Dinas Pertanian dan Pangan	319.388.853,00	0,00	0,00	319.388.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.517.200,00	0,00	0,00	1.517.200,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	315.312.020,00	0,00	0,00	315.312.020,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17.903.740,00	0,00	0,00	17.903.740,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	218.500.000,00	00,0	0,00	218.500.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	274.383.632,00	0,00	0,00	274.383.632,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	299.574.647,00	117.707.294,00	0,00	417.281.941,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.244.992,00	0,00	0,00	35.244.992,00
Sekretariat Daerah	96.159.768,00	0,00	0,00	96.159.768,00
Sekretariat DPRD	10.612.250,00	0,00	0,00	10.612.250,00
Kecamatan Muntok	254.819.000,00	0,00	0,00	254.819.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	3.584.000,00	0,00	0,00	3.584.000,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Kecamatan Tempilang	15.798.450,00	0,00	0,00	15.798.450,00
Kecamatan Parittiga	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
Inspektorat Daerah	9.789.500,00	0,00	0,00	9.789.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	403.992.078,00	0,00	0,00	403.992.078,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.305.405,00	0,00	0,00	12.305.405,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	6.117.100,00	0,00	0,00	6.117.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.855.850,00	0,00	0,00	12.855.850,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	820.641.426,00	3.499.058.144,00	0,00	4.319.699.570,00
<b>Total</b>	<b>13.874.803.006,00</b>	<b>3.853.844.863,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>17.728.434.769,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran atau belum mencapai 100,00% pengerjaannya (belum selesai/dilanjutkan tahun berikutnya).

#### **Pengakuan KDP**

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

#### **Penilaian KDP**

Nilai KDP menggambarkan jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan. Biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
2. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
3. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
4. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Dan biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan konstruksi tertentu, antara lain:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan metode yang sistematis, rasional dan konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nilai Tercatat KDP

Karena aset tetap KDP tidak dihitung penyusutannya, maka nilai tercatat untuk aset tetap KDP adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tersebut, yaitu jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp)		0,00
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	195.512.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	194.903.825,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>390.415.825,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Utang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 (Rp)</b>		<b>390.415.825,00</b>

**Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Per 31 Desember 2023**

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>98.329.000,00</b>
DED Jalan	2021	98.329.000,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>348.498.825,00</b>
Landscape jalan setapak Gunung Menumbing	2018	7.130.000,00
Buku Pengetahuan Umum ( buku Penyusunan DED/SID Pariwisata batu rakit	2019	104.010.000,00
Jasa Kons tempat parkir di Menumbing	2020	15.670.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
Jasa Kons perencana turis information center (TIC)	2020	16.170.000,00
Jasa Kons Perencana Landscape Menumbing	2020	10.615.000,00
Jasa Kons Perencana Masterplan Boozem Pantai Teluk Rubiah	2023	99.519.825,00
Jasa Kons Perencana DED Boozem Pantai Iklim Teluk Rubiah	2023	95.384.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>289.640.000,00</b>
Rumah Sakit Pratama Kelapa (Master Plan)	2014	193.958.000,00
Jasa Konsultan Perencana Gedung Farmasi	2023	95.682.000,00
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>299.669.000,00</b>
Jasa Kons Perencana Rehab Gedung Kantor	2021	99.869.000,00
Jasa Kons Perencana Interior Gedung Kantor	2021	99.970.000,00
Jasa Kons Perencana Gedung Kantor	2023	99.830.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>1.036.136.825,00</b>

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tetap dilanjutkan namun belum dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) karena pekerjaan konstruksi tersebut belum dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **Mutasi KDP**

Mutasi KDP yang terjadi selama Tahun 2023 bertambah sebesar Rp390.415.825,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp61.272.221.044,00.

Penjelasan mutasi aset tetap KDP adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)		61.917.942.044,00
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Pengadaan/Belanja Modal	390.415.825,00	
2. Hibah	0,00	
3. Mutasi Antar OPD	0,00	
4. Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5. Belum Tercatat	0,00	
6. Reklas	0,00	
7. Selain Pengadaan	0,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>390.415.825,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	0,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	95.050.000,00	
5.	Reklas	61.177.171.044,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>61.272.221.044,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>1.036.136.825,00</b>

#### Mutasi Penambahan KDP

Penambahan KDP di Tahun 2023 merupakan penambahan dari pengadaan aset tetap yang belum sempurna/selesai proses konstruksi maupun pengadaannya. Aset tetap yang belum selesai proses pembangunannya tersebut dikategorikan konstruksi dalam pengerjaan. Jika aset tetap tersebut sudah selesai proses pengadaannya, sudah diserahterimakan dan siap digunakan, maka aset tetap tersebut akan dipindahkan ke dalam golongan aset tetap sesuai golongan asetnya.

#### Mutasi Berkurang KDP

- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Nilai hibah aset KDP pada Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/69/BPKAD/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Dari Daftar Buku Inventaris Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 senilai Rp95.050.000,00. Aset KDP yang dihibahkan berdasarkan Berita Acara Nomor 188.45/390/1.20.13/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tersebut berupa Jasa Konsultan Perencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		<b>95.050.000,00</b>
Tambatan Perahu Sungai Kampak Jebus	2014	25.050.000,00
Tambatan Perahu Sukal	2015	35.000.000,00
Tambatan Perahu Rambat	2015	35.000.000,00

- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain. KDP dapat dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut :
  - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan sudah diserahterimakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Rincian nilai aset KDP yang direklas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>61.078.397.694,00</b>
DED Sport Center	2012	463.812.500,00
Bangunan Stadion	2020	30.653.085.319,00
Bangunan Venue sport hall	2020	29.961.499.875,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>98.773.350,00</b>
Masterplan (DED) Jalan, Landscape, dan Tempat Parkir Pantai Batu Rakit	2022	98.773.350,00
<b>Sub Total</b>		<b>61.177.171.044,00</b>

Rincian KDP per OPD Tahun 2023 sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	193.958.000,00	95.682.000,00	0,00	289.640.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.176.726.694,00	0,00	61.078.397.694,00	98.329.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	252.368.350,00	194.903.825,00	98.773.350,00	348.498.825,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	95.050.000,00	0,00	95.050.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	199.839.000,00	99.830.000,00	0,00	299.669.000,00
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>61.917.942.044,00</b>	<b>390.415.825,00</b>	<b>61.272.221.044,00</b>	<b>1.036.136.825,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

#### Penghentian KDP

Dalam beberapa kasus suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena tidak tersedianya dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca. Namun apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca.

#### 3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan; dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan;

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle*;
- b. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- c. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset tetap yang direncanakan untuk dipindahtangankan; dan
- e. Aset Tetap berupa tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

**Metode dan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (nol Rupiah). Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan metode yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan per tahun, namun karena sistem pencatatan akrual dan aplikasi SIMDA BMD yang menggunakan metode per bulan dalam penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap.

Masa manfaat aset tetap dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2			<b>Golongan Peralatan Dan Mesin</b>	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alar Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	7
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	7
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	7
1	3	2	13		Alat Produksi. Pengolahan. dan Pemurnian	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	13	01	Sumur	7
1	3	2	13	02	Produksi	7
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Golongan Gedung Dan Bangunan</b>	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Golongan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan</b>	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Intalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut :

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi  
Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Sampai dengan 31-Des-2016

Bidang : Sekwan / DPRD  
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 UPB : Sekretariat Dewan

No	Kode Aset	No. Reg	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat		Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2016 (Rp)	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Des 2016 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
						Thn	Bln		Semester I (Rp)	Semester II (Rp)		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000			650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000	43	7	650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000

	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	<b>523 Bulan</b>
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00/600 bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (6 Bulan x Rp10.000.000,00) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp770.000.000,00 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00-Rp770.000.000,00) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut :

**DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
 Sampai dengan 31-Des-2017

Bidang : Sekwan / DPRD  
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 UPB : Sekretariat Dewan

No	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2017	NILAI BUKU	
						Thn	Bln		Semester I	Semester II			
I. Gedung dan Bangunan													
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	2010	6.000.000.000	43	7	770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852
						6.000.000.000			770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852

A	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000.00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

A	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
	65 Bulan x 10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	<b>523 Bulan</b>
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000,00
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000,00
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01 Maret 2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB ) A8 + B1-20.000.000	5.310.000.000,00
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000,00
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415,00
8	Penyusutan Tahun 2017	<b>111.394.148,00</b>
	- Semester I	56.557.659,00
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 ( 2 Bln x 10.000.000 (B7)) = 20.000.000	
	1 Maret 2017 - 31 Desember 2017 ( 4 Bln x 9.139.415 (B7)) = 36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 ( 6 Bulan x 9.139.415)	54.836.489,00
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148,00
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852,00
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan di atas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap OPD  
Per 31 Desember 2023**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	401.056.916.318,00	158.687.667.383,00	242.369.248.935,00
Dinas Kesehatan	237.535.978.264,00	119.731.080.643,00	117.804.897.621,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.871.407.621.454,00	1.219.613.417.074,00	651.794.204.380,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	53.589.674.029,00	23.149.847.831,00	30.439.826.198,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.459.632.995,00	4.736.207.166,00	723.425.829,00
Badan Penanggulangan	487.563.349,00	203.481.629,00	284.081.720,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)</b>
Bencana Daerah			
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	2.986.613.600,00	1.681.233.447,00	1.305.380.153,00
Dinas Pertanian dan Pangan	33.245.182.085,00	19.654.463.516,00	13.590.718.569,00
Dinas Lingkungan Hidup	35.761.867.411,00	20.527.944.673,00	15.233.922.738,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.156.262.277,00	2.281.117.852,00	1.875.144.425,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.444.028.649,00	5.463724.536,00	3.980.304.113,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.580.681.156,00	5.029.765.466,00	2.550.915.690,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	47.240.787.788,00	10.896.647.452,00	36.344.140.336,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.946.790.273,00	3.414.491.519,00	2.532.298.754,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	33.821.944.853,00	11.055.743.884,00	22.766.200.969,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.643.884.156,00	2.811.170.910,00	15.832.713.246,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.311.349.923,00	3.891.147.392,00	5.420.202.531,00
Sekretariat Daerah	92.119.428.572,00	35.363.853.914,00	56.755.574.658,00
Sekretariat DPRD	25.596.579.327,00	9.975.250.931,00	15.621.328.396,00
Kecamatan Muntok	11.716.249.095,00	3.392.454.783,00	8.323.794.312,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.161.167.834,00	1.590.685.887,00	3.570.481.947,00
Kecamatan Jebus	4.823.460.669,00	2.232.607.535,00	2.590.853.134,00
Kecamatan Kelapa	6.306.510.486,00	2.530.320.227,00	3.776.190.259,00
Kecamatan Tempilang	4.486.189.497,00	1.680.240.905,00	2.805.948.592,00
Kecamatan Parittiga	6.595.895.646,00	2.303.754.042,00	4.292.141.604,00
Inspektorat Daerah	2.030.456.192,00	1.284.215.837,00	746.240.355,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian	5.966.499.079,00	3.488.524.890,00	2.477.974.189,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Pengembangan Daerah			
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.549.618.393,00	3.899.985.470,00	2.649.632.923,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.781.137.343,00	4.573.637.857,00	1.207.499.486,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.494.574.883,00	6.432.878.982,00	6.061.695.901,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.386.104.160,00	733.934.118,00	652.170.042,00
BLUD	23.286.558.788,00	7.823.232.410,00	15.463.326.378,00
<b>Total</b>	<b>2.991.977.208.544,00</b>	<b>1.700.134.730.161,00</b>	<b>1.291.842.478.383,00</b>

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.700.134.730.161,00 dan Rp1.585.718.939.574,00.

Penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>1.585.718.939.574,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	99.782.617.392,00
2.	Beban Penyusutan Reklas/Hapus	115.277.776,00
3.	Hibah	0,00
4.	Mutasi Antar OPD	117.161.266,00
5.	Koreksi Akumulasi	47.218.437.044,00
6.	Belum Tercatat	0,00
7.	Reklas	187.350.000,00
8.	Kapitalisasi Aset	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>147.420.843.478,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Dihapus	2.224.435.566,00
2.	Mutasi Antar OPD	117.161.266,00
3.	Koreksi Akumulasi	13.177.360,00
4.	Hibah	0,00
5.	Reklas	30.650.278.699,00
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>33.005.052.891,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>1.700.134.730.161,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi penyusutan aset tetap per OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	143.304.981.288,00	16.002.565.765,00	619.879.670,00	158.687.667.383,00
Dinas Kesehatan	108.504.732.164,00	12.257.553.123,00	1.031.204.644,00	119.731.080.643,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.143.759.471.978,00	101.992.197.083,00	26.138.251.987,00	1.219.613.417.074,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	20.643.143.563,00	2.702.704.268,00	196.000.000,00	23.149.847.831,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.369.589.324,00	366.617.842,00	0,00	4.736.207.166,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.700.783,00	28.780.846,00	0,00	203.481.629,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.623.060.189,00	58.173.258,00	0,00	1.681.233.447,00
Dinas Pertanian dan Pangan	18.560.259.810,00	1.118.462.122,00	24.258.416,00	19.654.463.516,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.002.875.588,00	959.527.102,00	434.458.017,00	20.527.944.673,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.843.473.603,00	437.644.249,00	0,00	2.281.117.852,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.029.895.265,00	433.829.271,00	0,00	5.463.724.536,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.012.789.270,00	475.488.249,00	458.512.053,00	5.029.765.466,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.121.437.799,00	775.209.653,00	0,00	10.896.647.452,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.291.401.906,00	123.089.613,00	0,00	3.414.491.519,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.989.100.159,00	1.049.074.807,00	982.431.082,00	11.055.743.884,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.308.198.545,00	502.972.365,00	0,00	2.811.170.910,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.735.507.218,00	172.139.062,00	16.498.888,00	3.891.147.392,00
Sekretariat Daerah	35.451.394.053,00	2.705.979.324,00	2.793.519.463,00	35.363.853.914,00
Sekretariat DPRD	8.956.926.521,00	1.018.324.410,00	0,00	9.975.250.931,00
Kecamatan Muntok	2.960.774.628,00	431.680.155,00	0,00	3.392.454.783,00
Kecamatan Simpang Teritip	1.490.968.127,00	99.717.760,00	0,00	1.590.685.887,00
Kecamatan Jebus	2.088.717.251,00	143.890.284,00	0,00	2.232.607.535,00
Kecamatan Kelapa	2.314.322.881,00	274.246.346,00	58.249.000,00	2.530.320.227,00
Kecamatan Tempilang	1.792.576.458,00	86.575.255,00	198.910.808,00	1.680.240.905,00
Kecamatan Parittiga	2.186.679.773,00	117.074.269,00	0,00	2.303.754.042,00
Inspektorat Daerah	1.261.619.547,00	22.596.290,00	0,00	1.284.215.837,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.401.788.442,00	127.283.635,00	40.547.187,00	3.488.524.890,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.697.817.010,00	202.168.460,00	0,00	3.899.985.470,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.455.000.525,00	130.969.008,00	12.331.676,00	4.573.637.857,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.130.506.241,00	302.372.741,00	0,00	6.432.878.982,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	714.498.900,00	19.435.218,00	0,00	733.934.118,00
BLUD	5.540.730.765,00	2.282.501.645,00	0,00	7.823.232.410,00
<b>Total</b>	<b>1.585.718.939.574,00</b>	<b>147.420.843.478,00</b>	<b>33.005.052.891,00</b>	<b>1.700.134.730.161,00</b>

Aset Tetap Bernilai Buku Rp0,00 (Nol Rupiah)

Aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah). Namun secara teknis aset itu dalam kondisi baik dan masih dapat dimanfaatkan, oleh karena itu aset tetap tersebut masih tetap dicatat dan disajikan dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dilaporkan dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Berikut rincian data aset tetap yang bernilai buku Rp0,00 (Nol Rupiah):

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	58.280.073.607,00
Dinas Kesehatan	72.854.258.868,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	834.733.540.044,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6.749.928.148,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.830.227.572,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.209.989.485,00
Dinas Pertanian dan Pangan	14.382.083.692,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.351.110.453,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	623.169.520,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.578.182.791,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.175.537.647,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.746.507.381,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.417.864.505,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.064.875.399,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.182.591.071,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.784.020.661,00
Sekretariat Daerah	18.137.658.712,00
Sekretariat DPRD	5.335.108.858,00
Kecamatan Muntok	958.676.451,00
Kecamatan Simpang Teritip	720.036.840,00
Kecamatan Jebus	942.443.113,00
Kecamatan Kelapa	498.132.300,00
Kecamatan Tempilang	533.308.939,00
Kecamatan Parittiga	1.446.875.299,00
Inspektorat Daerah	989.711.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.626.105.260,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.905.087.024,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	3.830.526.670,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.552.942.016,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	524.112.501,00
BLUD	4.283.521.639,00
<b>Total</b>	<b>1.076.418.929.758,00</b>

Jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat.maka aset tetap tersebut dilaporkan dalam aset lainnya. Aset tetap dalam kondisi nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah) dapat dilakukan penghapusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Aset Bernilai di Bawah Kapitalisasi**

Terdapat Aset di Bawah Kapitalisasi Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	77.435.365.651,00
Dinas Kesehatan	2.573.055.298,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.192.975,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.170.167.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.475.834,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.050.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	81.149.407,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	238.589.483,00
Dinas Lingkungan Hidup	395.999.420,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.342.762,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	137.921.187,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	226.022.957,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.522.758,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	115.196.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	310.981.179,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.018.357.414,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	54.021.929,00
Sekretariat Daerah	457.001.128,00
Sekretariat DPRD	322.042.188,00
Kecamatan Muntok	245.145.627,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.437.624,00
Kecamatan Jebus	67.019.766,00
Kecamatan Kelapa	273.489.425,00
Kecamatan Tempilang	60.522.452,00
Kecamatan Parittiga	51.681.500,00
Inspektorat Daerah	69.924.586,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	183.838.391,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.425.667,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	85.511.822,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	361.146.316,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.136.884,00
BLUD	368.916.107,00
<b>Total</b>	<b>87.017.651.361,00</b>

### 3.1.5 Aset Lainnya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut sudah tidak memenuhi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

definisi aset tetap sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dimaksud adalah aset tetap yang memiliki kondisi rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2023**

Keterangan	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	2.363.054.662,15	2.436.178.391,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.462.521.583,00	4.172.142.675,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.172.305.435,00)	(4.119.091.274,00)
Aset Lain-lain	240.813.253.786,00	240.335.063.233,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(51.763.901.341,00)	(49.815.133.179,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	77.944,00	143.944,00
<b>Total</b>	<b>191.702.701.199,15</b>	<b>193.009.303.790,15</b>

**3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

**3.1.5.2 Tuntutan Perbendaharaan**

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

### 3.1.5.3 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.363.054.662,15 yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.

Mutasi saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023:

Nama	Saldo TGR Per 1 Januari 2023 (Rp)	TGR Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Pengembalian TGR Tahun 2023 (Rp)	Saldo TGR Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5= 2+3-4
Sdr. YW	2.380.203.380,15	0,00	17.148.718,00	2.363.054.662,15
Sdr. EJ	55.975.011,00	0,00	55.975.011,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.436.178.391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.123.729,00</b>	<b>2.363.054.662,15</b>

Rincian Pengembalian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Saldo TGR Per 1 Januari 2023 (Rp)	Nilai Pengembalian TGR (Rp)	Tanggal Pengembalian TGR (Rp)	Saldo TGR Per 31 Desember 2023 (Rp)
Sdr. YW	2.380.203.380,15	17.148.718,00	29/11/2023	2.363.054.662,15
Sdr. EJ	55.975.011,00	55.975.011,00	27/06/2023	0,00
<b>Total</b>	<b>2.436.178.391,15</b>	<b>73.123.729,00</b>		<b>2.363.054.662,15</b>

### 3.1.5.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

### 3.1.5.5 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset yang berupa aplikasi/*software* tertentu atau aplikasi/*software* khusus yang masih digunakan untuk menunjang kerja pegawai, sedangkan aplikasi/*software* yang tidak digunakan lagi diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

Mutasi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.462.521.583,00 dan Rp4.172.142.675,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian mutasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	OPD	31 Desember 2022 Audited Rp	Mutasi Bertambah Rp	Mutasi Berkurang Rp	31 Desember 2023 Rp
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	0,00	0,00	218.221.000,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	24.655.000,00	119.380.500,00	0,00	144.035.500,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	0,00	0,00	2.242.835.743,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	0,00	0,00	10.191.185,00
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	0,00	0,00	418.165.000,00
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.078.925,00	9.998.408,00	0,00	78.077.333,00
8.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	0,00	0,00	38.919.100,00
9.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	0,00	0,00	85.785.000,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	0,00	0,00	62.200.000,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	0,00	0,00	375.421.722,00
12.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	0,00	0,00	284.850.000,00
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	0,00	0,00	216.320.000,00
14.	BLUD	126.500.000,00	0,00	0,00	126.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.172.142.675,00</b>	<b>290.378.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.521.583,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3.1.5.5 Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Metode dan Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode amortisasi aset tak berwujud yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 Nol Rupiah.

Metode garis lurus *straight line method* merupakan metode yang menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bahwa perhitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan per tahun.

Formula besaran persentase amortisasi per bulan adalah:

Persentase amortisasi per bulan =  $\frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}} \times 12$

Berikut daftar Aset tidak berwujud, akumulasi amortisasidan nilai buku aset tak berwujud Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tidak Berwujud Rp	Akumulasi Amortisasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	161.000.000,00	13.116.667,00	147.883.333,00
2.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	218.221.000,00	0,00
3.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan	144.035.500,00	12.132.775,00	131.902.725,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	2.242.835.743,00	0,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	10.191.185,00	0,00
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	418.165.000,00	0,00
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.077.333,00	67.647.243,00	10.430.090,00
8.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	38.919.100,00	0,00
9.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	85.785.000,00	0,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	375.421.722,00	0,00
12.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	216.320.000,00	0,00
14.	BLUD	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.462.521.583,00</b>	<b>4.172.305.435,00</b>	<b>290.216.148,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**3.1.5.7 Aset Lain-lain**

Aset lain-lain merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu :

- a. secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang,
- b. dipinjamkaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu,
- c. digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan,
- d. aset hilang/tidak diketahui keberadaannya, dan
- e. kerugian daerah yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pada neraca per 31 Desember 2023 disajikan aset lain-lain sebesar Rp240.813.253.786,00 berupa aset rusak berat, aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang, dan aset yang dipinjamkaikan/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu dan kerugian daerah yang dikarenakan bendahara yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Rincian Aset lain-lain tahun 2023 adalah sebagai berikut:

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	AsetIdle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	7.957.856.694,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Kesehatan	9.245.958.063,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.597.520.760,00	128.962.922.742,00	0,00	0,00	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	90.915.000,00	0,00	0,00	0,00	
Satuan Polisi Pamong Praja	391.840.156,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.353.070.586,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pertanian dan Pangan	888.431.967,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Lingkungan Hidup	577.057.245,00	0,00	0,00	0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	AsetIdle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.687.592,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.291.655.571,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.772.703,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.068.306.602,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.854.160.691,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	511.583.166,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan	147.391.620,00	0,00	0,00	0,00	
Sekretariat Daerah	686.691.963,00	4.866.199.015,00	0,00	0,00	
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Muntok	954.289.540,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Jebus	278.786.949,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Kelapa	554.395.000,00	193.370.000,00	0,00	0,00	
Kecamatan Tempilang	332.890.123,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
Inspektorat	171.622.267,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	645.085.927,00	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	AsetIdle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	387.539.240,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	323.769.590,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	0,00	
BLUD	194.390.549,00	0,00	0,00	0,00	
PPKD/Pengelola	0,00	0,00	110.474.902.447,00	221.400.134,00	33.010.315.000,00
<b>Total</b>	<b>41.173.663.536,00</b>	<b>134.022.491.757,00</b>	<b>110.474.902.447,00</b>	<b>221.400.134,00</b>	<b>33.010.315.000,00</b>

Terdapat *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 senilai Rp33.010.315.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. TDF disajikan sebagai Aset Lain-lain berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda.

#### Mutasi Aset Rusak Berat

Aset rusak berat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.173.663.536,00 dan Rp37.656.308.964,00.

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset rusak berat per OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.469.477.890,00	647.463.504,00	159.084.700,00	7.957.856.694,00
Dinas Kesehatan	11.619.346.038,00	470.029.196,00	2.843.417.171,00	9.245.958.063,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.597.520.760,00	0,00	0,00	3.597.520.760,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2022 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	90.915.000,00	0,00	0,00	90.915.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	391.840.156,00	0,00	0,00	391.840.156,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.353.070.586,00	0,00	0,00	1.353.070.586,00
Dinas Pertanian dan Pangan	881.311.217,00	102.500.350,00	95.379.600,00	888.431.967,00
Dinas Lingkungan Hidup	621.144.645,00	0,00	44.087.400,00	577.057.245,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	585.848.900,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.687.592,00	0,00	0,00	119.687.592,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.414.607.098,00	877.048.473,00	0,00	2.291.655.571,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.772.703,00	0,00	0,00	269.772.703,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.068.306.602,00	0,00	0,00	2.068.306.602,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.259.755,00	4.630.900.936,00	0,00	4.854.160.691,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	511.583.166,00	0,00	0,00	511.583.166,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	114.482.080,00	32.909.540,00	0,00	147.391.620,00
Sekretariat Daerah	1.135.130.327,00	130.272.486,00	578.710.850,00	686.691.963,00
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	450.090.424,00
Kecamatan Muntok	954.289.540,00	0,00	0,00	954.289.540,00
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	114.654.398,00
Kecamatan Jebus	278.786.949,00	0,00	0,00	278.786.949,00
Kecamatan Kelapa	496.146.000,00	58.249.000,00	0,00	554.395.000,00
Kecamatan Tempilang	133.979.315,00	198.910.808,00	0,00	332.890.123,00
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	216.033.000,00
Inspektorat Daerah	171.622.267,00	0,00	0,00	171.622.267,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	570.435.927,00	74.650.000,00	0,00	645.085.927,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	532.366.950,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	372.439.240,00	15.100.000,00	0,00	387.539.240,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	323.769.590,00	0,00	0,00	323.769.590,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	380.000.300,00
BLUD	194.390.549,00	0,00	0,00	194.390.549,00
<b>Total</b>	<b>37.656.308.964,00</b>	<b>7.238.034.293,00</b>	<b>3.720.679.721,00</b>	<b>41.173.663.536,00</b>

*Mutasi Aset Idle*

Aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp110.474.902.447,00 dan Rp141.974.792.398,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset *idle* Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengelola	141.974.792.398,00	17.820.000,00	31.517.709.951,00	110.474.902.447,00

Rincian Aset *Idle* dapat dilihat pada lampiran 6.

Berikut rincian aset dipinjamakai/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu:

No	OPD	Aset Pinjam Pakai/ Dimanfaatkan pihak lain	Nilai (Rp)	Instansi Pinjam Pakai
1	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	4.866.199.015,00	PDAM. BAZDA. dll.
2	Dinas Pekerjaan Umum	Gedung dan bangunan	3.268.379.000,00	Masyarakat dan pihak ketiga
		Jalan Irigasi dan Jaringan	125.694.543.742,00	
3	Kecamatan Kelapa	Kendaraan Dinas	193.370.000,00	Kejaksanaan Negeri Bangka Barat
<b>Total</b>			<b>134.022.491.757,00</b>	

Rincian Aset Pinjam Pakai dapat dilihat pada lampiran 7.

### 3.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Aset yang dipinjamkakaikan ke Instansi pemerintah. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp76.872.148.227,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.988.268.022,00
Dinas Kesehatan	8.614.854.055,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.908.871.189,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	90.109.166,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	390.551.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.305.793.322,00
Dinas Pertanian dan Pangan	734.211.348,00
Dinas Lingkungan Hidup	551.288.030,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	580.688.901,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	117.373.469,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Perempuan dan Perlindungan Anak	
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.746.930.556,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	268.607.566,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.025.236.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.015.703.572,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	503.619.408,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	83.379.304,00
Sekretariat Daerah	4.679.614.471,00
Sekretariat DPRD	425.512.558,00
Kecamatan Muntok	912.894.872,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.747.485,00
Kecamatan Jebus	248.441.677,00
Kecamatan Kelapa	743.530.883,00
Kecamatan Tempilang	329.488.923,00
Kecamatan Parittiga	212.233.237,00
Inspektorat Daerah	169.245.673,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	440.128.776,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	529.828.218,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	383.285.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	274.152.097,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00
BLUD	130.558.270,00
<b>Total</b>	<b>76.872.148.227,00</b>

### 3.1.5.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas yang tidak dapat digunakan secara bebas untuk membiayai belanja daerah. Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp77.944,00 merupakan saldo Rekening Dana Hibah di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp77.944,00 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/256/BPKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/14/4.4.1.1/2020 Tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

OPD	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2022 Rp
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dana Pendidikan Keluarga	BRI	355501023526532	77.944,00
<b>Total</b>				<b>77.944,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

### 3.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Kewajiban Jangka Pendek	22.112.824.936,70	11.804.953.533,13
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.112.824.936,70</b>	<b>11.804.953.533,13</b>

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 sebesar Rp22.112.824.936,70 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga tahun 2023 sebesar Rp565.000,00.
2. Utang belanja di OPD tahun 2023 sebesar Rp16.075.929.947,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Rp
1.	Utang Belanja Pegawai	25.449.757,00
2.	Utang Belanja Jasa	116.908.990,00
3.	Utang Belanja Modal	15.933.571.200,00
<b>Total</b>		<b>16.075.929.947,00</b>

3. Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2023 sebesar Rp5.895.319.734,58 merupakan utang belanja pada BLUD.
4. Pendapatan diterima tahun 2023 dimuka sebesar Rp141.010.255,12.

#### 3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Tahun 2023 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp565.000,00 merupakan Utang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Belum Disetor pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

#### 3.2.1.2 Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp16.075.929.947,00 merupakan utang belanja OPD. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal. Utang Belanja Pegawai merupakan utang atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN, Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang atas listrik, air, telepon, jasa service, jasa tenaga kesehatan dan internet sedangkan utang belanja modal merupakan utang pembangunan Sport Hall Lanjutan di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kepada PT. ASTHA SAKA – PT. SATRIAMAS KARYATAMA, KSO berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/444/DPUPR/2023 tentang Hutang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kepada PT. ASTHA SAKA – PT. SATRIAMAS, KSO tanggal 29 Desember 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Per OPD tahun 2023

OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Jasa	Utang Belanja Modal	Total Utang Belanja
	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	4	5	6=2+3+4+5
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.196.272,00	0,00	4.196.272,00
Dinas Kesehatan	0,00	43.842.880,00	0,00	43.842.880,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	7.374.476,00	15.933.571.200,00	15.940.945.676,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	3.408.368,00	0,00	3.408.368,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.781.322,00	91.170,00	0,00	11.872.492,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.559.490,00	0,00	5.559.490,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	761.237,00	0,00	761.237,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.088.505,00	0,00	0,00	1.088.505,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	5.647.864,00	0,00	5.647.864,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	91.170,00	0,00	91.170,00
Sekretariat Daerah	5.871.902,00	0,00	0,00	5.871.902,00
Sekretariat DPRD	0,00	22.203.847,00	0,00	22.203.847,00
Kecamatan Muntok	0,00	554.244,00	0,00	554.244,00
Inspektorat Kabupaten	6.708.028,00	2.903.123,00	0,00	9.611.151,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	8.228.648,00	0,00	8.228.648,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.800.523,00	0,00	4.800.523,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	7.245.678,00	0,00	7.245.678,00
<b>Total</b>	<b>25.449.757,00</b>	<b>116.908.990,00</b>	<b>15.933.571.200,00</b>	<b>16.075.929.947,00</b>

**3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp5.895.319.734,58 merupakan utang belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

**3.2.1.8 Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya**

Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya merupakan penerimaan yang masuk ke kas daerah, namun belum diketahui jenis penerimaannya. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya tahun 2023 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00.

**3.2.1.9 Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima secara kas, namun belum menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan diterima dimuka yang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

disajikan di neraca sebesar Rp141.010.255,12 merupakan penerimaan pajak reklame tahun 2023 yang telah diterima di kas daerah namun belum menjadi hak pemerintah kabupaten bangka barat dikarenakan pajak reklame tersebut merupakan pajak yang dibayar untuk masa pajak 2023 sampai dengan 2024 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Perhitungan pendapatan diterima di muka berdasarkan SIMDA Pendapatan Daerah.

Rincian Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 8.

### 3.2.2 **Kewajiban Jangka Panjang**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

### 3.3 **Ekuitas Dana**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

<b>Ekuitas Dana</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Ekuitas Dana</b>		
Ekuitas Dana	1.669.230.176.041,34	1.409.262.172.443,38



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**4. LAPORAN OPERASIONAL**

**4.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan Asli Daerah LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di neraca. Pendapatan Asli Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah-LO.

**4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan pajak daerah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di neraca. Pendapatan Pajak Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp28.377.469.192,87 dan tahun 2022 sebesar Rp23.601.437.236,63 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek.	Jenis Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
4.1.1.1.1	Pajak Hotel	164.261.141,00	65.351.001,00	98.910.140,00	151,35
4.1.1.1.2	Pajak Restoran	2.649.191.746,00	2.055.779.317,00	593.412.429,00	28,87
4.1.1.1.3	Pajak Hiburan	30.239.325,00	40.407.399,00	(10.168.074,00)	25,16
4.1.1.1.4	Pajak Reklame	302.098.588,87	378.924.927,83	(76.826.338,96)	20,27
4.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	14.463.924.454,00	12.465.654.940,00	1.998.269.514,00	16,03
4.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	857.591.412,00	381.669.363,00	475.922.049,00	124,69



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Kode Rek.	Jenis Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
4.1.1.1.7	Pajak Parkir	5.388.400,00	4.100.000,00	1.288.400,00	31,42
4.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	116.984.101,00	129.648.851,80	(12.664.750,80)	9,77
3.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	319.079.700,00	232.118.500,00	86.961.200,00	37,46
4.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	6.860.095.425,00	6.613.199.993,00	246.895.432,00	3,73
4.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.608.614.900,00	1.234.582.944,00	1.374.031.956,00	111,30
<b>Total</b>		<b>28.377.469.192,87</b>	<b>23.601.437.236,63</b>	<b>4.776.031.956,24</b>	<b>20,24</b>

Pendapatan pajak daerah LO tahun 2023 sebesar Rp28.377.469.192,87 jika disandingkan dengan pendapatan pajak LRA sebesar Rp26.506.009.473,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.871.459.719,87. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Penerbitan SKPD tahun 2023 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp2.352.482.977,00 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.
2. Pelunasan atas piutang pajak tahun 2022 yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp466.601.809,50 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.
3. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp126.588.807,49 yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun 2023 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.
4. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp141.010.255,12 yang telah diterima pembayarannya namun belum menjadi hak Pemerintah daerah sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.

Perbedaan nilai tersebut dijelaskan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Pendapatan Pajak yang masuk ke kas daerah s.d Bulan Desember 2023 (Pendapatan Pajak-LRA) (Rp)	Piutang Pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang s.d Tahun 2022 di tahun 2023 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 (Rp)	Pendapatan LO tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6
Pajak Hotel	164.261.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.261.141,00
Pajak Restoran	2.642.093.271,00	7.098.475,00	0,00	0,00	0,00	2.649.191.746,00
Pajak Hiburan	30.239.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239.325,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Jenis Pajak	Pendapatan Pajak yang masuk ke kas daerah s.d Bulan Desember 2023 (Pendapatan Pajak-LRA) (Rp)	Piutang Pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang s.d Tahun 2022 di tahun 2023 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 (Rp)	Pendapatan LO tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6
Pajak Reklame	294.189.774,00	50.261.575,00	27.931.312,50	126.588.807,49	141.010.255,12	302.098.588,87
Pajak Penerangan Jalan	14.463.924.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463.924.454,00
Pajak Parkir	5.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.400,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	807.064.162,00	50.527.250,00	0,00	0,00	0,00	857.591.412,00
Pajak Sarang Burung Walet	318.079.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	319.079.700,00
Pajak Air Tanah	109.316.975,00	9.318.032,00	1.650.906,00	0,00	0,00	116.984.101,00
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	5.062.837.371,00	2.234.277.645,00	437.019.591,00	0,00	0,00	6.860.095.425,00
BPHTB	2.608.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.614.900,00
<b>Total</b>	<b>26.506.009.473,00</b>	<b>2.352.482.977,00</b>	<b>466.601.809,50</b>	<b>126.588.807,49</b>	<b>141.010.255,12</b>	<b>28.377.469.192,87</b>

#### 4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari retribusi yang dipungut dari wajib retribusi berdasarkan subjek dan objek retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah atas pelunasan Piutang Retribusi Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp7.806.382.177,00 dan tahun 2022 sebesar Rp7.398.091.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan Kesehatan	3.280.462.700,00	3.165.820.800,00	114.641.900,00	3,62
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Pelayanan Persampahan	733.087.000,00	484.730.000,00	248.357.000,00	51,24
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	104.873.000,00	99.058.000,00	5.815.000,00	5,87
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Pelayanan Pasar	307.208.200,00	50.880.300,00	256.327.900,00	503,79



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.2.01.05	Pengujian Kendaraan Bermotor	99.128.700,00	141.618.600,00	(42.489.900,00)	30,00
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.536.000,00	45.276.600,00	(18.740.600,00)	41,39
4.1.2.02.11	Pelayanan Tera/ Tera Ulang	297.240.000,00	138.936.500,00	158.303.500,00	113,94
4.1.2.02.12	Pengendalian Menara Telekomunikasi	522.995.627,00	608.773.769,00	(85.778.142,00)	14,09
4.1.2.02.13	Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	100,00
4.1.2.02.14	Pasar Grosir/Pertokoan	263.732.846,00	166.188.850,00	97.543.996,00	58,69
4.1.2.02.15	Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.17	Retribusi Terminal	92.512.000,00	172.942.928,00	(80.430.928,00)	46,51
4.1.2.02.18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.040.073.000,00	1.244.054.000,00	(203.981.000,00)	16,40
4.1.2.02.19	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Vila	34.088.000,00	16.750.000,00	17.338.000,00	103,51
4.1.2.02.20	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	647.633.000,00	603.103.000,00	44.530.000,00	7,38
4.1.2.02.21	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.900.000,00	6.130.000,00	1.770.000,00	28,87
4.1.2.02.22	Izin Mendirikan Bangunan	348.912.104,00	452.828.263,00	(103.916.159,00)	(22,95)
4.1.2.02.24	Pemberian Izin usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.25	IMTA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.806.382.177,00</b>	<b>7.398.091.610,00</b>	<b>408.290.567,00</b>	<b>5,52</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Pendapatan retribusi daerah LO tahun 2023 sebesar Rp7.847.478.067,00 jika disandingkan dengan pendapatan retribusi LRA sebesar Rp7.822.366.408,00 terdapat perbedaan sebesar Rp25.111.659,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Penerbitan SKRD tahun 2023 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp42.715.826,0 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023;
2. Pelunasan Piutang tahun 2022 sebesar Rp11.079.167,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan retribusi LO tahun 2023;
3. Pendapatan retribusi tahun 2023 yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah tahun 2023 sebesar Rp6.525.000,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan retribusi LO tahun 2023.

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Pendapatan Retribusi yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Retribusi-LRA) (Rp)</b>	<b>Piutang Retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Pendapatan Retribusi Tahun 2023 yang Disetorkan Bendahara ke Kasda Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2 + 3 + 4</i>
Pelayanan Kesehatan	3.280.462.700,00	0,00	0,00	3.280.462.700,00
Pelayanan Persampahan	733.847.000,00	0,00	760.000,00	733.087.000,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	104.873.000,00	0,00	0,00	104.873.000,00
Pelayanan Pasar	307.208.200,00	0,00	0,00	307.208.200,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	99.128.700,00	0,00	0,00	99.128.700,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.536.000,00	0,00	0,00	26.536.000,00
Pelayanan Tera/ Tera Ulang	297.240.000,00	0,00	0,00	297.240.000,00
Pengendalian Menara Telekomunikasi	522.995.627,00	0,00	0,00	522.995.627,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Jenis Retribusi	Pendapatan Retribusi yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Retribusi-LRA) (Rp)	Piutang Retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan Retribusi Tahun 2023 yang Disetorkan Bendahara ke Kasda Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 (Rp)
Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Grosir/Pertokoan	229.084.396,00	35.548.450,00	900.000,00	263.732.846,00
Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	92.512.000,00	0,00	0,00	92.512.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.044.938.000,00	0,00	4.865.000,00	1.040.073.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	34.088.000,00	0,00	0,00	34.088.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	647.633.000,00	0,00	0,00	647.633.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Izin Mendirikan Bangunan	352.823.895,00	7.167.376,00	11.079.167,00	348.912.104,00
<b>Total</b>	<b>7.781.270.518,00</b>	<b>42.715.826,00</b>	<b>17.604.167,00</b>	<b>7.806.382.177,00</b>

#### 4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah diterima pembayarannya maupun yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang di neraca. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas pelunasan piutang Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Tahun 2023 terdapat pelunasan piutang Dividen tahun 2022 dan terdapat piutang yang timbul yaitu piutang atas dividen tahun buku tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp5.966.951.097,57.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
3.1.1.3.1	Dividen PT. BPD Sumsel Babel	5.966.951.097,57	6.844.661.601,00	(877.710.503,43)	12,82
3.1.1.3.2	Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>6.844.661.601,00</b>	<b>(877.710.503,43)</b>	<b>12,82</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp5.966.951.097,57 jika disandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp6.844.661.601,00 terdapat perbedaan sebesar Rp877.710.503,43. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Dividen PT. BPD Sumsel Babel tahun buku 2023 sebesar Rp5.966.951.097,57 yang belum diterima pembayarannya namun disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.
2. Pelunasan atas piutang dividen PT. BPD Sumsel Babel tahun 2022 yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp6.844.661.601,00 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2023.

Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp5.966.951.097,57 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LRA) (Rp)	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah s.d Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -LO Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dividen PT. BPD Sumsel Babel	6.844.661.601,09	5.966.951.097,57	6.844.661.601,09	5.966.951.097,57
Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>5.966.951.097,57</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan selain Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
4.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	606.364.500,00	5.362.039.000,00	(4.755.674.500,00)	88,69
4.1.1.4.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	92.755.000,00	311.369.750,00	(218.614.750,00)	70,21
4.1.1.4.3	Jasa Giro pada Kas Daerah	848.161.950,04	593.167.711,31	254.994.238,73	42,99
4.1.1.4.4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.792.589.004,00	705.616.407,00	2.086.972.597,00	295,77
4.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	109.401.533,00	107.102.591,00	2.298.942,00	2,15
4.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.408.236,00	0,00	1.408.236,00	100,00
4.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Restoran	7.246.840,00	4.053.967,00	3.192.873,00	78,76
4.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.167.065,00	870.715,00	9.296.350,00	1.067,67
4.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.152.225,00	1.097.280,00	54.945,00	5,01



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
4.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.440.900,00	419.700,00	1.021.200,00	243,32
4.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.115.200,00	0,00	1.115.200,00	100,00
4.1.1.4.12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.621.250,00	18.368.067,00	(7.746.817,00)	42,18
4.1.1.4.13	Pendapatan BLUD	27.797.930.494,49	27.126.727.611,65	671.202.882,84	2,47
4.1.1.4.14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.589.233.393,79	987.901.854,15	1.601.331.539,64	162,09
<b>Total</b>		<b>34.869.587.591,32</b>	<b>35.218.734.654,11</b>	<b>(349.147.062,79)</b>	<b>0,99</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp34.869.587.591,32 jika disandingkan dengan pendapatan pajak LRA sebesar Rp30.663.731.818,32 terdapat perbedaan sebesar Rp4.205.855.773,32,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp136.614.054,00 dan disajikan sebagai Pendapatan-LO tahun 2022 namun tidak disajikan pada Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA tahun 2023.
2. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp4.425.593.556,00 yang tidak disajikan pada pendapatan LRA tahun 2023 namun disajikan sebagai Pendapatan-LO tahun 2023.
3. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp73.123.729,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi pada BLUD yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2023 namun tidak disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023.
4. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Perbendaharaan yang disajikan pada



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

pendapatan LRA tahun 2023 namun tidak disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan penambahan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 dan dikurangi pelunasan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2022.

Perhitungan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp34.869.587.591,32 adalah sebagai berikut :

Uraian	Lain-Lain PAD yang Sah yang masuk ke kas daerah (Lain-Lain PAD yang Sah -LRA) (Rp)	Penerimaan yang diakui di LRA namun tidak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah- LO (Rp)	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah s.d Tahun 2023 (Rp)	Lain-Lain PAD yang Sah -LO Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=2-3+4-5
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	606.364.500,00	0,00	0,00	0,00	606.364.500,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	92.755.000,00	0,00	0,00	0,00	92.755.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	848.161.950,04	0,00	0,00	0,00	848.161.950,04
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.792.589.004,00	0,00	0,00	0,00	2.792.589.004,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	109.401.533,00	0,00	0,00	0,00	109.401.533,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.408.236,00	0,00	0,00	0,00	1.408.236,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	7.246.840,00	0,00	0,00	0,00	7.246.840,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.167.065,00	0,00	0,00	0,00	10.167.065,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.152.225,00	0,00	0,00	0,00	1.152.225,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1.440.900,00	0,00	0,00	0,00	1.440.900,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	1.115.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.621.250,00	0,00	0,00	0,00	10.621.250,00
Pendapatan BLUD	23.582.074.721,49	73.123.729,00	4.425.593.556,00	136.614.054,00	27.797.930.494,49



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Lain-Lain PAD yang Sah yang masuk ke kas daerah (Lain-Lain PAD yang Sah -LRA) (Rp)	Penerimaan yang diakui di LRA namun tidak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah- LO (Rp)	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah s.d Tahun 2023 (Rp)	Lain-Lain PAD yang Sah -LO Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.599.233.393,79	10.000.000,00	0,00	0,00	2.589.233.393,79
<b>Total</b>	<b>30.663.731.818,32</b>	<b>83.123.729,00</b>	<b>4.425.593.556,00</b>	<b>136.614.054,00</b>	<b>34.869.587.591,32</b>

#### 4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

##### 4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Bangka tidak mengakui adanya piutang, sehingga seluruh Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang masuk ke kas daerah diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>4.1.2.1.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>				
4.1.2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	32.962.225.000,00	30.868.337.324,00	2.093.887.676	6,78
4.1.2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPH 21 s.d. 29	8.351.791.000,00	6.485.731.859,00	1.866.059.141	28,77
	<b>Sub Total</b>	<b>41.314.016.000,00</b>	<b>37.354.069.183,00</b>	<b>3.959.946.817</b>	<b>10,60</b>
<b>4.1.2.1.2</b>	<b>Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>				
4.1.2.1.2.1	Bagi Hasil Pungutan Hasil Kehutanan	10.311.024.803,00	19.694.803,00	10.291.330.000	52.254,04
4.1.2.1.2.2	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	2.773.073.000,00	2.170.064.211,00	603.008.789	27,79
4.1.2.1.2.3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	1.336.624.000,00	1.170.228.940,00	166.395.060	14,22
4.1.2.1.2.4	Bagi Hasil Pertambangan Umum	91.491.950.197,00	183.783.603.021,00	(92.291.652.824)	50,22
	<b>Sub Total</b>	<b>105.912.672.000,00</b>	<b>187.143.590.975,00</b>	<b>(81.230.918.975)</b>	<b>43,41</b>
<b>4.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>434.631.148.780,00</b>	<b>419.082.296.005,00</b>	<b>15.548.852.775</b>	<b>3,71</b>
<b>4.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>143.869.048.932,00</b>	<b>86.607.050.142,00</b>	<b>57.261.998.790</b>	<b>66,12</b>
	<b>Total</b>	<b>725.726.885.712,00</b>	<b>730.187.006.305,00</b>	<b>(4.460.120.593)</b>	<b>0,61</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023 sebesar Rp725.726.885.712,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp706.546.362.625,00 terdapat perbedaan sebesar Rp19.180.523.087,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.683.677.723,00 yang terdiri dari Dana TDF 2022 sebesar Rp2.789.481.277,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023 dan Dana TDF 2023 sebesar Rp9.473.159.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023.
2. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp12.496.845.364,00 yang terdiri dari Dana TDF 2022 sebesar Rp11.040.310.636,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023 dan Dana TDF 2023 sebesar Rp23.537.156.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.460.120.593,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dari Pemerintah Pusat.

#### 4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang terdiri dari penerimaan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>				
4.1.2.2.1.1	Dana Insentif Daerah	26.956.967.000,00	6.374.370.000,00	20.582.597.000,00	322,90
4.1.2.2.1.2	Dana Desa	54.434.722.000,00	52.346.309.000,00	2.088.413.000,00	3,99
	<b>Total</b>	<b>81.391.689.000,00</b>	<b>58.720.679.000,00</b>	<b>22.671.010.000,00</b>	<b>38,61</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp81.391.689.000,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA tahun 2023 sebesar Rp81.391.689.000,00 tidak terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang tidak mengakui adanya piutang atas Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.671.010.000,00. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya transfer Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO**

Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah provinsi maupun yang belum diterima namun sudah diakui sebagai piutang serta Dana Bantuan dari Provinsi. Pendapatan bagi hasil pajak atas pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	28.466.382.905,00	30.504.110.421,00	(2.037.727.516,00)	6,68
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.823.897.886,00	10.912.115.902,00	-88.218.016,00	0,81
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.480.489.432,00	10.915.282.914,00	(434.793.482,00)	3,98
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	644.094.144,00	642.948.436,00	1.145.708,00	0,18
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.057.559.704,00	3.237.278.073,00	7.820.281.631,00	241,57
<b>Total</b>	<b>61.472.424.071,00</b>	<b>56.211.735.746,00</b>	<b>5.260.688.325,00</b>	<b>9,36</b>

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp61.472.424.071,00 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk ke kas daerah Tahun 2023 (Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LRA) (Rp)	Piutang Bagi Hasil Pajak yang timbul pada Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 atas Piutang Bagi Hasil Pajak s.d Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	28.241.068.290,00	5.968.543.899,00	5.743.229.284,00	28.466.382.905,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.039.998.484,00	1.448.310.955,00	1.664.411.553,00	10.823.897.886,00
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.015.695.311,00	2.357.227.050,00	1.892.432.929,00	10.480.489.432,00
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	616.594.774,00	143.476.676,00	115.977.306,00	644.094.144,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk ke kas daerah Tahun 2023 (Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LRA) (Rp)	Piutang Bagi Hasil Pajak yang timbul pada Tahun 2023 (Rp)	Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 atas Piutang Bagi Hasil Pajak s.d Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3-4</i>
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.131.329.323,00	0,00	2.073.769.619,00	11.057.559.704,00
<b>Total</b>	<b>63.044.686.182,00</b>	<b>9.917.558.580,00</b>	<b>11.489.820.691,00</b>	<b>61.472.424.071,00</b>

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
Bidang Paud/Tk, Non Formal	585.200.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Stunting Kelurahan	7.695.900	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Bantuan Satuan Pendidikan Non Formal	50.000.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Tutor, Pamong Belajar Dan Tenaga Kependidikan	72.000.000	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Pembangunan Stadion	14.999.970.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023
Insentif Guru Madrasah Diniyah Taklimiyah	73.500.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Pemuka Adat Kecamatan/Kelurahan	330.000.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023
		188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Guru Honorar Sd/Smp	1.315.200.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
Insentif Ustad/Ustadzah	1.421.625.000,00	188.44/1203/BAKUDA/2023,	2 Nopember 2023
Pemuka Agama Kecamatan/Kelurahan/Desa	875.997.100,00	188.44/2/BAKUDA/2023	16 Januari 2023
Dana Bantuan Spot Hall	15.799.970.000,00	188.44/2/BAKUDA/2023	2 Nopember 2023
<b>Total</b>	<b>35.531.158.000,00</b>		

Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 sebesar Rp97.003.582.071,00 jika disandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2023 sebesar Rp98.575.844.182 terdapat perbedaan sebesar Rp1.572.262.111,00. Perbedaan ini dikarenakan :

1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2023 sebesar Rp9.917.558.580,00 yang diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 namun tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2023.
2. Pelunasan atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2022 sebesar Rp11.489.820.691,00 yang tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 namun diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2023.

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya LO tahun 2023 sebesar Rp35.531.158.000,00 jika disandingkan dengan Transfer Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Provinsi-Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya LRA tahun 2023 sebesar Rp35.531.158.000,00 tidak terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan tidak terdapat piutang Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2022 dan tahun 2023.

#### 4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.3.1	Pendapatan Hibah	10.016.886.492,19	165.394.106.266,17	(155.377.219.773,98)	93,94
4.1.3.2	Pendapatan Lainnya	10.315.131.119,00	9.116.562.372,00	1.198.568.747,00	13,15
<b>Total</b>		<b>20.332.017.611,19</b>	<b>174.510.668.638,17</b>	<b>(154.178.651.026,98)</b>	<b>88,35</b>

##### 4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO merupakan pendapatan hibah berupa uang dan barang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan hibah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar Rp10.016.886.492,19 terdiri dari :

OPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	513.601.700,00
Dinas Kesehatan	5.422.038.677,19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.815.950,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	143.705.754,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.458.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	409.632.311,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.740.253.100,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	96.751.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.400.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.080.000,00
Kecamatan Muntok	11.700.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	452.000.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11.450.000,00
<b>Total</b>	<b>10.016.886.492,19</b>

Pendapatan Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp10.016.886.492,19 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA tahun 2023 sebesar Rp452.000.000 terdapat perbedaan sebesar Rp9.564.886.492,19 yang terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- Hibah barang sebesar Rp9.564.886.492,19 yang diterima oleh beberapa OPD yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA tahun 2023.

Daftar Hibah-LO tahun 2023 yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA

No	OPD	Hibah Persediaan (Rp)	Hibah Aset (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	513.601.700,00	513.601.700,00
2	Dinas Kesehatan	3.604.097.011,19	1.817.941.666,00	5.422.038.677,19
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.815.950,00	0,00	18.815.950,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	143.705.754,00	0,00	143.705.754,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.458.000,00	0,00	193.458.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	409.632.311,00	0,00	409.632.311,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	2.740.253.100,00	2.740.253.100,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	96.751.000,00	96.751.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
11	Kecamatan Muntok	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
12	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00
<b>Total</b>		<b>4.369.709.026,19</b>	<b>5.195.177.466,00</b>	<b>9.564.886.492,19</b>

#### 4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - LO

Pendapatan Dana Darurat adalah pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pendapatan Dana Darurat-LO.

#### 4.1.3.3 Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendapatan Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp10.315.131.119 jika dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya -LRA tahun 2023 sebesar Rp10.315.131.119 tidak terdapat perbedaan.

#### 4.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian beban tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	349.629.910.418,76	340.550.005.470,24	9.079.904.948,52	2,67
Beban Persediaan	36.174.761.874,90	48.613.313.236,35	(12.438.551.361,45)	25,59
Beban Jasa	249.054.577.266,51	230.598.754.366,04	18.455.822.900,47	8,00
Beban Pemeliharaan	13.006.450.961,86	12.465.617.905,56	540.833.056,30	4,34
Beban Perjalanan Dinas	38.817.437.709,50	33.232.728.223,68	5.584.709.485,82	16,80
Beban Hibah	39.591.090.910,00	15.049.649.575,00	24.541.441.335,00	163,07
Beban Bantuan Sosial	3.649.180.236,00	7.139.353.521,00	(3.490.173.285,00)	48,89
Beban Penyisihan Piutang Pajak	651.517.282,48	490.515.959,05	161.001.323,43	32,82
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	22.857.996,86	3.386.495,86	19.471.501,00	574,97
Beban Penyusutan Aset Tetap	98.828.989.703,00	99.344.155.134,00	(515.165.431,00)	0,52
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	53.214.161,00	50.534.278,00	2.679.883,00	5,30
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	1.068.905.465,00	1.030.005.101,00	38.900.364,00	3,78
Beban Transfer	117.647.054.237,00	114.215.469.015,00	3.431.585.222,00	3,00
<b>Total</b>	<b>948.195.948.222,87</b>	<b>902.783.488.280,78</b>	<b>45.412.459.942,09</b>	<b>5,03</b>

#### 4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban untuk pembayaran gaji PNS/CPNS, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Tunjangan Guru Bersertifikasi dan Non Sertifikasi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, baik yang telah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan namun sudah menjadi kewajiban. Beban pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp349.629.910.418,76 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pegawai -LO 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	169.955.798.999,00
2	Dinas Kesehatan	73.791.989.598,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.071.557.465,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	3.088.995.225,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	3.308.496.049,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.943.176.773,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2.529.173.678,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	10.401.108.587,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.697.462.405,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.437.285.526,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.322.913.682,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.212.454.293,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Pegawai -LO 2023 (Rp)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.660.714.726,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.857.612.127,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.861.785.605,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.372.978.071,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.712.602.878,00
18	Sekretariat Daerah	10.068.271.489,00
19	Sekretariat DPRD	14.506.016.457,00
20	Kecamatan Muntok	3.914.556.744,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	1.820.173.704,00
22	Kecamatan Jebus	2.504.824.349,00
23	Kecamatan Kelapa	2.736.143.533,00
24	Kecamatan Tempilang	1.840.643.370,00
25	Kecamatan Parittiga	1.797.685.837,00
26	Inspektorat Kabupaten	4.012.982.194,76
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.964.784.257,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.318.170.811,00
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.948.398.187,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.086.440.303,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.884.713.496,00
<b>Total</b>		<b>349.629.910.418,76</b>

Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1.	Belanja pegawai mapping - LRA	349.617.465.878,00
2.	Bertambah:	25.449.757,00
	Hutang pegawai 2023	25.449.757,00
3.	Berkurang :	13.005.216,24
	Hutang pegawai 2022	13.005.216,24
4.	<b>Beban Pegawai-LO 2023 1 + 2 - 3</b>	<b>349.629.910.418,76</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian Hutang Pegawai Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun 2023 dan Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	Hutang Pegawai Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun 2023 (Rp)	Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2023 (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	1.355.700,00	11.781.322,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	737.700,00	1.088.505,00
Sekretariat Daerah	3.945.733,00	5.871.902,00
Inspektorat	5.950.783,24	6.708.028,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.015.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.005.216,24</b>	<b>25.449.757,00</b>

#### 4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban atas penggunaan persediaan selama satu periode pelaporan. Beban persediaan didapat dengan menjumlahkan saldo persediaan awal tahun ditambah dengan pembelian persediaan tahun berjalan dan dikurangi dengan saldo persediaan akhir tahun. Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp36.174.761.874,90.

Rincian Beban Persediaan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2023	Beban Persediaan – LO 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.977.318.183,00	8.431.985.400,00	(6.454.667.217,00)	76,55
2	Dinas Kesehatan	21.953.308.949,90	23.464.259.693,35	(1.510.950.743,45)	6,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.325.063.082,00	557.066.500,00	767.996.582,00	137,86
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	495.870.100,00	7.174.257.898,00	(6.678.387.798,00)	93,09
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	228.721.250,00	208.414.926,00	20.306.324,00	9,74
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	268.433.234,00	162.435.171,00	105.998.063,00	65,26
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	205.223.450,00	210.523.960,00	(5.300.510,00)	2,52
8	Dinas Pertanian dan Pangan	783.393.586,00	592.744.894,00	190.648.692,00	32,16
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.892.544.730,00	1.371.452.260,00	521.092.470,00	38,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	547.063.689,00	564.276.970,00	(17.213.281,00)	3,05
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	537.990.668,00	386.703.960,00	151.286.708,00	39,12



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2023	Beban Persediaan – LO 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	162.859.950,00	93.838.500,00	69.021.450,00	73,55
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	171.712.250,00	158.900.760,00	12.811.490,00	8,06
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	204.238.790,00	153.052.700,00	51.186.090,00	33,44
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	435.227.868,00	452.815.715,00	(17.587.847,00)	3,88
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.090.448,00	140.686.674,00	42.403.774,00	30,14
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	202.252.900,00	127.615.350,00	74.637.550,00	58,49
18	Sekretariat Daerah	1.903.679.600,00	1.731.777.081,00	171.902.519,00	9,93
19	Sekretariat DPRD	560.812.500,00	720.134.421,00	(159.321.921,00)	22,12
20	Kecamatan Muntok	285.017.420,00	437.577.698,00	(152.560.278,00)	34,86
21	Kecamatan Simpang Teritip	101.635.200,00	87.050.400,00	14.584.800,00	16,75
22	Kecamatan Jebus	121.226.000,00	53.590.050,00	67.635.950,00	126,21
23	Kecamatan Kelapa	320.654.850,00	179.832.300,00	140.822.550,00	78,31
24	Kecamatan Tempilang	99.521.050,00	82.908.875,00	16.612.175,00	20,04
25	Kecamatan Paritiga	131.490.000,00	120.649.850,00	10.840.150,00	8,98
26	Inspektorat Kabupaten	94.293.100,00	84.312.600,00	9.980.500,00	11,84
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	108.435.500,00	130.629.950,00	(22.194.450,00)	16,99
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	302.837.400,00	251.852.340,00	50.985.060,00	20,24
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	268.492.800,00	225.438.990,00	43.053.810,00	19,09
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	157.518.000,00	142.439.300,00	15.078.700,00	10,59
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	144.835.327,00	114.088.050,00	30.747.277,00	26,95
<b>Total</b>		<b>36.174.761.874,90</b>	<b>48.613.313.236,35</b>	<b>(12.438.551.361,45)</b>	<b>25,59</b>

Tahun 2023 terdapat penurunan beban persediaan sebesar Rp12.438.551.361,45. Penurunan ini dikarenakan menurunnya realisasi belanja barang yang menjadi persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Beban Persediaan Mapping - LRA</b>	<b>60.092.658.704,72</b>
2	<b>Bertambah :</b>	<b>27.972.345.167,82</b>
	Persediaan Awal 2023	17.130.984.042,55
	Persediaan Dari Hibah	4.369.709.026,19
	Reklas dari belanja Hibah	5.113.212.660,00
	Penerimaan Persediaan dropping	343.495.924,00
	Hutang Persediaan 2023	295.810.915,08
	Reklas Dari Belanja Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	461.038.000,00
	Reklas Dari Beban Jasa berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	58.974.600,00
	Reklas Dari Beban Pemeliharaan berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	199.120.000,00
3	<b>Berkurang :</b>	<b>51.890.241.997,64</b>
	Persediaan Akhir 2023	22.881.952.049,64
	Hutang Persediaan 2022	346.414.705,00
	Reklas Ke Beban Jasa berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	25.401.723.320,00
	Reklas Ke Beban Pemeliharaan berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	50.676.000,00
	Reklas Ke Beban Hibah berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	99.811.000,00
	Reklas Ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	2.766.168.999,00
	Dropping Persediaan Ke OPD	343.495.924,00
4	<b>Beban Persediaan-LO 2023 1 + 2 - 3</b>	<b>36.174.761.874,90</b>

Dropping persediaan antar OPD merupakan penyaluran persediaan yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Beban persediaan pada OPD yang menyalurkan persediaan tidak dicatat sebagai beban persediaan, namun dicatat pada beban persediaan OPD yang menerima persediaan sebesar pemakaian.

#### 4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa selama satu periode pelaporan. Beban jasa tahun 2023 sebesar Rp249.054.577.266,51.

Rincian beban jasa tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Jasa-LO 2023 (Rp)	Beban Jasa-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	72.931.141.848,00	48.526.049.257,00	24.405.092.591,00	50,29



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Jasa-LO 2023 (Rp)	Beban Jasa-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Dinas Kesehatan	76.668.542.345,51	85.682.011.293,04	(9.013.468.947,53)	10,52
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.098.408.208,00	10.302.198.311,00	(4.203.790.103)	40,80
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	4.875.145.662,00	4.074.510.012,00	800.635.650	19,65
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	5.039.611.003,00	4.868.006.864,00	171.604.139	3,53
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.735.687.800,00	1.565.159.560,00	170.528.240	10,90
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	3.869.951.263,00	6.265.848.358,00	(2.395.897.095)	38,24
8	Dinas Pertanian dan Pangan	2.690.362.337,00	3.090.215.242,00	(399.852.905)	12,94
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.995.971.052,00	6.983.233.266,00	12.737.786	0,18
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.572.069.382,00	1.755.059.169,00	(182.989.787)	10,43
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.831.504,00	2.603.112.395,00	(102.280.891)	3,93
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.937.839.715,00	3.890.745.882,00	47.093.833	1,21
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.698.382.769,00	2.384.632.566,00	2.313.750.203	97,03
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.388.405.506,00	1.267.465.012,00	120.940.494	9,54
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.704.329.909,00	3.702.246.206,00	3.002.083.703	81,09
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.658.706.454,00	1.698.870.262,00	(40.163.808)	2,36
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.043.313.343,00	798.890.737,00	244.422.606	30,60
18	Sekretariat Daerah	16.562.475.631,00	12.535.398.189,00	4.027.077.442	32,13
19	Sekretariat DPRD	5.839.944.260,00	5.542.088.876,00	297.855.384	5,37
20	Kecamatan Muntok	5.468.504.756,00	5.011.762.017,00	456.742.739	9,11



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Jasa-LO 2023 (Rp)	Beban Jasa-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
21	Kecamatan Simpang Teritip	684.305.000,00	655.585.200,00	28.719.800	4,38
22	Kecamatan Jebus	859.036.500,00	955.893.450,00	(96.856.950,00)	10,13
23	Kecamatan Kelapa	1.647.867.259,00	1.889.883.872,00	(242.016.613)	12,81
24	Kecamatan Tempilang	619.131.132,00	696.089.000,00	(76.957.868)	11,06
25	Kecamatan Parittiga	984.543.050,00	1.019.980.352,00	(35.437.302)	3,47
26	Inspektorat Kabupaten	828.747.483,00	943.002.458,00	(114.254.975)	12,12
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1.791.012.234,00	2.281.578.046,00	(490.565.812)	21,50
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.209.016.096,00	3.100.004.297,00	(890.988.201)	28,74
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.300.576.390,00	2.684.273.889,00	(383.697.499)	14,29
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.584.105.176,00	2.576.391.040,00	7.714.136	0,30
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.266.612.199,00	1.248.569.288,00	1.018.042.911	81,54
<b>Total</b>		<b>249.054.577.266,51</b>	<b>230.598.754.366,04</b>	<b>18.455.822.900,47</b>	<b>8,00</b>

Tahun 2023 terdapat kenaikan beban jasa sebesar Rp18.455.822.900,47 Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi belanja jasa pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja jasa mapping- LRA	225.542.732.984,41
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>31.565.560.587,50</b>
	Hutang jasa tahun 2023	5.349.126.089,50
	Beban jasa dari hibah dana keluarga pada Dinas Dikpora	66.000,00
	Reklas dari belanja hibah	124.073.000,00
	Reklas dari beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	25.401.723.320,00
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	690.572.178,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>8.053.715.845,40</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Hutang jasa tahun 2022	6.774.664.519,40
	Reklas ke beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	58.974.600,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	1.220.076.726,00
4.	<b>Beban Jasa - LO 2023 1 + 2 - 3</b>	<b>249.054.577.266,51</b>

#### 4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan aset dengan tujuan untuk menambah masa manfaat dan menambah nilai aset. Beban pemeliharaan tahun 2023 adalah sebesar Rp13.006.450.961,86.

Rincian beban pemeliharaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2023 (Rp)	Beban Pemeliharaan-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.734.898.042,00	1.732.706.853,00	2.191.189,00	0,13
2	Dinas Kesehatan	1.171.324.904,86	817.159.926,56	354.164.978,30	43,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.276.150.349,00	6.212.764.100,00	(936.613.751,00)	15,08
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	663.571.466,00	481.464.717,00	182.106.749,00	37,82
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	135.441.250,00	11.295.000,00	124.146.250,00	1.099,13
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00	13.170.000,00	(8.170.000,00)	62,03
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	87.723.560,00	4.200.000,00	83.523.560,00	1.988,66
8	Dinas Pertanian dan Pangan	120.314.500,00	113.389.000,00	6.925.500,00	6,11
9	Dinas Lingkungan Hidup	151.738.564,00	616.658.000,00	(464.919.436,00)	75,39
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.330.775,00	32.336.280,00	32.994.495,00	102,04



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2023 (Rp)	Beban Pemeliharaan-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.394.000,00	41.684.000,00	36.710.000,00	88,07
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.290.384,00	83.514.534,00	(50.224.150,00)	60,14
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	411.936.842,00	160.287.892,00	251.648.950,00	157,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.964.000,00	10.000.000,00	35.964.000,00	359,64
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97.882.650,00	20.126.000,00	77.756.650,00	386,35
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	171.689.740,00	49.108.000,00	122.581.740,00	249,62
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	73.975.000,00	8.058.000,00	65.917.000,00	818,03
18	Sekretariat Daerah	1.139.796.501,00	1.396.653.000,00	(256.856.499,00)	18,39
19	Sekretariat DPRD	784.307.400,00	342.986.000,00	441.321.400,00	128,67
20	Kecamatan Muntok	133.426.034,00	42.651.903,00	90.774.131,00	212,83
21	Kecamatan Simpang Teritip	33.250.000,00	5.000.000,00	28.250.000,00	565,00
22	Kecamatan Jebus	38.370.000,00	61.839.700,00	(23.469.700,00)	37,95
23	Kecamatan Kelapa	47.125.900,00	30.645.000,00	16.480.900,00	53,78
24	Kecamatan Tempilang	48.925.000,00	5.200.000,00	43.725.000,00	840,87
25	Kecamatan Parittiga	91.997.500,00	3.420.000,00	88.577.500,00	2.589,99
26	Inspektorat Kabupaten	14.676.000,00	2.450.000,00	12.226.000,00	499,02
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	139.995.000,00	0,00	139.995.000,00	100,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.655.000,00	94.565.500,00	(45.910.500,00)	48,55
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	16.690.600,00	3.486.500,00	13.204.100,00	378,72
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	133.760.000,00	68.798.000,00	64.962.000,00	94,42



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2023 (Rp)	Beban Pemeliharaan-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>13.006.450.961,86</b>	<b>12.465.617.905,56</b>	<b>540.833.056,30</b>	<b>4,34</b>

Tahun 2023 terdapat kenaikan beban pemeliharaan sebesar Rp540.833.056,30. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1.	Belanja Pemeliharaan mapping-LRA	16.362.774.765,86
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>2.667.758.944,00</b>
	Reklas dari beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	50.676.000,00
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	2.617.082.944,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>6.024.082.748,00</b>
	Reklas ke beban Persediaan & Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	199.120.000,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	5.824.962.748,00
4.	<b>Beban Pemeliharaan -LO 2023 1 + 2 - 3</b>	<b>13.006.450.961,86</b>

#### 4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban atas perjalanan dinas pegawai dalam satu periode pelaporan, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas tahun 2023 adalah sebesar Rp38.817.437.709,50.

Rincian beban perjalanan dinas tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2023 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.225.820.910,00	1.313.710.647,00	(87.889.737)	6,69
2	Dinas Kesehatan	5.123.268.626,50	6.710.988.270,68	(1.587.719.644,18)	23,66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.648.972,00	732.277.201,00	(2.628.229)	0,36
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	600.198.929,00	482.182.494,00	118.016.435	24,48



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2023 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	829.918.812,00	491.081.177,00	338.837.635	69,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.841.881,00	478.991.000,00	(101.149.119)	21,12
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	725.301.465,00	671.898.677,00	53.402.788	7,95
8	Dinas Pertanian dan Pangan	579.745.785,00	561.400.804,00	18.344.981	3,27
9	Dinas Lingkungan Hidup	623.403.228,00	205.884.400,00	417.518.828	202,79
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.964.375,00	202.701.251,00	189.263.124	93,37
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.270.167.307,00	1.138.341.543,00	1.131.825.764	99,43
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	506.198.121,00	583.512.796,00	(77.314.675)	13,25
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	863.126.029,00	396.181.541,00	466.944.488	117,86
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	536.338.235,00	378.608.499,00	157.729.736	41,66
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	615.366.395,00	331.139.892,00	284.226.503	85,83
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289.164.621,00	229.055.529,00	60.109.092	26,24
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	362.380.024,00	201.360.474,00	161.019.550	79,97
18	Sekretariat Daerah	2.423.377.815,00	2.058.864.905,00	364.512.910	17,70
19	Sekretariat DPRD	14.591.173.857,00	11.986.816.294,00	2.604.357.563	21,73
20	Kecamatan Muntok	211.137.502,00	368.799.074,00	(157.661.572)	42,75
21	Kecamatan Simpang Teritip	94.977.000,00	89.847.000,00	5.130.000	5,71
22	Kecamatan Jebus	102.163.500,00	126.975.000,00	(24.811.500)	19,54
23	Kecamatan Kelapa	143.900.720,00	173.069.800,00	(29.169.080)	16,85



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2023 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
24	Kecamatan Tempilang	116.226.780,00	106.448.800,00	9.777.980	9,19
25	Kecamatan Parittiga	109.883.300,00	115.719.800,00	(5.836.500)	5,04
26	Inspektorat Kabupaten	1.603.558.714,00	1.553.672.024,00	49.886.690	3,21
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	624.431.687,00	319.693.603,00	304.738.084	95,32
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	706.685.926,00	463.012.334,00	243.673.592	52,63
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	357.470.262,00	247.697.836,00	109.772.426	44,32
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	486.156.353,00	319.693.558,00	166.462.795	52,07
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	596.440.578,00	193.102.000,00	403.338.578	208,87
<b>Total</b>		<b>38.817.437.709,50</b>	<b>33.232.728.223,68</b>	<b>5.584.709.485,82</b>	<b>16,80</b>

Tahun 2023 terdapat kenaikan beban perjalanan dinas sebesar Rp5.584.709.485,82. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas mapping- LRA	38.822.407.709,50
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>4.970.000,00</b>
	Reklas ke belanja aset BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	4.970.000,00
4.	<b>Beban Perjalanan Dinas-LO 2023 1+2-3</b>	<b>38.817.437.709,50</b>

#### 4.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp39.591.090.910,00, jika dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA tahun 2023 sebesar Rp45.044.038.570,00 terdapat perbedaan sebesar Rp5.452.947.660,00 yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

- Belanja Modal dan belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang direklas menjadi beban hibah berdasarkan berita acara rekonsiliasi Pengurus Barang dengan PPK OPD
- Belanja Hibah berupa barang yang belum diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Beban Hibah tahun 2023 adalah sebesar Rp39.591.090.910,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Hibah-LO 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	18.979.172.410,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.417.424.000,00
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	642.964.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	352.460.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	122.449.650,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.950.000,00
7	Sekretariat Daerah	4.638.654.650,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.436.016.200,00
<b>Total</b>		<b>39.591.090.910,00</b>

#### 4.2.9 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp3.649.180.236,00, jika disandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA tahun 2023 sebesar Rp 3.649.180.236,00, tidak terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial.

Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2023 (Rp)	Beban Bantuan Sosial-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	360.000.000,00	290.000.000,00	70.000.000,00	24,14
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1.424.105.736,00	1.271.376.421,00	152.729.315,00	12,01
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	1.665.074.500,00	5.400.326.700,00	(3.735.252.200,00)	69,17



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2023 (Rp)	Beban Bantuan Sosial-LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	100,00
5	Sekretariat Daerah	195.750.000,00	158.000.000,00	37.750.000,00	23,89
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.250.000,00	3.650.400,00	599.600,00	16,43
<b>Total</b>		<b>3.649.180.236,00</b>	<b>7.139.353.521,00</b>	<b>(3.490.173.285,00)</b>	<b>48,89</b>

Tahun 2023 terdapat penurunan beban bantuan sosial sebesar Rp3.490.173.285,00. Penurunan ini dikarenakan menurunnya realisasi belanja bantuan sosial pada Organisasi Perangkat Daerah.

#### 4.2.10 **Beban Penyisihan Piutang Pajak**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2023 adalah sebesar Rp651.517.282,48. Perhitungan beban penyisihan piutang pajak telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Pajak di Neraca.

Beban penyisihan piutang pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Pajak	Beban Penyisihan Piutang Pajak-LO 2023 (Rp)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Restoran	35.492,38
	Pajak Reklame	6.399.781,59
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	252.636,25
	Pajak Sarang Burung Walet	5.000,00
	Pajak Air Tanah	635.894,16
	Pajak Bumi dan Bangunan	644.188.478,10
<b>Total</b>		<b>651.517.282,48</b>

#### 4.2.11 **Beban Penyisihan Piutang Retribusi**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp22.857.996,86. Perhitungan beban penyisihan piutang retribusi telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Retribusi di Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Beban penyisihan piutang retribusi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Retribusi	Beban Penyisihan PiutangRetribusi-LO 2023 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan	4.693.255,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.164.741,86
<b>Total</b>		<b>22.857.996,86</b>

**4.2.12 Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil**

Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil.

**4.2.13 Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal**

Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal, hal ini dikarenakan Piutang Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal telah disisihkan seluruhnya.

**4.2.14 Beban Penyisihan Piutang Lainnya**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

**4.2.15 Beban Penyusutan Aset Tetap**

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap Tahun 2023 adalah sebesar Rp99.897.895.168,00. Beban penyusutan aset tetap akan menambah akumulasi penyusutan. Contoh perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap telah dijelaskan pada CALK Aset Tetap. Nilai Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp99.897.895.168,00 diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Rincian Beban penyusutan aset tetap Tahun 2023 per OPD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap- LO 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.990.019.882,00
2	Dinas Kesehatan	13.151.687.440,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.191.463.562,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	2.702.188.768,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	366.617.842,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.780.846,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	58.173.258,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.118.337.122,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	959.527.102,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	432.971.700,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	425.832.969,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	475.488.249,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	775.209.653,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.089.613,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	879.234.738,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	502.022.454,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	172.139.062,00
18	Sekretariat Daerah	2.587.142.476,00
19	Sekretariat DPRD	1.005.843.698,00
20	Kecamatan Muntok	431.680.155,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	99.717.760,00
22	Kecamatan Jebus	143.890.284,00
23	Kecamatan Kelapa	274.246.346,00
24	Kecamatan Tempilang	86.575.255,00
25	Kecamatan Parittiga	117.074.269,00
26	Inspektorat Kabupaten	22.596.290,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	123.616.968,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.950.440,00
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	130.969.008,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap- LO 2023 (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	302.372.741,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.435.218,00
<b>Total</b>		<b>99.897.895.168,00</b>

#### 4.2.16 **Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan beban amortisasi atas aset tak berwujud selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD. Beban amortisasi aset tak berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp53.214.161,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Amortisasi-LO 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.116.667,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	10.900.025,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.850.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.293.303,00
5	Kecamatan Muntok	4.583.333,00
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.470.833,00
<b>Total</b>		<b>53.214.161,00</b>

#### 4.2.17 **Beban Penyusutan Aset Lain-Lain**

Beban penyusutan aset lain-lain merupakan beban penyusutan atas aset lain-lain selama satu periode pelaporan. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyusutan atas Aset Lain-Lain sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### 4.2.18 **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp117.647.054.237,00. Rincian Beban Transfer Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Transfer ke Desa	113.918.625.488,00
2	Beban Bagi Hasil ke Desa	3.728.428.749,00
<b>Total</b>		<b>117.647.054.237,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Beban Transfer disajikan sebesar realisasi Transfer ke Desa dan Bagi Hasil ke Desa pada Laporan Realisasi Anggaran.

**4.2.19 Beban Lain-Lain**

Beban Lain-Lain merupakan beban yang bukan berasal dari belanja operasi dan tidak dianggarkan dalam APBD. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Lain-Lain.

**4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya dan defisit penghentian aset. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp1.397.729.645,00 sedangkan pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp5.069.729.968,00. Defisit sebesar Rp1.397.729.645,00 disebabkan laba operasional BUMD sebesar Rp186.475.925,00 dan Defisit Penghapusan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp1.584.205.570,00.

**4.3.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Tahun 2023 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp186.475.925,00 yang merupakan laba pada Perumda Air Minum Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp200.021.578,00 dan rugi Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera sebesar Rp13.545.653,00.

**4.3.2 Defisit Penghentian Aset**

Tahun 2023 Defisit penghentian Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp1.584.205.570,00 yang merupakan penghapusan aset tetap.

**4.4 Pos Luar Biasa**

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pos Luar Biasa.

**4.5 Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Tahun 2023 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp51.880.886.585,08.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**5. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Laporan Arus Kas tahun 2023 tidak dikonsolidasi dengan arus kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan arus kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporan Arus Kas Tahun 2023 hanya menyajikan arus kas di Kas Daerah dan arus kas BLUD.

**5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

**5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	26.506.009.473,00	21.724.751.484,90
Penerimaan Retribusi Daerah	7.781.270.518,00	7.355.787.438,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.844.661.601,09	5.306.960.199,78
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.663.731.818,32	45.030.240.728,11
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	34.630.338.277,00	34.564.587.906,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	93.415.826.636,00	176.103.280.339,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	434.631.148.780,00	419.082.296.005,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	104.932.936.254,00	86.607.050.142,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	81.391.689.000,00	58.720.679.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	63.044.686.182,00	54.567.478.715,00
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi	35.531.158.000,00	4.966.800.000,00
Penerimaan Hibah	452.000.000,00	0,00
Penerimaan Lainnya / JKN	0,00	9.116.562.372,00
<b>Total</b>	<b>919.825.456.539,41</b>	<b>923.146.474.329,79</b>

**5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pembayaran Pegawai	343.907.680.513,00	335.609.309.837,00
Pembayaran Barang	311.937.433.654,49	288.533.459.532,36
Pembayaran Hibah	37.096.716.160,00	10.767.262.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pembayaran Bantuan Sosial	3.649.180.236,00	8.003.955.521,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	113.918.625.488,00	110.181.743.500,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil ke Desa	3.728.428.749,00	4.033.725.515,00
<b>Total</b>	<b>814.238.064.800,49</b>	<b>757.129.456.280,36</b>

Arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp105.587.391.738,92. Penyajian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2023 telah menyajikan Pendapatan BLUD, begitu juga dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang bersumber dari Dana BLUD telah disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi. Sedangkan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN serta Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN untuk Tingkat SD dan SMP Negeri tidak disajikan ke RKUD, sehingga tidak disajikan dalam komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.

## 5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

### 5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	24.642.389.709,86	23.817.842.699,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	61.751.185.849,07	23.708.809.580,03
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.901.977.241,00	23.794.316.695,30
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.226.147.275,00	1.153.600.081,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>156.521.700.074,93</b>	<b>72.474.569.055,33</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Arus Kas bersih aktivitas investasi sebesar (Rp156.521.700.074,93). Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa mendatang. Pada tahun 2023, penyajian nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana BLUD disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi. Sedangkan untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Dana BOS APBN tidak disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.

### 5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

#### 5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Kas Tahun Lalu	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	6.800.000,00	36.676.250,00
Konversi Nilai Penyertaan Modal	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>36.676.250,00</b>

#### 5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp 6.800.000,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

**5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18.363.963.151,00	18.377.256.175,00
<b>Total</b>	<b>18.363.963.151,00</b>	<b>18.377.256.175,00</b>

**5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18.364.018.178,00	18.377.201.148,00
<b>Total</b>	<b>18.364.018.178,00</b>	<b>18.377.201.148,00</b>

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran PFK pada Bendahara Umum Daerah yaitu penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, Taperum, dan Iuran Jaminan Kesehatan.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak dipengaruhi oleh anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih aktivitas non anggaran tahun 2023 sebesar Rp55.027,00 yang merupakan penyetoran PFK tahun sebelumnya.

**5.4.2 Saldo Kas**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(50.927.563.363,01)</b>	<b>93.579.180.271,10</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>107.144.707.626,71</b>	<b>13.565.582.382,61</b>
- Saldo Awal Kas di Kas Daerah BUD	93.149.349.623,97	7.236.624.850,88
- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	52.662.284,00	1.300,00
- Saldo Awal Kas di BLUD	13.942.695.718,74	6.328.956.231,73
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara JKN</b>	<b>9.290.072,00</b>	<b>343.280.885,00</b>
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>0,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Saldo Awal Kas Lainnya</b>	<b>55.027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Awal Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah</b>	<b>37.804.072,00</b>	<b>437.825.113,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>53.757.322.864,70</b>	<b>107.144.707.626,71</b>
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	43.464.892.787,89	93.149.349.623,97
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	52.662.284,00
- Saldo Akhir Kas di BLUD	10.292.430.076,81	13.942.695.718,74
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN</b>	<b>206.776.381,00</b>	<b>9.290.072,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.000,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>2.462.257.108,00</b>	<b>55.027,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah</b>	<b>140.827.342,00</b>	<b>37.804.072,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>56.567.183.695,70</b>	<b>107.198.381.797,71</b>

Saldo Akhir Kas yang disajikan pada LAK sebesar Rp56.567.183.695,70 sedangkan SiLPA LRA sebesar Rp56.562.972.013,70 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.211.682,00 yang terdiri dari :

- Saldo Kas Lainnya sebesar Rp565.000,00 yang merupakan Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetor;
- Koreksi kurang catat Kas Lainnya di Sekolah tahun 2022 sebesar Rp1.831.000,00;
- Penerimaan setoran pengembalian kerugian daerah sebesar Rp1.815.682,00 pada Kas Daerah yang seharusnya disetor ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Sejiran Setason.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Perubahan ekuitas tersebut dikarenakan surplus/defisit operasional tahun berjalan dan akibat dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

**6.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas awal tahun 2023 merupakan ekuitas akhir tahun 2022 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal 2023 adalah sebesar Rp1.699.264.211.713,21.

**6.2. Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit–LO merupakan surplus/defisit operasional tahun berjalan yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional. Tahun 2023 Surplus/Defisit-LO adalah sebesar Rp51.880.886.585,08.

**6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mengakibatkan perubahan nilai aset sehingga mempengaruhi nilai ekuitas. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp81.914.922.256,95 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(31.616.296.898,93)	(144.539.343,66)
Penyesuaian Penyisihan Piutang	96.354.001,98	153.191.151,68
Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi	(3.327.417.005,00)	(2.684.827.003,00)
Koreksi Nilai	(47.067.562.355,00)	102.871.617.922,60
<b>Total</b>	<b>(81.914.922.256,95)</b>	<b>100.195.442.727,62</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar Rp31.616.296.898,93 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pembulatan Aset	(456,93)
- Setoran Pengembalian Kerugian Daerah	1.815.682,00
- Hibah Aset	(31.618.112.124,00)
<b>Total</b>	<b>(31.616.296.898,93)</b>

- Pembulatan merupakan pembulatan nilai perolehan aset, baik pembulatan nilai keatas maupun pembulatan nilai kebawah.
- Setoran Pengembalian Kerugian Daerah merupakan setoran pengembalian kerugian daerah BLUD RSUD Sejiran Setason yang diterima pada kas daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

yang seharusnya disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Sejiran Setason.

- Hibah aset merupakan hibah atas aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada pihak lain.

Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp96.354.001,98 merupakan pelunasan atas piutang yang telah dilakukan penyisihan dan koreksi catat penyisihan piutang tahun sebelumnya dengan rician sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
- Pelunasan piutang pajak	92.463.001,98
- Koreksi catat penyisihan piutang	(2.909.000,00)
- Pelunasan piutang bagian lancar	6.800.000,00
<b>Total</b>	<b>96.354.001,98</b>

Penyesuaian Aset dibawah kapitalisasi merupakan penyesuaian atas pengadaan tahun berjalan yang nilai pengadaannya dibawah nilai kapitalisasi aset berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Koreksi Nilai tahun 2023 sebesar Rp47.067.562.355,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset dan akumulasi penyusutan aset dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Rp</b>
- Koreksi pencatatan aset	185.059.999,00
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan aset	(47.231.949.742,00)
- Koreksi catat piutang pajak tahun lalu	(910.000,00)
- Koreksi catat saldo Kas Lainnya di Sekolah	1.831.000,00
- Koreksi catat utang tahun 2022	(21.593.612,00)
<b>Total</b>	<b>(47.067.562.355,00)</b>

#### 6.4. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar Rp1.669.230.176.041,34.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**Penjelasan Lainnya**

Penjelasan Lainnya adalah penjelasan atas kejadian di tahun 2023 maupun hal –hal yang perlu dijelaskan terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2023 yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 yang disajikan merupakan laporan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sejiran Setason. Sedangkan Arus Kas Dana BOS dan Arus Kas Dana JKN tidak dikonsolidasi pada Laporan Arus Kas.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, terdapat lebih dan kurang salur Dana Transfer Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Lebih Bayar			Kurang Bayar		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	380.923,00	0,00	0,00
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.188.735,00
3	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.006.408,00
4	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404.741.992,00
5	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan pungut Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781.309,00
6	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.632.194,00
8	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	270.367.533,00	0,00
10	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	0,00	398.056.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No.	Uraian	Lebih Bayar			Kurang Bayar		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
11	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Minyak Bumi Tahun 2021	0,00	13.821.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral dan Batubara Iuran Tetap Tahun 2021	0,00	4.918.886.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral dan Batubara Royalti Tahun 2021	0,00	10.715.886.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2021	0,00	311.625.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2021	0,00	38.420.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Rata Tahun 2022	0,00	0,00	69.373.552,00	0,00	0,00	0,00
17	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Perhutanan Tahun 2022	0,00	0,00	79.773.162,00	0,00	0,00	0,00
18	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Migas Tahun 2022	0,00	0,00	521.865.685,00	0,00	0,00	0,00
19	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Sektor Lainnya Tahun 2022	0,00	0,00	91.864.030,00	0,00	0,00	0,00
20	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Perhutanan(Pungut) Tahun 2022	0,00	0,00	3.045.097,00	0,00	0,00	0,00
21	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Migas(pungut) Tahun 2022	0,00	0,00	18.121.585,00	0,00	0,00	0,00
22	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Sektor Lainnya Tahun 2022	0,00	0,00	3.190.160,00	0,00	0,00	0,00
23	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Iuran Tetap Tahun 2022	0,00	0,00	862.717.436,00	0,00	0,00	0,00
24	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Royalti Tahun 2022	0,00	0,00	34.933.057.203,00	0,00	0,00	0,00
25	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2022	0,00	0,00	295.260.621,00	0,00	0,00	0,00
26	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2022	0,00	0,00	6.151.758,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>16.396.696.443,00</b>	<b>36.884.420.289,00</b>	<b>380.923,00</b>	<b>270.367.533,00</b>	<b>13.416.350.638,00</b>

3. Nilai Jaminan yang diagunkan dalam pemberian pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam penyaluran pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan, penerima pinjaman diwajibkan untuk memberikan jaminan atas pinjaman tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

Berikut rincian jaminan atas pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan tahun 2012-2015:

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan  
Tahun 2012**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Menanti Ketua : Husin	Desa sukal Kec. Muntok	74.500.000,00	48.804.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Biru Laut Ketua : Muhadi Rahman	Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga	70.590.000,00	91.519.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Teluk Akek Ketua : Hamzah	Desa Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	128.340.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Gelem Guntong Ketua : Azikin	Desa Air Lintang Kec. Tempilang	29.280.000,00	63.320.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Jiran Siantan Ketua : M. Ridwan	Desa Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	75.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Belanak Ketua : Saifudin	Desa Air Menduyung Kec. Simp. Teritip	74.765.000,00	78.100.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>399.135.000,00</b>	<b>485.083.000,00</b>	

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan  
Tahun 2013**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Barokah I Ketua : Dede Ibrahim	Kp. Tanjung Kec. Muntok	50.000.000,00	90.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Barokah 2 Ketua : Erwan	Kp. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00		<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
3	Kp. Air Terjun Ketua : Surtejo	Kp. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	89.112.500,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Karya Bahari Ketua : Sugeng	Dsn. Pait Kec. Muntok	75.000.000,00	163.800.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Sinar Matahari Ketua : Latan	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	46.065.000,00	55.928.125,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Hiu Putih Ketua : Romli	Ds. Kundi Kec. Sp. Teritip	72.800.000,00	90.646.375,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Beting Tunggul Ketua : Agus	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	90.228.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Goyang Kelabat Ketua : Abdu Rasyid	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	115.056.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Pasir Kuning 1 Ketua : Arsyad	Ds. Air Lintang Kec. Kelapa	75.000.000,00	108.600.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Pasir Kuning 2 Ketua : Supriadi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	37.500.000,00	66.500.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>621.365.000,00</b>	<b>869.871.000,00</b>	

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan  
Tahun 2014**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Teluk Rubiah Jaya Ketua : Maulana	Kp. Tanjung Kec. Muntok	20.000.000,00	25.850.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Kolek Bersama Ketua : Erwan	Desa. S. Daeng kec. Muntok	60.000.000,00	67.200.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
3	Rumpun Tanjung Ular Ketua : Ten Njuk San	Desa. Air Putih Kec. Muntok	20.000.000,00	20.520.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Teluk Rubiah Ketua : Suwandi	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	78.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Dsn. Tanjung Punai Ketua : Damsah	Dsn. Tj Punai Kec. Muntok	60.000.000,00	70.850.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Meluber Ketua : Deki s	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	60.000.000,00	78.250.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Ketapang Ketua : Sumarto	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	48.000.000,00	48.250.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Beting Kandis Ketua : Suhaimi S	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	86.140.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Teluk Kandis Ketua : Asmawi	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	52.000.000,00	52.300.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Raja Karang Ketua : Marzuki	Ds. Bakit Kec. Parit tiga	75.000.000,00	76.120.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
11	Mutiara Laut Ketua : Suadi	Ds. Bakit Kec. Parit Tiga	75.000.000,00	77.440.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
12	Karang Berang Berang Ketua : Efendi	Ds. S. Buluh Kec. Jebus	75.000.000,00	75.084.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
13	Teluk Akop Ketua : Sahbandi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.725.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>	<b>885.729.000,00</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan  
Tahun 2015**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Tj Putra Bahari Ketua : Imran Hasan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	52.500.000,00	52.600.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Selindung Jaya Ketua : Adin	Dsn. Selindung Kec. Muntok	41.000.000,00	41.360.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Harapan Semesta Ketua : Sudarso	Kel. Tanjung Kec. Muntok	17.250.000,00	17.800.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Ketam Ketua : Burhanudin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	43.500.000,00	43.700.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Sinar Tj. Harapan Ketua : Ardani B	Kel. Tanjung Kec. Muntok	73.500.000,00	73.560.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Sinar Cahaya Ketua : Rusdan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	48.750.000,00	49.440.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Kuat Bersama Ketua : H. Nurdin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	79.700.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Mandiri Usaha Bersama Ketua : Junaili	Kel. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00	40.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Tapak Nelayan Ketua : Andreas	Kel. S. Daeng Kec. Muntok	62.500.000,00	62.680.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Issamsi Ketua : Iskandar	Ds. Pangek Kec. Sp. Teriti[	36.240.000,00	36.248.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
11	Sinar Laut Mandiri Ketua : Abdul K	Ds. Bukit Terak Kec. Sp. Teritip	36.000.000,00	36.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
12	Samudera Ketua : Ba'in	Ds. Kundi Kec. Sp. Teritip	32.000.000,00	32.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
13	Sinar Harapan Laut 1 Ketua : Subuhari	Ds. Air lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	117.720.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
14	Sinar Harapan Laut 2 Ketua : Muslimin	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	139.230.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
15	Sinar Abadi 1 Ketua : Abesor	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.304.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
16	Teluk Akik Ketua : Kasir Munir	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	50.000.000,00	50.064.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
17	Teluk Kelabat Jaya Ketua : Kamaludin	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	58.750.000,00	59.760.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>891.990.000,00</b>	<b>1.061.166.000,00</b>	

4. Terdapat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada BLUD Sejiran Setason sebesar Rp2.363.054.662,15, kertas kerja piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran 9.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 6**

**PENUTUP**

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**H. SUKIRMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**BAB 6**

**PENUTUP**

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

BUPATI BANGKA BARAT, f  
  
H. SUKIRMAN